**POKOK POKOK PIKIRAN DPRD**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**TAHUN 2021**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kami sehingga DPRD D.I Yogyakarta telah selesai menyusun Pokok-Pokok Pikiran DPRD tahun 2021. Dalam penyusunan naskah Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2021 kami telah berusaha maksimal agar bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat D.I Yogyakarta, para stakeholders, pemerhati kebijakan pemerintah daerah, dan banyak pihak lainnya.

Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2021 berisi sejumlah pemikiran-pemikiran dari DPRD D.I Yogyakarta mengenai arah kebijakan pembangunan daerah D.I Yogyakarta tahun 2021. Sejumlah pemikiran mengenai arah kebijakan pembangunan tersebut ditujukan kepada pemerintah daerah D.I Yogyakarta sebagai salah satu aspirasi DPRD D.I Yogyakarta terhadap RKPD D.I Yogyakarta tahun 2021.

DPRD D.I Yogyakarta menegaskan bahwa dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2021 harus menjadi salah satu pedoman penting dalam musrenbang dan menjadi acuan dalam penyusunan RKPD D.I Yogyakarta tahun 2021. Terlepas dari berbagai kepentingan dalam menyusun proses perencanaan dan penganggaran kebijakan pembangunan daerah 2021, kami menyadari bahwa penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2021 masih banyak kekurangan, namun demikian DPRD D.I Yogyakarta selalu berpikir tentang dampak positif atas aspirasi masyarakat D.I Yogyakarta dalam konteks tersebut. Akhir kata, DPRD D.I Yogyakarta berharap dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2021 menjadi sesuatu yang bermanfaat terhadap proses perencanaan dan peganggaran daerah, khususnya untuk penyusunan RKPD 2021 dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat D.I Yogyakarta.

**Yogyakarta, 22 Agustus 2019**

**H. YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA, SE**

**Ketua DPRD D.I Yogyakarta**

# DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GRAFIK vii

DAFTAR GAMBAR ix

**BAB I PENDAHULUAN 1**

1. Latar Belakang 1
2. Dasar Hukum 4
3. Maksud dan Tujuan 7

**BAB II KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN 8**

1. Kondisi Umum 8
2. Aspek Geografi dan Demografi 9
3. Aspek Geografi 11
4. Aspek Demografi 15
5. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 18
6. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 19
7. Permasalahan 26
8. Bidang Pemerintahan 26
9. Bidang Ekonomi 27
10. Bidang Pembangunan 28
11. Bidang Kesejahteraan Rakyat 29

**BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2020 31**

1. Pengelolaan Keuangan Daerah 31
2. Dasar Hukum Pengelolaan 31
3. Struktur Keuangan Daerah 31
4. Kerangka Pendanaan 32
5. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 32
6. Arah Kebijakan Belanja Daerah 37
7. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 39
8. Rekomendasi dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY 40
9. Bidang Pemerintahan 40
10. Bidang Ekonomi 57
11. Bidang Pembangunan 79
12. Bidang Kesejahteraan Rakyat 94

**BAB IV PENUTUP 136**

# DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota 12

Tabel 2.2 Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur di DIY

Tahun 2017-2026 (ribu jiwa) 16

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota di DIY

Tahun 2010, 2015, dan 2017 17

Tabel 2.4 Kepadatan Penduduk DIY menurut Kabupaten/Kota 17

Tabel 2.5 IPM DIY Menurut Komponen Tahun 2014-2016 18

Tabel 2.6 IPM Kabupaten/kota di DIY Tahun 2014-2016 18

Tabel 2.7 PDRB DIY ADHB menurut Lapangan Usaha Tahun

2013-2017 20

Tabel 2.8 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin DIY T ahun

2012-2017 (Maret) 24

Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah DIY

Tahun 2015 s.d 2019 33

Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun 2015 s.d 2019 34

Tabel 3.3 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli

Daerah Tahun 2015 s.d 2019 34

Tabel 3.4 Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Tahun

2015 s.d 2019 35

Tabel 3.5 Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan terhadap PAD Tahun 2015 s.d 2019 35

Tabel 3.6 Kontribusi Lain-lain PAD Yang Sah terhadap PAD

Tahun 2015 s.d 2019 36

Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Dana Perimbangan Tahun

2015 s.d 2019 36

Tabel 3.8 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 37

Tabel 3.9 Pendanaan Daerah Tahun 2020 37

Tabel 3.10 Belanja Daerah 38

Tabel 3.11 Pembiayaan 39

Tabel 3.12 Usulan Urusan Pelayanan Publik 44

Tabel 3.13 Usulan Urusan Ketertiban, Ketentraman umum, dan

Perlindungan Masyarakat 46

Tabel 3.14 Usulan Urusan Pertanahan 47

Tabel 3.15 Usulan Urusan Administrasi Kependudukan dan

Catatan Sipil 48

Tabel 3.16 Usulan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa 49

Tabel 3.17 Usulan Urusan Komunikasi dan Informatika 49

Tabel 3.18 Usulan Urusan Persandian 50

Tabel 3.19 Usulan Urusan Perpustakaan 51

Tabel 3.20 Usulan Urusan Kearsipan 52

Tabel 3.21 Usulan Urusan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan

Desentralisasi 54

Tabel 3.22 Usulan Urusan Penanganan Bencana 55

Tabel 3.23 Usulan Urusan Keistimewaan Yogyakarta 56

Tabel 3.24 Urusan Pertanian 61

Tabel 3.25 Urusan Ketahanan Pengan 64

Tabel 3.26 Usulan Urusan Kelautan dan Perikanan 67

Tabel 3.27 Usulan Urusan Kehutanan 70

Tabel 3.28 Usulan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 72

Tabel 3.29 Usulan Urusan Penanaman Modal 74

Tabel 3.30 Usulan Urusan Pariwisata 76

Tabel 3.31 Usulan Urusan Perdagangan 77

Tabel 3.32 Usulan Urusan Perindustrian 79

Tabel 3.33 Usulan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang 83

Tabel 3.34 Usulan Urusan Perencanaan Pembangunan 87

Tabel 3.35 Usulan Urusan Perumahan 88

Tabel 3.36 Usulan Urusan Perhubungan 90

Tabel 3.37 Usulan Urusan Lingkungan Hidup 94

Tabel 3.38 Beberapa PenetapanIndikator Kinerja Utama DIY 97

Tabel 3.39 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan DIY 99

Tabel 3.40 Usulan Urusan Pendidikan……………………………… 100

Tabel 3.41 Usulan Urusan Pemuda dan Olahraga………………. 102

Tabel 3.42 Usulan Urusan Kesehatan 105

Tabel 3.43 Usulan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak 106

Tabel 3.44 Usulan Urusan Sosial 107

Tabel 3.45 Usulan Urusan Tenaga Kerja 109

Tabel 3.46 Usulan Urusan Kebudayaan 111

Tabel 3.47 Usulan Urusan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga 114

Tabel 3.48 Usulan Urusan Transmigrasi 117

# DAFTAR GRAFIK

halaman

Grafik 2.1 Persentase Luas Wilayah DIY menurut Kabupaten/

Kota 12

Grafik 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2011-2016 20

Grafik 2.3 Rasio Gini DIY Tahun 2012-2017 22

Grafik 2.4 Indeks Williamson DIY Tahun 2012-2016 22

Grafik 2.5 Garis Kemiskinan DIY Tahun 2010-2017 23

Grafik 2.6 Persentase Kemiskinan DIY menurut Perkotaan

dan Pedesaan Tahun 2010-2017 24

Grafik 2.7 Jumlah Penduduk Miskin DIY Tahun 2010-2017 25

Grafik 2.8 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan,

Tahun 2013-2017 25

**DAFTAR GAMBAR**

halaman

Gambar 2.1 Peta Administratif DIY 11

Gambar 2.2 Peta Satuan Fisiografis DIY 14

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Kemajuan tata kelola pemerintahan di Indonesia mengalami perkembangan pesat seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Perubahan teknologi informasi telah membawa banyak perubahan dalam pengelolaan kebijakan, pengembangan administratif, hingga terkoneksitasnya antar sektor dalam tata kelola pemerintahan. Kemajuan tata kelola pemerintahan juga ditunjang oleh perkembangan pemerintahan di Indonesia cukup maju, khususnya dalam menuju *governance reform* dengan dukungan komitmen dan teknologi informasi yang berkembang. Aksesibilitas pemerintah terhadap teknologi informasi memungkinkan melakukan terobosan untuk perbaikan tata pemerintahan dan layanan publik. Prinsip dasar memegang komitmen dan inovasi tata pemerintahan menjadi penting bagi keberlangsungan mewujudkan visi-misi yang telah dicanangkan. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) merupakan salah satu pemerintah daerah yang berlari terdepan dalam mengembangkan otonomi daerah dengan prinsip penguatan *good governance*. Pemda DIY menjadi tempat pembelajaran bagi daerah lain dalam pengembangan kebijakan publik, layanan pubik, dan tata pemerintahan.

Pengembangan *governance reform* menjadi penting bagi suatu daerah seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dimana perkembangan kebudayaan masyarakat dalam memperhatikan kinerja pemerintah daerah meningkat dengan dukungan teknologi informasi di *era millenial*. DIY mencanangkan berbagai visi pengembangan tata pemerintahan dengan penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi. Konteks tersebut sesuai dengan keinginan Pemda DIY untuk menguatkan dan mengoptimalkan yang telah didayagunakan untuk mewujudkan cita-citanya.

Pilihan DIY dalam membangun visi pembangunan lima tahun, 2017-2022 dengan tema **“Menyongsong "*Abad Samudera Hindia*" untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”** yang dipaparkan Gubernur DIY dalam Sidang Paripurna Istimewa tanggal 2 Agustus 2017. Tema visi tersebut menggambarkan makna pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah DIY pada Tahun 2017–2022, **Abad Samudera Hindia** ialah momentum yang perlu dimanfaatkan segenap pemangku kepentingan DIY untuk memanfaatkan potensi kelautan di sisi selatan DIY sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga serta mengurangi angka kemiskinan. Menyongsong Abad Samudera Hindia yang dimaksud dalam tema visi dilandasi pada aspek kesejahteraan, fenomena-fenomena *Indian Ocean Rim Association* (IORA), *Kra-Canal/ Thai Canal Project* serta Kemiskinan di Kawasan DIY Selatan.

Harapan akan potensi dan tantangan masa depan dari Abad Samudra Hindia tentunya berada di selatan DIY. Kabupaten-kabupaten yang berada di selatan DIY memiliki kesenjangan relatif tinggi dibanding wilayah utara dengan melihat dari angka kemiskinan. Angka kemiskinan menunjukkan adanya ketimpangan yaitu 11,03% di perkotaan sedangkan di pedesaan masih mencapai 15,12%, menurut data BPS pada bulan Maret 2018 secara umum angka kemiskinan DIY adalah 12,13%. Sebagian besar Warga miskin di wilayah pedesaan masih terjerat pada persoalan penyediaan pangan berupa pengeluaran untuk pembelian beras (sebesar 33,08%), sedangkan di wilayah perkotaan hanya menunjukkan angka sebesar 27,31%. Selanjutnya data BPS bulan Maret 2018 juga menunjukkanadanya kesenjangan antarkelompok pendapatan (Index Gini) di DIY masih tertinggi di Indonesia (0,441), dimana kesenjangan di perkotaan lebih tinggi (0,442) dibanding pedesaan (0,350).

Pemaparan tema visi tersebut merupakan bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode 2017-2022 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur DIY Tahun 2012-2017. Tema visi tersebut memiliki tema misi ***Panca Mulia*** yakni:

1. terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing,
2. terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,
3. terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,
4. terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
5. terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tema visi dan tema misi tersebut, memperhatikan dinamika yang terjadi Di bidang pemerintahan dimana perlu adanya perubahan-perubahan penting dengan tujuan agar dapat mencapai visi terkait untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik atau *good governance*dengan penyesuaian kearifan budaya lokal Yogyakarta. Tentu saja Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta menjadi acuan untuk mendorong tata pemerintahan yang baik dan sesuai dengan kaidah budaya lokal Yogyakarta. Perubahan tata pemerintahan tersebut harus menyesuaikan dengan Visi Gubernur DIY, dimana pengembangan tata pemerintahan harus sesuai dengan kebutuhan perkembangan pembangunan dan perubahan kultur masyarakat terbuka dan aksesibelterhadap informasi teknologi.

Pengembangan kebijakan daerah, khususnya menyangkut tata pemerintahan juga terbuka terhadap investasi. Sisi lainnya, persoalan Keistimewaan Yogyakarta juga harus menjadi perhatian serius. Pemerintah Daerah DIY hendaknya membangun Peraturan Daerah terkait dengan Keistimewaan Yogyakarta yang mempunyai keterbukaan dan jangkauan kedepan sebagai antisipasi dari perkembangan masyarakat, tata pemerintahan, dan pembangunan daerah. Tuntutan perkembangan zaman mengharuskan pemerintahan daerah mempunyai semangat inklusif, adaptatif terhadap perkembangan teknologi untuk membangun kebijakan daerah yang mampu memberikan perubahan-perubahan positif kedepan. Persoalan Keistimewaan Yogyakarta seharusnya bukan menjadi satu hambatan dalam pengembangan tata pemerintahan dan kebijakan pembangunan daerah, akan tetapi dapat menjadi faktor yang mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tema Visi Misi tersebut berkesinambungan dengan tema visi periode sebelumnya yakni tema visi RPJMD DIY 2012-2017 **“Jogja Renaisans”** yang dikemukakan kembali dalam pada Pidato Gubernur DIY pada Sidang Paripurna Istimewa tanggal 2 Agustus 2017 tersebut. Tema visi Gubernur DIY 2017-2022 meneruskan konsep ***“Jogja Renaisans”*** yang pada periode RPJMD DIY 2012-2017 dirumuskan dalam visi *“Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru.”* Konsep *“Renaisans Yogyakarta”* atau “*Jogja Renaisans”* merupakan sintesa dari trilogi filosofi Keistimewaan Yogyakarta (*Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi,* dan *Manunggaling Kawula Gusti*), ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia: Pancasila, dan etos asli (*Golong-Gilig, Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh*) dalam melahirkan kembali masa keemasan budaya klasik Yogyakarta. *“Renaisans Yogyakarta”* diwujudkan dengan semangat kolektif *Jogja Gumregah* untuk bergerak bersama membawa kebudayaan Yogyakarta ke tingkat yang lebih unggul.

Semangat *Jogja Gumregah* tersebut dapat menjadi wahana penggerak masyarakat menuju ke peningkatan dimensi nilai, pencarian nilai-nilai kebenaran, dimensi ekonomi terkait nilai kegunaan, dimensi estetis pada keindahan, dimensi sosial pada nilai *"trust",* dimensi politik pada nilai kuasa, dimensi keagamaan, dan nilai ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam lima tahun ke depan, spirit dari konsep *"Renaisans Yogyakarta"* secara konsisten tetap akan dipelihara, namun substansi dan penekanananya akan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan prediksi atas kondisi-kondisi yang sekiranya akan terjadi dalam kurun lima tahun ke depan.

Berangkat dengan pilihan perubahan visi untuk membangun kawasan selatan yang belum merata, khususnya sumberdaya manusia dan infrastruktur pembangunan kawasan pedesaan. Tema“ ***Menyongsong "Abad Samudera Hindia" untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”*** dengan **Panca Mulia** tersebut kemudian dirumuskan dalam Perda DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang RPJMD DIY 2017-2022 menjadi Visi “***Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja***” dengan misi:

1. **Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban**
2. **Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;**

Visi misi RPJMD DIY 2017-2022 tersebut dirumuskan dengan memperhatikan Prinsip SMART-C (*specific (*spesifik)*, measurable* (terukur)*, achievable* (dapat dicapai)*, relevant* (relevan dengan kondisi terkini)*, time bound* (memiliki Batasan waktu/ target waktu) *dan continously improve*; (dapat dikembangkan secara berkesinambungan). Dengan memenuhi prinsip tersebut masing-masing Misi RPJMD DIY 2017-2022 tersebut memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. **Misi 1: Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban.**

Memiliki tujuan:

Meningkat-nya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta

Dengan 5 sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM
2. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat.
3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan
4. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan
5. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah
6. **Misi 2: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;**

Memiliki tujuan:

Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*)

Dengan 3 sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan
2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan
3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa

Dalam rangka mencari solusi atas berbagai persoalan dalam konteks kebijakan pembangunan daerah di DIY, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY)sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah juga mendorong adanya kebijakan daerah dalam perencanaan pembangunan Tahun 2021 dengan menerbitkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY Tahun 2021. Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY secara empiris menunjukan adanya batasan waktu penyelesaian. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2021 ini digunakan sebagai bahan penyusunan draf awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2021.

Pada proses penjadwalannya, Pokok-Pokok Pikiran DPRD diserahkan kepada Gubernur melalui Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 14 Desember 2019 setelah disepakati dalam pembahasan rapat Badan Anggaran DPRD DIY. Penyampaian secara tepat waktu dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY Tahun 2021 ini dimaksudkan agar aspirasi publik yang termuat di dalamnya dapat terintegrasi dengan dokumen-dokumen turunannya seperti RKPD, KUA dan PPAS, RKA, dan RAPBD.

Proses penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY Tahun 2021 ini dilaksanakan dengan proses awal berupa pengumpulan dokumen hasil aspirasi masyarakat baik dalam bentuk laporan reses, audiensi, tamu, dan berbagai aspirasi lainnya,serta telaah terhadap APBD DIY tahun anggaran sebelumnya. Seluruh Tenaga Ahli Fraksi senantiasa berupa menghimpun masukan baik internal dalam fraksi dan dilanjutkan masukan dari tim pakar. Tahapan penyusunan draft Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY Tahun 2021 ini dipungkasi dengan proses finalisasi/harmonisasi melalui forum ekspose yang bersifat terbuka.

## Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi DIY Nomor 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2009);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 4,Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11).

## Maksud dan Tujuan

Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY Tahun 2021 ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pengawasan dalam pencapaian visi pembangunan jangka panjang (20 tahun; RPJPD DIY) dan terutama capaian jangka menengah (5 tahunan, RPJMD DIY) di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengedepankan aspirasi masyarakat untuk diakomodir dalam proses serta kebijakan perencanaan pembangunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY Tahun 2021 meliputi:

1. Memberikan bahan, arahan, sekaligus masukan kepada Pemerintah Daerah DIY dalam menyusun dokumen awal draf RKPD Tahun 2021.
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA dan PPAS, RKA SKPD dan RAPBD Tahun Anggaran 2020.
3. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi DIY melalui perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran Tahun 2021.
4. Mengarahkan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD DIY.
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD DIY sebagai representasi masyarakat DIY.
6. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat di DIY secara komprehensif.

# BAB II

# KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN

## Kondisi Umum

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII yang memimpin daerah swapraja memutuskan untuk menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimana pilihan dan keputusan tersebut membawa konsekuensi peleburan masyarakat Yogyakarta yang *homogen* kedalam masyarakat Indonesia yang *heterogen* dan menjadikan masyarakat Yogyakarta menjadi bagian kecil dari masyarakat Indonesia. Daerah Kasultanan Ngayogyakarta bergabung menjadi satu kesatuan dengan NKRI dan dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

Eksistensi DIY sebagai bagian yang tak terpisahkan dari NKRI secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY. Undang-Undang ini juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-undang ini telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819). Undang-undang tersebut menyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman.

Berdasarkan Amandemen Kedua UUD 1945, eksistensi DIY sebagai daerah istimewa diakui sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B Ayat (1) dan (2), yaitu: 1). Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; 2). Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Pada Tahun 2012, DIY memasuki sejarah pemerintahan yang baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Undang-Undang tersebut adalah bentuk pengakuan sekaligus penghormatan negara atas satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa. Selain berlaku sebagai instrumen yuridis, undang-undang tersebut juga menjadi pembeda Pemda DIY dengan pemerintah daerah yang lain.

Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin kebhinnekatunggalikaan, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan asas pengakuan hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhinnekatunggalikaan, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karena itu, dengan memperhatikan aspek *historis*, sosiologis, dan yuridis, substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintahan provinsi.

Kewenangan istimewa meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Dengan demikian Pemerintahan Daerah DIY mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan istimewa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### **2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi**

Karakteristik DIY ditinjau dari aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk memetakan pengembangan wilayah dalam menunjang kemajuan pembangunan daerah.

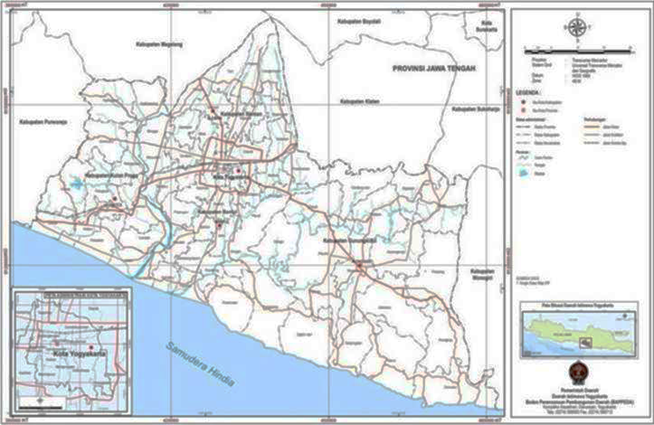
Secara geografis, wilayah DIY memiliki beberapa karakteristik. *Pertama*, secara umum kondisi tanah DIY tergolong subur sehingga dimungkinkan untuk ditanami berbagai tanaman pertanian. Namun masing-masing kabupaten/kota memiliki potensi alam yang berbeda karena wilayah DIY memiliki bentang alam yang terdiri dari pegunungan/perbukitan, dataran rendah, dan pesisir. Wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul terletak pada satuan fisiografi Gunung Merapi sehingga wilayah-wilayah tersebut sangat subur dan potensial untuk budidaya pertanian, khususnya tanaman semusim. Kabupaten Kulon Progo dan Bantul yang terletak pada dataran rendah di wilayah pesisir juga potensial untuk kegiatan budidaya pertanian semusim. Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul dan wilayah timur Kabupaten Bantul yang terletak pada jalur Pegunungan Seribu dan didominasi oleh perbukitan batu kapur dan *karst* kurang potensial untuk pertanian tanaman semusim. Lebih lanjut, Kabupaten Kulon Progo bagian utara yang berupa perbukitan, potensial untuk pengembangan perkebunan. *Kedua*, kondisi alam DIY menjadi sumber potensial untuk pengembangan pariwisata. Namun, kondisi alam tersebut juga menjadikan DIY berpotensi menjadi wilayah rawan bencana. *Ketiga*, wilayah pesisir DIY yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia memiliki potensi sumberdaya laut. *Keempat*, beberapa sungai yang melintas di DIY berpotensi untuk mendukung pengembangan wilayah sebagai sumber ketersediaan air untuk kebutuhan domestik, perkotaan, industri, dan pertanian. *Kelima*, perkembangan penggunaan lahan di DIY menunjukan bahwa telah terjadi pergeseran penggunaan lahan dari pertanian ke bukan pertanian.

Aspek geografi DIY tersebut memberikan gambaran bahwa kondisi alam DIY mendukung untuk: 1) pengembangan sektor pertanian baik tanaman pangan maupun perkebunan sehingga kemandirian dalam ketersediaan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin; 2) pengembangan sektor kelautan karena berbatasan langsung dengan Samudra Hindia; dan 3)pengembangan pariwisata alam sebagai daya tarik daerah yang dapat menarik investor dan menjadi sumber pendapatan daerah. Lebih lanjut, hal yang penting untuk diantisipasi agar pemanfaatan keunggulan aspek geografi dapat optimal adalah dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan yang ada. Salah satunya adalah antisipasi terhadap potensi bencana. Selain itu, pengaturan dan manajemen pengelolaan sumberdaya alam perlu ditegaskan agar keunggulan dan peluang yang dimiliki tidak hilang, seperti penegasan aturan alih fungsi lahan dan manajemen pengelolaan sektor-sektor unggulan dari aspek geografi, seperti pertanian, kelautan, dan pariwisata.

Sementara itu, ditinjau dari aspek demografi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, jumlah penduduk DIY mengalami peningkatan baik penduduk usia produktif maupun tidak produktif. Meningkatnya jumlah penduduk usia produktif perlu disikapi dengan membuat kebijakan yang tepat terkait upaya untuk menyiapkan kualitas angkatan kerja, menciptakan lapangan kerja, serta menyiapkan dukungan sarana dan prasarananya. *Kedua*, perlu antisipasi kebutuhan layanan yang memadai untuk penduduk usia lanjut. *Ketiga*, meskipun angka IPM DIY tergolong tinggi tetapi masih perlu diperhatikan bahwa beberapa wilayah di DIY capaian angka IPMnya masih rendah, yaitu Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo. Penjelasan rinci terkait aspek geografi dan demografi DIY akan diuraikan pada subbab-subbab berikut:

#### **Aspek Geografi**

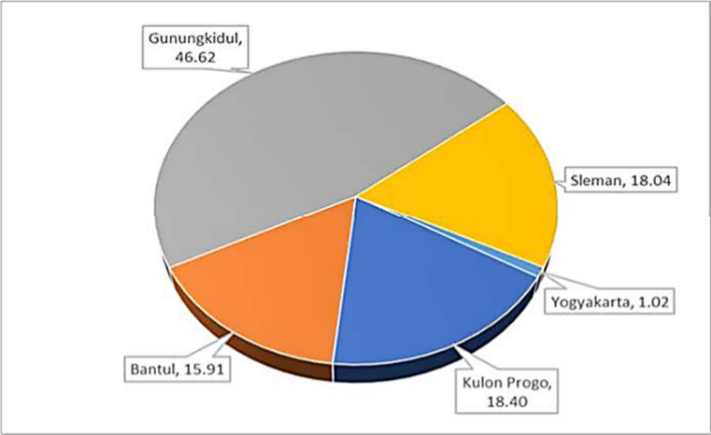
##### Letak, Luas, dan Batas Wilayah

**Luas wilayah DIY adalah 3.185,80 km2 atau 0,17% dari total luas Indonesia (1.860.359,67 km2) dan merupakan provinsi dengan luas terkecil setelah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Apabila ditinjau menurut kabupaten dan kota, wilayah di DIY yang terluas adalah Kabupaten Gunungkidul, yaitu meliputi 46,63% dari luas DIY sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 1,02%.

Gambar 1 Peta Administrasi DIY

Sumber: Bappeda DIY, RTRW Provinsi DIY Tahun 2009-2029 dalam RKPD DIY 2020

Secara Administratif, DIY terbagi menjadi empat kabupaten dan satu kota dengan 78 kecamatan dan terdapat 438 desa/kelurahan.



Gambar 2 Persentase Luas Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota

Sumber: BPS, Statistik Daerah DIY 2018,

DIY tidak memiliki kawasan pedalaman maupun kawasan terpencil. Menurut kondisi geografis, desa-desa di DIY terletak di daerah pesisir, lereng/punggung bukit, dan daerah dataran. Jumlah desa di DIY menurut letak geografis tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1 Jumlah Desa Menurut Kabupaten/ Kota dan Letak Geografis

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kabupaten/ Kota** | **Ibukota** | **Kecamatan** | **Kelurahan**  **/Desa** | **Pesisir** | **Lembah**  **/DAS** | **Lereng/ Punggung Bukit** | **Dataran** |
| Kulon Progo | Wates | 12 | 88 | 10 | - | 22 | 66 |
| Bantul | Bantul | 17 | 75 | 5 | - | 13 | 62 |
| Gunungkidul | Wonosari | 18 | 144 | 18 | 2 | 55 | 87 |
| Sleman | Sleman | 17 | 86 | - | - | 15 | 71 |
| KotaYogyakarta | Yogyakarta | 14 | 45 | - | - | - | 45 |
| DIY | Yogyakarta | 78 | 438 | 33 | 0 | 105 | 331 |

Sumber: BPS, DIY dalam Angka 2018 dalam RKPD DIY 2020

##### Topografi

Topografi merupakan studi tentang bentuk permukaan bumi. Topografi menampilkan relief permukaan, model tiga dimensi, dan identitas jenis lahan. Relief merupakan bentuk permukaan lahan yang dikelompokkan berdasarkan perbedaan ketinggian *(amplitude*) dari permukaan bumi suatu bentang lahan (*landform*).

Topografi secara kualitatif adalah bentang lahan (*landform*) dan secara kuantitatif dinyatakan dalam satuan kelas lereng (% atau derajat), arah lereng, panjang lereng dan bentuk lereng. Keadaan relief suatu daerah akan mempengaruhi tebal atau tipisnya lapisan tanah dan sistem pengaliran. Daerah yang memiliki topografi miring dan berbukit memiliki lapisan tanah yang lebih tipis karena tingkat erosi lebih tinggi, sedangkan daerah dengan topografi datar memiliki lapisan tanah yang tebal karena tingkat sedimentasi lebih tinggi. Kecepatan pengaliran air pada topografi datar lebih kecil daripada topografi yang lebih miring.

Topografi DIY dibagi menjadi kemiringan lahan dan ketinggian lahan dengan penjabaran sebagai berikut:

1. **Kemiringan lahan**

Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional DIY, kemiringan lahan di DIY dikelompokkan menjadi empat kategori kemiringan, yaitu lahan dengan kemiringan 0-2% seluas 1.223,47 km2, lahan dengan kemiringan 3-15%seluas 767,46 km2, lahan dengan kemiringan 16-40% seluas 806,17 km2, dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 388,21 km2.

1. **Ketinggian lahan**

Wilayah DIY dibagi menjadi empat kategori ketinggian lahan, yaitu wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl sebesar 28,84%, wilayah dengan ketinggian 100—499 mdpl sebesar 65,65%, wilayah dengan ketinggian 500—999 mdpl sebesar 5,04%, dan wilayah dengan ketinggian di atas 1000 mdpl sebesar 0,47%. Wilayah DIY terdiri dari ekosistem gunung api, karst, dataran aluvial, dan samudra Hindia yang kesemuanya memiliki potensi sumberdaya alam. Dengan penampang topografis yang dimiliki, wilayah DIY terbagi menjadi beberapa satuan fisiografis sebagai berikut:

1. Satuan Pegunungan Selatan, seluas ± 1.656,25 km², ketinggian 150–700 m, terletak di KabupatenGunungkidul, yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran basin Wonosari. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;
2. Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas ± 582,81 km², ketinggian 80– 2.911m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, KotaYogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air.
3. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas ± 215,62 km², ketinggian 0–80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu, daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam *marine* dan *aeolin* yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir;
4. Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas ± 706,25 km², ketinggian 0–572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.

Gambar 3 Peta Satuan Fisiografis DIY

Sumber: RKPD DIY 2021

##### Klimatologi

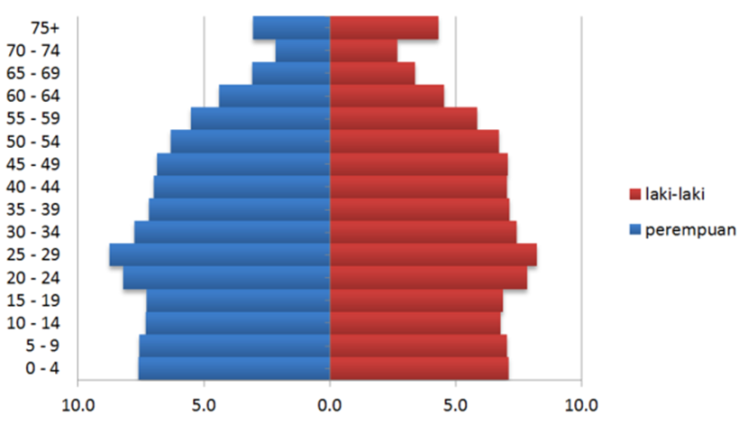
Kondisi iklim sangat berpengaruh pada suatu daerah, baik pada potensi sumberdaya alam maupun dalam potensi kebencanaan alam. DIY terletak pada wilayah yang dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim tropika, dan iklim laut. Iklim musim sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya satu periode perubahan angin adalah 6 bulan. Iklim musim terdiri dari 2 jenis, yaitu angin musim barat daya (Muson Barat) dan angin musim timur laut (Muson Timur). Angin muson barat bertiup sekitar bulan Oktober hingga April yang basah sehingga menyebabkan hujan. Angin muson timur bertiup sekitar bulan April hingga bulan Oktober yang sifatnya kering yang mengakibatkan wilayah mengalami musim kering/kemarau.

Sebagai daerah yang berada pada iklim tropis, kondisi iklim di DIY juga dipengaruhi oleh iklim tropis yang bersifat panas sehingga menyebabkan curah hujan tinggi. Di samping itu, karena letaknya yang sangat dekat dengan Samudera Indonesia, terjadi banyak penguapan air laut menjadi udara lembab dan mengakibatkan curah hujan tinggi.

Parameter iklim, seperti curah hujan, suhu udara, kelembaban udara dan arah angin, sangat berpengaruh pada potensi pengembangan sumberdaya alam, baik dilihat sebagai potensi cadangan alamiah maupun potensi alam berkesinambungan. Pada tahun 2017, DIY tercatat memiliki: a). suhu udara minimum 21,3˚C di bulan Agustus dan maksimum 31,9˚C di bulan Mei; b). jumlah curah hujan perbulan terbesar sebanyak 693 mm3 pada bulan November dan terendah sebanyak 0 mm3 pada bulan Agustus; c). kelembaban udara minimum 45,8% di bulan Agustus dan maksimum 97,1% d bulan Maret d). tekanan udara antara 1011,8 mb – 1015,7 mb; e), kecepatan angin minimum 0,7 knot dan maksimum 1,1 knot (Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2018).

#### **Aspek Demografi**

Jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta menurut BPS Provinsi DIY pada tahun 2017 sebanyak 3.762.167 jiwa dengan persentase jumlah penduduk laki- laki 49,46 persen atau sebanyak 1.860.869 jiwa dan penduduk perempuan 50,54 persen atau sebanyak 1.901.298 jiwa. Jumlah penduduk DIY terbesar tercatat berada di Kabupaten Sleman sebesar 1.193.512 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil sebanyak 421.295 jiwa berada di Kabupaten Kulon Progo. Komposisi penduduk berdasarkan umur dapat terlihat dalam gambar piramida penduduk berikut:



Gambar 4 Piramida Penduduk DIY Tahun 2016

Sumber : BPS, DIY Dalam Angka 2018 dalam RKPD DIY 2020

Pertumbuhan jumlah penduduk DIY dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi. Dari data BPS (DIY Dalam Angka 2018), tercatat bahwa laju pertumbuhan penduduk di DIY tahun 2010 – 2017 sebesar 1,17, dengan laju pertumbuhan terkecil di Kabupaten Gunungkidul sebesar 0.98 dan tertinggi di Kabupaten Bantul sebesar 1,22. Proyeksi pertumbuhan penduduk DIY dapat disajikan sebagai berikut,

Tabel 2 Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur di DIY Tahun 2017-2026 (ribu jiwa)

| Kelompok  Umur | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0‒4 | 276,5 | 277,3 | 277,8 | 277,9 | 277,6 | 276,8 | 275,6 | 274 | 271,9 | 269,7 |
| 5‒9 | 274,6 | 278,7 | 282,2 | 283,8 | 285,1 | 286,2 | 287 | 287,5 | 287,6 | 287,2 |
| 10‒14 | 265,2 | 266,4 | 268,3 | 272,1 | 276,1 | 280,1 | 284,2 | 287,7 | 289,2 | 290,5 |
| 15‒19 | 265,9 | 268,6 | 271,7 | 274,4 | 276,1 | 277,2 | 278,4 | 280,3 | 284,3 | 288,4 |
| 20‒24 | 301,1 | 295,2 | 289,9 | 286,3 | 285,4 | 287 | 289,8 | 293 | 295,9 | 297,6 |
| 25‒29 | 319,5 | 321,8 | 321,9 | 320,2 | 316,5 | 311,3 | 305,1 | 299,5 | 295,9 | 295 |
| 30‒34 | 285,3 | 291,7 | 298,7 | 306 | 312,2 | 316,7 | 318,8 | 319,1 | 317,2 | 313,7 |
| 35‒39 | 269,3 | 271,9 | 274,8 | 277,2 | 281,1 | 286,2 | 292,5 | 299,4 | 306,5 | 312,6 |
| 40‒44 | 264,2 | 264,3 | 264,8 | 266,5 | 267,7 | 269,8 | 272,3 | 275 | 277,3 | 281,2 |
| 45‒49 | 262,4 | 263 | 263,1 | 262,8 | 262,9 | 262,7 | 262,8 | 263,2 | 264,9 | 265,9 |
| 50‒54 | 245,2 | 249,4 | 252,9 | 255,5 | 257,5 | 258,6 | 259,2 | 259,2 | 258,8 | 258,9 |
| 55‒59 | 213,3 | 219,1 | 224,6 | 230 | 234,5 | 238,9 | 242,9 | 246,3 | 248,8 | 250,7 |
| 60‒64 | 168,1 | 176,1 | 183,6 | 190,4 | 197,4 | 203,6 | 209,2 | 214,4 | 219,6 | 223,9 |
| 65-69 | 121,7 | 127,2 | 133,5 | 140,4 | 147,2 | 154,5 | 161,9 | 168,9 | 175,1 | 181,6 |
| 70-74 | 91,3 | 92,6 | 94,7 | 97,7 | 100,9 | 104,9 | 109,7 | 115,2 | 121,2 | 127,1 |
| 75+ | 138,6 | 139,6 | 140,4 | 141,1 | 142,6 | 143,9 | 145,5 | 147,6 | 150,4 | 153,8 |
| Jumlah | 3.762,2 | 16.22,9 | 3.842,9 | 3.882,30 | 3.920,8 | 3.958,4 | 3.994,9 | 4.030,3 | 4.064,6 | 4.097,8 |

*Sumber: BPS, DIY dalam angka 2018*

Komposisi kelompok umur penduduk DIY selama kurun waktu 2017 dan proyeksi Tahun 2018-2026 didominasi oleh penduduk usia dewasa/produktif. Penduduk kelompok umur 0-4 tahun selama kurun waktu tersebut cenderung mengalami penurunan. Sejak Tahun 1990 struktur umur penduduk DIY dikatakan sebagai “penduduk usia tua” karena penduduk umur 0-14 tahun kurang dari 30% dan penduduk usia 65 tahun ke atas mengalami kenaikan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut mengindikasikan tingginya usia harapan hidup penduduk DIY.

Secara umum, kepadatan penduduk DIY pada tahun 2017 mencapai 1.181 jiwa per km2. Tingkat kepadatan penduduk di masing-masing kabupaten/kota dari tingkat kepadatan tertinggi ke terendah berturut-turut sebagai berikut: 1) Kota Yogyakarta, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 13.007 jiwa per km2, 2) Kabupaten Sleman, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 2.076 jiwa per km2, 3) Kabupaten Bantul, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.964 jiwa per km2, 4) Kabupaten Kulon Progo, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 719 jiwa per km2, dan 5) Kabupaten Gunungkidul, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 491 jiwa per km2.

Tabel 3.Kepadatan Penduduk DIY menurut Kabupaten/Kota

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kab/Kota | Tahun | |
| Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk  (per Km2) |
| Sleman | 31,72 | 2.076 |
| Bantul | 26,45 | 1.964 |
| Gunungkidul | 19,39 | 491 |
| Kulon Progo | 11,20 | 719 |
| Kota Yogyakarta | 11,24 | 13.007 |
| DIY | 100,00 | 1.181 |

*Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2018*

## Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, beberapa aspek pembangunan yang penting diperhatikan adalah aspek ekonomi dan sosial budaya. Pada aspek ekonomi beberapa indikator yang umum digunakan untuk menganalisis keberhasilan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan ketimpangan wilayah. Terdapat beberapa catatan kondisi makro Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjukkan oleh indikator-indikator tersebut selama kurun waktu lima tahun terakhir.

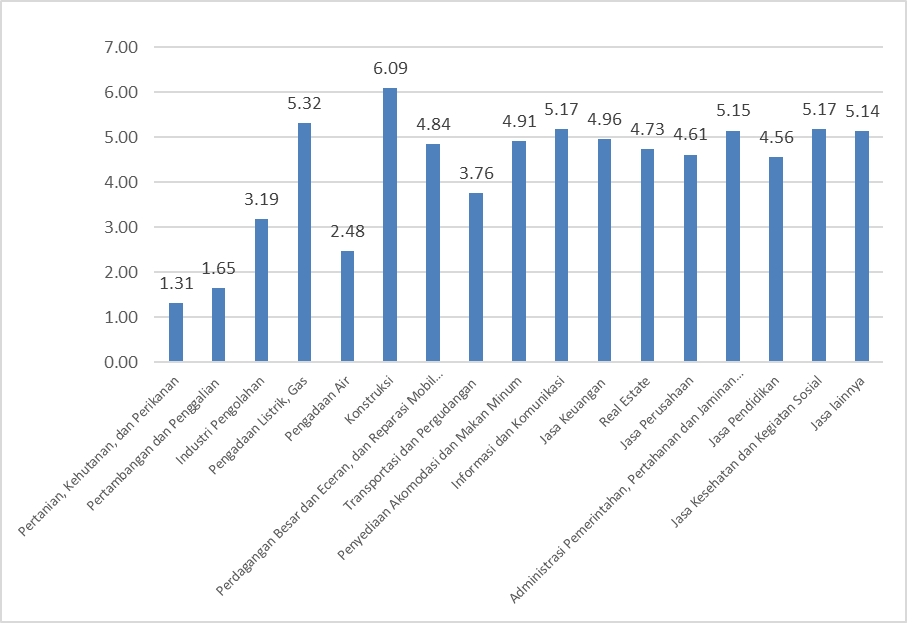
*Pertama*, pertumbuhan ekonomi DIY selama 2015-2019 berfluktuasi. Merujuk pada RKPD DIY 2020, Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) DIY selama periode 2015-2019 menunjukkan tren meningkat. Bahkan LPE setelah tahun 2015 selalu di atas 5% tiap tahunnya. Kenaikan LPE terbesar terjadi pada tahun 2018 yang meningkat sebesar 0,94 poin dari tahun 2017 sementara itu peningkatannya mengalami perlambatan sampai tahun 2019.

Gambar 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) DIY (%), 2015-2019

Sumber: BPS Provinsi DIY dan olahan dalam RKPD DIY 2020

Keterangan: Angka tahun 2019 adalah proyeksi Gambar 0‑6

Pertumbuhan ekonomi per sektor tahun 2019 menunjukkan bahwa semua sektor dalam perekonomian tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor konstruksi termasuk penyelesaian Bandara Udara Yogyakarta International Airport (YIA). Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 turun sebesar 0,10 poin menjadi 6,10%.



Gambar 7 Pertumbuhan Ekonomi per Tahun 2019 menurut Sektor (%)

Sumber: Olahan dalam RKPD DIY 2020

*Kedua*, ket*i*mpangan pendapatan yang dihitung dengan Indeks Gini menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Merujuk pada RKPD DIY 2020, Tingkat ketimpangan pendapatan ditunjukkan dengan Rasio Gini. Rasio Gini DIY cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2017. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yang meningkat sebesar 0,015 poin dari 0,425 di tahun 2016. Pada tahun 2019, Rasio Gini relatif sama dengan tahun sebelumnya.

Gambar 8 Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2015 - 2019

Sumber: Bappeda 2018

Keterangan: Angka 2019 adalah proyeksi

*Ketiga*, tingkat kemiskinan DIY cenderung mengalami penurunan dari tahun 2015. Merujuk pada RKPD DIY 2020, dalam periode lima tahun terakhir (2015 – 2019) jumlah penduduk miskin di D.I. Yogyakarta telah berkurang sebanyak 120,98 ribu penduduk. Penurunan jumlah kemiskinan yang cukup signifikan terjadi pada yahun 2016 dengan penurunan sebanyak 55 ribu orang.

Tabel 4 Kemiskinan di DIY Tahun 2015-2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Jumlah Orang Miskin (ribu orang) | 550.23 | 494.94 | 488.53 | 460.1 | 429.25 |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 14.91 | 13.34 | 13.02 | 12.13 | 11.26 |

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2018 dalam RKPD DIY 2020

Keterangan: Angka Tahun 2019 adalah Proyeksi

Persentase penduduk miskin mengalami tren menurun sampai dengan 2019. Pada 2019, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di D.I. Yogyakarta sebanyak 11,26% yang menurun terus dari 14,91% di tahun 2015.

Meskipun cenderung menurun dari tahun ke tahun, tingkat kemiskinan di DIY yang mencapai 11,81% pada tahun 2018 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional (9,66%). Bahkan jika dibandingkan dengan provinsi lain di regional Jawa-Bali, tingkat kemiskinan DIY merupakan yang tertinggi. DKI Jakarta yang mempunyai tingkat kemiskinan terendah pada September 2018 tercatat hanya sebesar 3,55%. Sementara itu, Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah berturut-turut sebesar 3,91%, 5,25%, 7,25%, 10,85%, 11,19%.

Penurunan kemiskinan DIY diduga mempunyai kaitan erat dengan semakin meningkatnya kondisi perekonomiannya. Pertumbuhan ekonomi DIY terus meningkat dari tahun ke tahun, bankan lebih tinggi dibandingkan nasional. Selain itu, dalam periode lima tahun terakhir, tingkat inflasi di DIY juga relatif terkendali. Dengan terkendalinya harga maka diduga daya beli penduduk miskin dapat terjaga sehingga mereka mampu mengkonsumsi aneka barang dan jasa. Penurunan penduduk miskin di juga sejalan dengan meningkatnya tingkat pendapatan petani di perdesaan yang ditunjukkan dengan membaiknya Nilai Tukar Petani (NTP).

Gambar 9 Tingkat Kemiskinan DIY dan Nasional tahun 2014-2018

Sumber: BPS DIY, 2014-2019 dalam RKPD DIY 2020

Apabila dilihat antar kabupaten/kota di DIY, tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan DIY. Seperti yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya, kondisi ini sejalan dengan ketimpangan PDRB antar wilayah.

Tabel 5 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2014- 2018 dalam persen

| **Nama Wilayah** | **2014**  **(Maret)** | **2015 (Maret)** | **2016 (Maret)** | **2017 (Maret)** | **2018 (Maret)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIY | 14,55 | 14,91 | 13,34 | 13,02 | 12,13 |
| Kulon Progo | 20,64 | 21,40 | 20,30 | 20,03 | 18,30 |
| Bantul | 15,89 | 16,33 | 14,55 | 14,07 | 13,43 |
| Gunung Kidul | 20,83 | 21,73 | 19,34 | 18,65 | 17,12 |
| Sleman | 9,50 | 9,46 | 8,21 | 8,13 | 7,65 |
| Kota Yogyakarta | 8,67 | 8,75 | 7,70 | 7,64 | 6,98 |

Sumber: BPS DIY, 2019 dalam RKPD DIY 2020

Ditinjau dari tipe daerah, tingkat kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan terus menurun dalam periode 2014 hingga 2018. Namun, tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan wilayah perkotaan. Hal tersebut konsisten dengan data Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul yang masih didominasi wilayah pedesaan yang memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Namun demikian, yang perlu menjadi perhatian juga adalah besarnya jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan jauh lebih besar dari jumlah penduduk miskin di pedesaan. Tahun 2018 terdapat sekitar 10,73% penduduk miskin di wilayah perkotaan atau setara dengan 298,47 ribu penduduk. Sementara itu, di wilayah pedesaan hanya sekitar 151,78 ribu jiwa (14,71%). Tingginya jumlah penduduk di wilayah perkotaan sejalan dengan tingginya jumlah penduduk yang tinggal di kawasan tersebut dengan luas wilayah yang relatif lebih kecil.

Tabel 6 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin DIY Menurut Tipe Daerah, 2014-2017

| **Periode** | **Perkotaan** | | **Pedesaan** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Penduduk Miskin (ribu orang)** | **Presentase Penduduk Miskin (%)** | **Penduduk Miskin (ribu orang)** | **Presentase Penduduk Miskin (%)** |
| Maret 2014 | 333,03 | 13,81 | 211,84 | 17,36 |
| September 2014 | 324,43 | 13,36 | 208,15 | 16,88 |
| Maret 2015 | 329,65 | 13,43 | 220,57 | 17,85 |
| September 2015 | 292,64 | 11,93 | 192,91 | 15,62 |
| Maret 2016 | 297,71 | 11,71 | 197,23 | 16,63 |
| September 2016 | 301,25 | 11,68 | 187,58 | 16,27 |
| Maret 2017 | 309,03 | 11,72 | 179,51 | 16,11 |
| September 2017 | 298,39 | 11,00 | 167,94 | 15,86 |
| Maret 2018 | 305,24 | 11,03 | 154,86 | 15,12 |
| September 2018 | 298,47 | 10,73 | 151,78 | 14,71 |

Sumber: BPS DIY, 2014–2019 sumber RKPD DIY 2020

Garis Kemiskinan (GK) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Adapun GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Adapun Garis Kemiskinan Non Makanan menunjukkan banyaknya rupiah yang diperlukan untuk mendapatkan kebutuhan pokok bukan makanan seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Secara nasional maupun di DIY, terdapat pola peningkatan garis kemiskinan dari tahun ke tahun yang didorong oleh peningkatan harga-harga. Peningkatan garis kemiskinan jika tidak diiringi dengan peningkatan daya beli tentu berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin di DIY. Hal ini perlu menjadi perhatian dan diantisipasi dengan upaya pengendalian harga-harga terutama bahan kebutuhan pokok.

Dibandingkan dengan wilayah perdesaan, garis kemiskinan di kota lebih tinggi. Garis kemiskinan perkotaan DIY selama lima tahun terakhir juga hampir selalu lebih besar dibandingkan garis kemiskinan perkotaan nasional. Sementara itu, garis kemiskinan perdesaan DIY lebih rendah daripada nasional.

Tabel 7 Garis Kemiskinan DIY dan Indonesia Menurut Tipe Daerah Tahun 2014-2018

| **Periode** | **Perkotaan** | | **Perdesaan** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DIY** | **Indonesia** | **DIY** | **Indonesia** |
| Maret 2014 | 327.273 | 318.514 | 286.137 | 286.097 |
| September 2014 | 333.561 | 326.853 | 296.429 | 296.681 |
| Maret 2015 | 347.787 | 342.541 | 312.249 | 317.881 |
| September 2015 | 359.470 | 356.378 | 324.386 | 333.034 |
| Maret 2016 | 364.786 | 364.527 | 331.308 | 343.647 |
| September 2016 | 370.510 | 372.114 | 337.230 | 350.420 |
| Maret 2017 | 385.308 | 385.621 | 348.061 | 361.496 |
| September 2017 | 413.631 | 400.995 | 352.861 | 370.910 |
| Maret 2018 | 426.580 | 415.614 | 366.256 | 383.908 |
| September 2018 | 432.018 | 425.770 | 369.606 | 392.154 |

Sumber: BPS DIY, 2014 – 2019 dalam RKPD DIY 2020

Merujuk pada RKPD DIY 2020, lima komoditas makanan yang memberikan kontribusi terbesar pada garis kemiskinan makanan di perkotaan maupun di perdesaan yaitu beras, daging sapi, rokok kretek filter, telur ayam ras, dan daging ayam ras walaupun dengan komposisi yang berbeda-beda. Hal ini sedikit berbeda dengan kondisi pada tahun 2017 dimana keberadaan gula pasir sebagai bagian dari lima komoditas terbesar penyumbang garis kemiskinan tergeser oleh daging ayam ras. Sementara itu, Beras masih memberikan kontribusi tertinggi dalam garis kemiskinan di perkotaan dan perdesaan. Oleh karena itu, program-program terkait operasi pasar beras dalam rangka menjaga kestabilan harga beras maupun beras untuk masyarakat miskin masih perlu dilanjutkan dengan memperhatikan ketepatan sasaran penerima. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah pengeluaran untuk rokok kretek filter yang masih menempati urutan atas. Upaya-upaya promosi kesehatan untuk masyarakat perihal bahaya rokok harus terus diupayakan.

Tabel 8 Persentase Komoditas Garis Kemiskinan berdasarakan Jenis Komoditas Makanan dan Non Makanan Menurut Tpe Daerah September 2018 (%)

| **﻿Jenis Komoditi** | **Perkotaan** | **Jenis Komoditi** | **Perdesaan** |
| --- | --- | --- | --- |
| Garis Kemiskinan Makanan | | | |
| Beras | 22,44 | Beras | 24,87 |
| Daging sapi | 11,30 | Telur ayam ras | 6,71 |
| Rokok kretek filter | 9,46 | Daging ayam ras | 5,45 |
| Telur ayam ras | 6,34 | Rokok kretek filter | 4,52 |
| Daging ayam ras | 4,71 | Daging sapi | 4,43 |
| Garis Kemiskinan Non Makanan | | | |
| Bensin | 30,18 | Perumahan | 28,33 |
| Perumahan | 24,07 | Bensin | 19,11 |
| Listrik | 10,10 | KayuBakar | 5,91 |
| Pendidikan | 5,04 | Listrik | 5,36 |
| Perlengkapan Mandi | 3,47 | Kesehatan | 4,90 |
| Sumber: BPS DIY, 2019 | | | |

Terkait dengan kemiskinan, indikator lain yang perlu diperhatikan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) digunakan untuk mengukur kesenjangan antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat homogenitas pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P2 menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar diantara penduduk miskin itu sendiri.

Indeks Kedalaman Kemiskinan DIY menunjukkan adanya penurunan yang sangat signifikan. Pada September 2017, indeks P1 tercatat sebesar 2,091. Pada September 2018, nilai indeks P1 turun menjadi 1,650 atau turun lebih dari 21%. Hal tersebut menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang semakin mendekati garis kemiskinan. Dengan semakin berkurangnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan mengindikasikan bahwa pendapatan penduduk miskin mengalami peningkatan yang diindikasikan dengan peningkatan pengeluarannya.

Indeks Keparahan Kemiskinan justru sedikit berfluktuasi pada rentang waktu yang sama. Pada September 2017 - Maret 2018 terlihat bahwa indeks P2 di D.I. Yogyakarta mengalami peningkatan dari 0,462 menjadi 0,504. Sebaliknya, hasil Susenas Maret 2018 memperlihatkan situasi dimana terlihat adanya penurunan indeks P2 menjadi 0,349. Meskipun menunjukkan adanya fluktuasi secara keseluruhan, tingkat kesenjangan diantara penduduk miskin menunjukkan adanya penurunan.

Tabel 9 Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi di Jawa dan Nasional Tahun 2014-2018

| **Prov** | **Maret 2014** | **Sept 2014** | **Maret 2015** | **Sept 2015** | **Maret 2016** | **Sept 2016** | **Maret 2017** | **Sept 2017** | **Maret 2018** | **Sept 2018** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DKI Jakarta | 0,39 | 0,6 | 0,52 | 0,27 | 0,46 | 0,43 | 0,49 | 0,61 | 0,51 | 0,50 |
| Jawa Barat | 1,52 | 1,39 | 1,63 | 1,67 | 1,49 | 1,28 | 1,45 | 1,39 | 1,32 | 1,13 |
| Jawa Tengah | 2,25 | 2,09 | 2,44 | 2,17 | 2,37 | 2,12 | 2,21 | 2,11 | 1,85 | 1,63 |
| DI Yogyakarta | 2,19 | 2,35 | 2,93 | 2,32 | 2,3 | 1,75 | 2,19 | 2,09 | 2,07 | 1,65 |
| Jawa Timur | 1,85 | 1,86 | 2,06 | 2,13 | 1,99 | 1,95 | 1,87 | 2,09 | 1,95 | 2,07 |
| Banten | 0,83 | 0,79 | 0,94 | 0,9 | 0,8 | 0,76 | 0,86 | 0,78 | 0,82 | 0,91 |
| Indonesia | 1,75 | 1,75 | 1,97 | 1,84 | 1,94 | 1,74 | 1,83 | 1,79 | 1,71 | 1,63 |

Sumber: BPS, 2014 –2018 dalam RKPD DIY 2020

Tabel 10 Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi di Jawa dan Nasional Tahun 2014-2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prov** | **Maret 2014** | **Sept 2014** | **Maret 2015** | **Sept 2015** | **Maret 2016** | **Sept 2016** | **Maret 2017** | **Sept 2017** | **Maret 2018** | **Sept 2018** |
| DKI Jakarta | 0,17 | 0,07 | 0,07 | 0,13 | 0,1 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,15 |
| Jawa Barat | 0,3 | 0,44 | 0,38 | 0,33 | 0,43 | 0,49 | 0,37 | 0,28 | 0,37 | 0,35 |
| Jawa Tengah | 0,54 | 0,59 | 0,56 | 0,51 | 0,65 | 0,59 | 0,63 | 0,54 | 0,57 | 0,55 |
| DI Yogyakarta | 0,55 | 0,46 | 0,48 | 0,61 | 0,83 | 0,63 | 0,59 | 0,36 | 0,55 | 0,46 |
| Jawa Timur | 0,43 | 0,5 | 0,44 | 0,45 | 0,52 | 0,61 | 0,47 | 0,47 | 0,45 | 0,56 |
| Banten | 0,16 | 0,29 | 0,19 | 0,18 | 0,23 | 0,21 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,16 |
| Indonesia | 0,43 | 0,48 | 0,43 | 0,44 | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 0,44 | 0,48 | 0,46 |

Sumber: BPS, 2014 – 2019

Merujuk pada RKPD DIY 2020, apabila dibandingkan dengan daerah lain di Jawa, dapat diketahui bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan DIY termasuk tinggi, walaupun masih lebih baik dibandingkan Jawa Timur. Indeks Kedalaman Kemiskinan DIY juga masih berada di atas rata-rata nasional. Di sisi lain, Indeks Keparahan Kemiskinan DIY sama dengan rata-rata nasional, serta lebih baik dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur.

#### **Fokus Kesejahteraan Sosial**

Merujuk pada RKPD DIY 2020, kesejahteraan masyarakat DIY dapat dilihat dari fokus Kesejahteraan Sosial. Fokus ini memotret kondisi kesejahteraan masyarakat terutama dari segi pendidikan dan kesehatan. Analisis fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa capaian indikator untuk mendapatkan gambaran kondisi saat ini dan menemukenali permasalahan yang ada. Indikator-indikator tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator pembangunan pendidikan (Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni), indikator pembangunan kesehatan (Angka kematian bayi dan angka harapan hidup) dan rasio penduduk yang bekerja.

##### Indeks Pembangunan Manusia

Merujuk pada RKPD DIY 2020, capaian nilai IPM menurut kabupaten/kota di DIY bervariasi. Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang memiliki nilai IPM tertinggi diikuti oleh Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan terendah adalah Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2017, IPM Kota Yogyakarta dan Sleman berstatus sangat tinggi sedangkan Bantul dan Kulon Progo masuk dalam kategori tinggi. Sementara itu, Gunungkidul dengan nilai IPM 68,73 berada pada kategori sedang.

Berdasarkan perkembangan nilai IPM tersebut dapat diketahui juga bahwa dari tahun 2016 ke 2017 kenaikan nilai IPM Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul dan Sleman lebih tinggi dibandingkan kenaikan IPM provinsi (0,51). Kenaikan IPM ketiga kabupaten tersebut berturut-turut adalah 1,17%, 1,34% dan 0,85%.

Tabel 11 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2014-2017

| **Kabupaten/Kota** | **2014** | **2015** | | | **2016** | **2017** | **2018** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kota Yogyakarta | 83,78 |  | 84,56 |  | 85,32 | 85,49 | 86,11 |
| Kabupaten Bantul | 77,11 |  | 77,99 |  | 78,42 | 78,67 | 79,45 |
| Kabupaten Kulon Progo | 70,68 |  | 71,52 |  | 72,38 | 73,23 | 73,76 |
| Kabupaten Gunungkidul | 67,03 |  | 67,41 |  | 67,82 | 68,73 | 69,24 |
| Kabupaten Sleman | 80,73 |  | 81,20 |  | 82,15 | 82,85 | 83,42 |
| DIY | 76,81 | 77,59 | | | 78,38 | 78,89 | 79.53 |

Sumber: BPS DIY 2019 dalam RKPD DIY 2020

Berdasarkan capaian indikator IPM, hal yang perlu diperhatikan adalah upaya untuk meningkatkan kinerja faktor-faktor yang dapat mendorong peningkatan capaian IPM khususnya di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, perlu diperhatikan juga upaya untuk mendorong kenaikan peningkatan capaian IPM setiap tahunnya terutama untuk wilayah yang kenaikan capaian IPM-nya masih di bawah kenaikan provinsi. Hal tersebut perlu koordinasi lintas sektor antara OPD-OPD pengampu di provinsi dan kabupaten/kota.

##### 2.2.1.1.2. Harapan Lama Sekolah

Merujuk pada RKPD DIY 2020, salah satu indikator yang digunakan untuk melihat capaian pembangunan pendidikan adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS mencerminkan kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Selama 2014-2017 perkembangan capaian angka HLS DIY cenderung memiliki tren yang meningkat meskipun relatif kecil. Kenaikan angka HLS tersebut berarti bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2014 angka HLS DIY mencapai 14,85 tahun meningkat sebesar 0,57 poin menjadi 15,42 tahun tahun 2017. Capaian 2017 tersebut menunjukan bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus D3 atau D4.

Menurut kabupaten/kota, angka HLS tertinggi terdapat di Kota Yogyakarta diikuti Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul. Capaian angka HLS Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman relatif tinggi dan berada di atas capaian provinsi sedangkan capaian tiga kabupaten lainnya masih di bawah capaian provinsi. Tahun 2017, angka HLS Kota Yogyakarta mencapai 16,82 tahun, Kabupaten Sleman 16,48 tahun, Kabupaten Bantul 14,73 tahun, Kabupaten Kulon Progo 14,23 tahun dan Kabupaten Gunungkidul 12,94 tahun.

Tabel 12 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota di DIY (Tahun), 2014-2017

| **Kabupaten/kota** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulon Progo | 13.27 | 13.55 | 13.97 | 14.23 |
| Bantul | 14.62 | 14.72 | 14.73 | 14.74 |
| Gunungkidul | 12.82 | 12.92 | 12.93 | 12.94 |
| Sleman | 15.64 | 15.77 | 16.08 | 16.48 |
| Kota Yogyakarta | 15.97 | 16.32 | 16.81 | 16.82 |
| DIY | 14.85 | 15.03 | 15.23 | 15.42 |

Sumber: BPS DIY, 2018 dalam RKPD DIY 2020

Dilihat dari capaian angka Harapan Lama Sekolah menurut kabupaten/kota, Pembangunan pendidikan di tiga kabupaten/kota, yaitu Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul masih perlu ditingkatkan. Selain itu, capaian indikator Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan terdapat disparitas yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di DIY. Hal ini merupakan tantangan bagi Pemda DIY dalam meningkatkan dan memeratakan kualitas dan akses pendidikan di DIY.

##### Angka Partisipasi Murni

Merujuk pada RKPD DIY 2020, perkembangan data Angka Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan disimpulkan bahwa diperlukan upaya untuk meningkatkan capaian Angka Partisipasi Murni pada jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat. Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan atau mengakses fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya. Jika seluruh penduduk yang berusia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100.

Perkembangan APM semua jenjang pendidikan di DIY selama 2014-2018 memiliki pola yang sama dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018, APM SD sederajat mencapai 99,50%, APM SMP sederajat mencapai 83,61% dan APM SMA sederajat sebesar 70,22%. Capaian APM SD sederajat 99,5% menunjukkan bahwa masih ada 0,5% penduduk berusia 7-12 tahun yang tidak bersekolah pada jenjang SD karena terlambat masuk sekolah atau sudah bersekolah di jenjang SLTP. Sementara itu, capaian APM SMP sederajat dan SMA sederajat berarti bahwa masih ada 16,4% penduduk berusia 13-15 tahun yang statusnya tidak bersekolah pada jenjang SMP dan terdapat 29,8% penduduk berusia 16-18 tahun yang tidak bersekolah pada jenjang SMA. Pada jenjang SMA sederajat teridentifikasi bahwa sebesar 14,4% masih bersekolah pada jenjang SMP, 7,4% bersekolah pada jenjang perguruan tinggi dan 7% berstatus putus sekolah.

Gambar 1013Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) DIY Menurt Jenang Pendidikan di DIY (%), 2014-2018

Sumber : BPS DIY, 2018 dalam RKPD DIY 2020

Berdasarkan perkembangan data APM menurut jenjang pendidikan tersebut dapat disimpulkan bahwa diperlukan upaya untuk meningkatkan capaian APM pada jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat. Upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar berkemauan untuk bersekolah pada jenjang yang lebih tinggi serta upaya-upaya untuk menambah fasilitas dan kemudahan bagi masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi perlu ditingkatkan.

Lebih lanjut, hasil identifikasi terhadap penduduk berusia 16-18 tahun yang tidak bersekolah pada jenjang SMA diantaranya menunjukkan bahwa 14,4% masih bersekolah pada jenjang SMP dan 7% berstatus putus sekolah. Hal ini berarti masih diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan putus sekolah, keterlambatan anak bersekolah pada umur seharusnya dan tinggal kelas.

##### 2.2.1.1.4. Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup

Capaian indikator pembangunan kesehatan ditinjau dari dua (2) indikator, yaitu angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Perkembangan angka kematian bayi berfluktuatif selama periode 2000-2017 sehingga perlu perhatian lebih mendalam tentang penyebab kenaikan dan penurunannya sebagai bahan kebijakan untuk mengantisipasi kenaikan angka kematian bayi pada masa mendatang. Sementara itu, capaian angka harapan hidup DIY pada tahun 2017 tercatat paling tinggi. Upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian angka harapan hidup harus diiringi dengan upaya untuk menyediakan fasilitas dan menetapkan peraturan terkait kesejahteraan penduduk lanjut usia.

Merujuk pada RKPD DIY 2020, perkembangan angka kematian bayi di DIY dari tahun 2000 hingga 2017 berfluktuasi. Data dari Sensus Penduduk (SP) tahun 2000 menunjukkan bahwa angka kematian bayi sebesar 24 kemudian mengalami penurunan hingga pada tahun 2010 mencapai 16. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 terjadi kenaikan angka kematian bayi yang mencapai 25 tetapi kemudian pada tahun 2017 tercatat turun menjadi 17. Angka kematian bayi sebesar 17 berarti bahwa terdapat 17 kasus kematian bayi untuk 1000 kelahiran hidup.

Gambar 11 Perkembangan Angka Kematian Bayi di DIY, 2000-2017

Sumber: BPS DIY, 2018 dalam RKPD DIY 2020

Perkembangan angka kematian bayi yang fluktuatif tersebut perlu diperhatikan dan dipelajari lebih lanjut apa penyebab kenaikan dan penurunannya sehingga hal tersebut dapat menjadi masukkan bagi pengambil kebijakan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kenaikan angka kematian bayi pada masa mendatang.

Indikator berikutnya yang menggambarkan derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Harapan Hidup (AHH). AHH pada saat lahir (*life expectancy at birth*) adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Selama periode 2010-2017, AHH DIY menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat. Pada tahun 2010 AHH DIY mencapai 74, 17tahun terus mengalami kenaikan hingga mencapai 74, 74 tahun pada 2017.

Perkembangan AHH di DIY dalam kurun waktu 2010-2017 menunjukkan peningkatan. Dari 74, 17 tahun di tahun 2010 meningkat menjadi 74,74 tahun di tahun 2017. Angka 74, 74 tahun tersebut menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang lahir pada tahun 2017 hingga akhir hayatnya. Capaian AHH dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu kesehatan, ekonomi, budaya dan pendidikan sehingga untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian AHH diperlukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap upaya-upaya dari berbagai faktor tersebut.

##### 2.2.1.1.5 Rasio Penduduk Bekerja

Merujuk pada RKPD DIY 2020, Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau menggambarkan permintaan tenaga kerja.

Tabel 14 Perkembangan Angkatan Kerja di DIY, 2014 - 2018

| **Ketenagakerjaan** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Angkatan Kerja (Ribu Orang) | 2.023,46 | 1.971,46 | 2.099,44 | 2.117,19 | 2.191,74 |
| Bekerja (Ribu Orang) | 1.956,04 | 1.891,22 | 2.042,40 | 2.053,17 | 2.118,39 |
| Persentase penduduk bekerja terhadap angkatan kerja | 96,67 | 95,93 | 97,28 | 96,98 | 96,65 |

Sumber: BPS DIY, 2018 diolah.

Persentase penduduk bekerja terhadap angkatan kerja tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,32 poin dari 96,98% tahun 2017 menjadi 96,65%. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa penambahan angkatan kerja tidak diikuti penambahan lapangan pekerjaan sehingga meskipun jumlah orang bekerja mengalami peningkatan, jumlah pengangguran juga meningkat.

## Permasalahan

Memasuki tahun ke-empat (2021) dalam mewujudkan Visi Gubernur DIY Tahun 2017-2022 yaitu **“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”** Merujuk pada RPJMD DIY 2017-2022, Pemda DIY memiliki indikasi tema pembangunan tahun 2021 ***“Peningkatan kualitas SDM berbasis keistimewaan”*** Tema tersebut relevan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah DIY yaitu Ketimpangan Wilayah, Kemiskinan, serta Sumber dan Alokasi Dana Pembangunan. Dengan memperhatikan pekerjaan rumah tersebut perlu menjadi perhatian bahwa pertumbuhan ekonomi DIY 2018 sebesar 6,2% belum optimal berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan yang masih 2 digit (11,81%, September 2018) sementara target akhir RPJMD DIY adalah angka kemiskinan 7% pada tahun 2022. Selain itu, pembangunan di DIY perlu memperhatikan adanya kelompok rentan yang perlu mendapatkan perhatian agar hasil pembangunan dapat dinikmati untuk seluruh masyarakat secara adil dan merata.

Permasalahan ketimpangan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi wilayah dapat dilihat dari bagaimana terjadinya ketimpangan PDRB dan IPM antar kabupaten/kota di DIY, terutama yang berada di selatan DIY. Dalam rangka penanganan pekerjaan rumah terkait kemiskinan dan ketimpangan wilayah, Pemda DIY menghadapi tantangan yakni Keterbatasan Sumber Dana Pembangunan yang perlu diatasi dengan Peningkatan Sumber-sumber Dana Pembangunan, diantaranya bagaimana pengelolaan dana keistimewaan yang berkontribusi/mendukung pencapaian prioritas DIY sekaligus menangani permasalahan yang ada.

Untuk menyusun pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD untuk RKPD 2021 maka kami menggunakan basis data capaian kinerja pemerintah DIY sampai dengan tahun 2019, terutama untuk beberapa indicator seperti angka kemiskinan, umur harapan hidup dan indeks pembangunan manusia. Data tersebut dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2017-2022. Kemudian juga kami perhatikan histori kinerja pemerintah DIY selama beberapa tahun terakhir disajikan untuk melihat trend yang ada. Hasil reses setiap anggota DPRD kami jadikan sebagai bahan masukan penting untuk menyusun Pokir.Selain itu juga ada masukan dari pakar untuk memberi saran dan kritik atas berbagai persoalan prioritas sesuai dengan fokus pembangunan pada tahun2021.

Urusan keistimewaan DIY sebagaima date dari UUK, sesuai dengan tujuannya salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DIY mendapatkan alokasi dana keistimewaan yang nilainya dari tahun ketahun terus meningkat. Hal ini patut disyukuri karena keterbatasaan sumber pendapatan yang dimiliki DIY. Jika dilihat dari struktur pendapatan alokasi dana pembangunan, PAD dalam struktur pendapatan asli DIY masih didominasi oleh PAD yang berasal dari jenis pajak kendaraan bermotor (PKB, BBNKB). Dengan demikian, pendapatan daerah yang bergantung pada sumber pajak kendaraan tersebut masih perlu dikembangkan lebih lanjut, khususnya pada pendapatan sektor lain di luar pajak kendaraan bermotor untuk memacu meingkatnya pendapatan asli daerah. Harapan terbesarnya adalah pendapatan asli daerah digunakan untuk memacu keadilan dan pemerataan pembangunan dalam mengatasi persoalan ketimpangan pembangunan wilayah yang menjadi persoalan utama di D.I Yogyakarta.

Mengacu pada tema utama Pokok-Pokok Pikiran DPRD tahun 2021, tema pembangunan yang diangkat sesuai dengan tema tahunan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD pada tahun ke empat. Tema pembangunan tahun 2021 adalah ***“Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) berbasis keistimewaan”.*** Tema tersebut memberikan arah dan tujuan pembangunan DIY kedepan harus menekankan tentang peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. Alasan ini dapat dipahami karena keterbatasan D.I Yogyakarta dalam kepemilikan sumber daya alam dalam memacu pendapatan asli daerah. Kemampuan DIY dalam meningkatkan PAD relative kecil karena tidak memiliki sumber daya alam seperti wilayah propinsi lain.

Keunggulan komparatif D.I Yogyakarta yang dimiliki adalah sumber daya manusia yang unggul dan terbukti menjadi faktor yang menentukan keunggulan daerah dalam pembangunan. Keunggulan sumber daya manusia DIY diharapkan tidak hanya tinggi secara kapasitas namun juga memiliki keunggulan secara budaya yang diterjemahkan sebagai memiliki karakter unggul sebagaimana filosofi manusia Djogja. Hal ini membutuhkan proses implentasi yang multidimensi oleh semua stakeholder yang ada. Kewenangan keistimewaan DIY dan dukungan dana Keistimewaan Yogyakarta harus menjadi faktor yang menentukan keunggulan pembangunan DIY untuk masa kini dan masa yang akan datang.

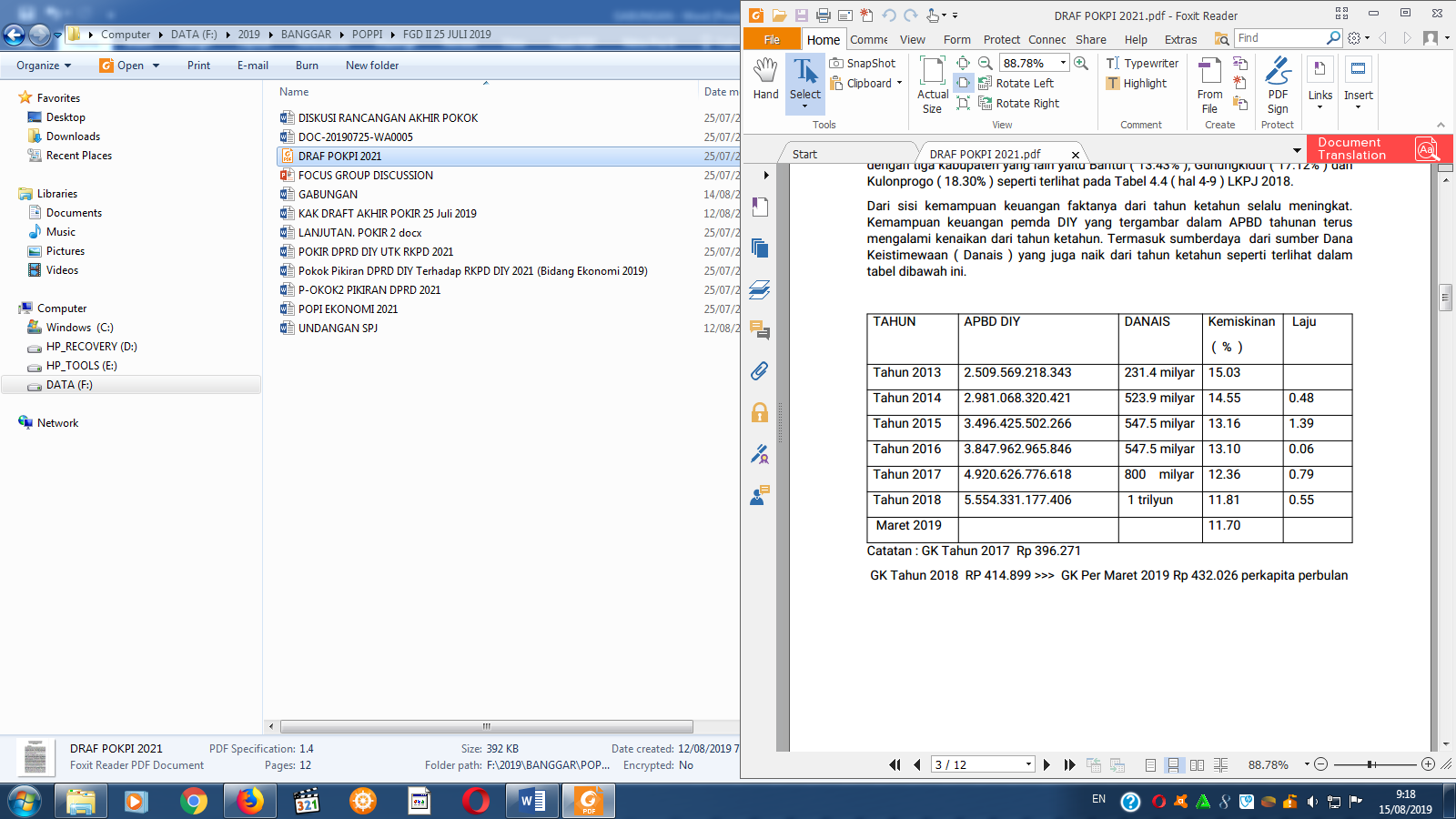
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sampai dengan tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY mencapai angka 79.53 yang merupakan peringkat kedua secara nasional. Jika dibandingkan dengan target yang dipatok pemda sebesar 80.29 % maka realisasinya adalah 99.13%. BPS juga melaporkan tentang capaian Umur Harapan Hidup (UHH) DIY tahun 2018 mencapai 74.82, naik dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 74,74 Tahun. Pertumbuhan ekonomi DIY di tahun 2018 mencapai rekor dengan angka pertumbuhan 6.2% lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh belanja sektor konstruksi dan penggalian antara lain adanya proyek bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) di Kulonprogo. Total APBD pemerintah DIY tahun 2018 sebesar 5.544 Milyar dan agregat Pemdase-DIY sebesar 15.42 trilyun. Namun demikian capaian positif diatas belum berkorelasi secara signifikan dengan beberapa indicator penting seperti; Angka Kemiskinan, Indeks Ketimpangan (Gini) dan Indeks Ketimpangan Wilayah (Williamson) yang sampai dengan tahun 2018 masih belum menunjukan capaian hasil seperti yang diharapkan.

Pertumbuhan ekonomi DIY ditahun 2018 perlu di syukuri. PDRB DIY juga terus mengalami kenaikan. Sektor konstruksi tumbuh 13,10% disusul oleh sektor penggalian sebesar 10,59%. Namun empat sektor menopang struktur PDRB DIY menunjukan pertumbuhan yang kecil. Industry pengolahan porsi strukturnya 12.99% tumbuh 5.12%, akomodasi dan makanan porsinya 10,22% tumbuh sebesar 6.77% dan pertanian yang porsinya menyumbang 9.78% hanya tumbuh 2.16%. Perdagangan dengan porsi 8.59% tumbuh sebesar 5.54%, sementara real estate dengan porsi 6.95% hanya tumbuh sebesar 5.54% dan jasa pendidikan dengan porsi 8.11% tumbuh 6.01%.

Melihat data tersebut yang perlu mendapatkan perhatian adalah sektor pertanian yang pertumbuhannya kecil (2.16%), sementara masih banyak warga DIY yang menggantungkan hidupnya dari sektor ini. Alih fungsi lahan pertanian masih terus berlangsung sementara implentasi perda tentang lahan pertanian abadi perlu terus didorong. Industri pengolahan yang merupakan penyumbang utama (12.99%) perlu perhatian. Dalam sektor ini banyak pelaku usaha mikro, kecil yang merupakan sektor dominan pelaku ekonomi DIY. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin penurunan angka kemiskinan.

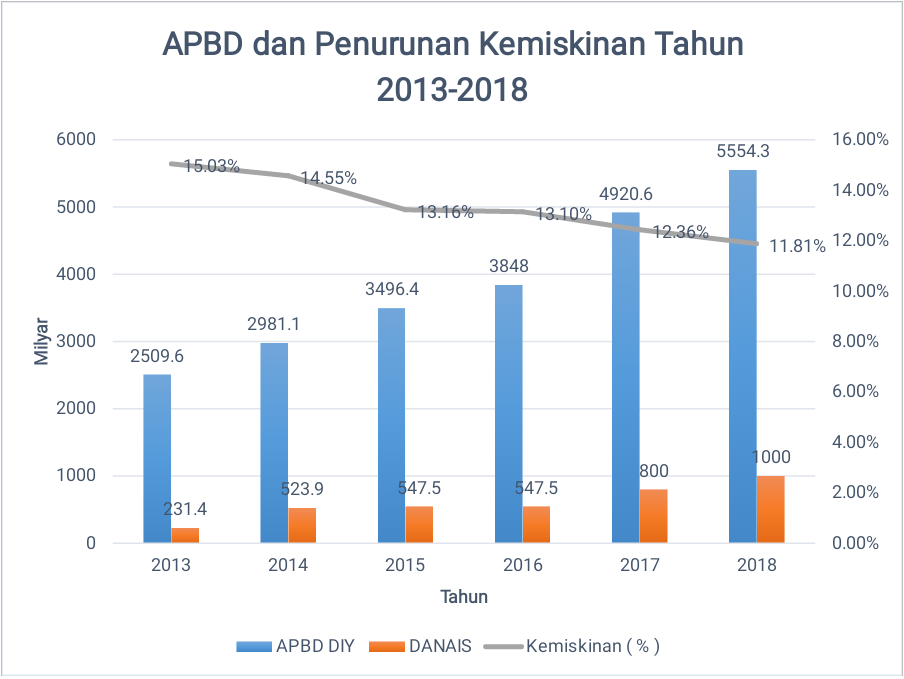
Jumlah penduduk miskin DIY per Maret 2019 sebanyak 448.470 atau 11,70% dari total penduduk DIY. Mengalami penurunan dibandingkan dengan September 2018 yang berjumlah 450,250. Atau terjadi penurunan sebanyak 1780 orang. Selain itu juga terjadi perubahan pada garis kemiskinan (GK), dimana per Maret 2019 sebesar Rp432.026 perkapita perbulan. Naik dibandingkan dengan September 2018 yang GK nya sebesar Rp 414.899 perkapita perbulan. Tahun 2018, angka kemiskinan sampai dengan September 2018 sebesar 11.81%, sementara target yang direncanakan sebesar 11.23% atau realisasi sebesar 94.83% dengan menggunakan standard Garis Kemiskinan (GK) per September adalah 414.899. Angka 11.81% tersebut ekivalen dengan jumlah penduduk miskin 450.250 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 16.080 orang. Dan jika menggunakan indicator jumlah penduduk miskin, target 2018 tercapai karena di patok target 484.947 jiwa. Realisasi jumlah penduduk miskin versus target adalah 107.7%.

Usaha Pemda DIY untuk mengurangi jumlah penduduk miskin perlu diapresiasi karena telah terjadi penurunan setiap tahun. Rata-rata penurunan kemiskinan selama Sept 2013 – Sept 2018 adalah sebesar 0.644%. Sebagai perbandingan angka kemiskinan nasional per September 2018 adalah 9.66%. Jika dibandingkan dengan propinsi lain di Jawa maka DIY termasuk yang paling tinggi. Jawa Tengah 11.81%, Jawa Timur 11.19%, Banten 10.85%, Jawa Barat 7.25% dan DKI sebesar 3.55%. JIka kita melihat angka kemiskinan per kabupaten/kota terlihat dengan jelas bahwa ada kesenjangan antara wilayah kota Jogja (6.98%) dan Kabupaten Sleman (7.65%) dengan tiga kabupaten yang lain yaitu Bantul (13.43%), Gunungkidul (17.12%) dan Kulonprogo (18.30%) seperti terlihat pada Tabel 4.4 (hal4-9) LKPJ 2018.

Dari sisi kemampuan keuangan faktanya dari tahun ketahun selalu meningkat. Kemampuan keuangan pemda DIY yang tergambar dalam APBD tahunan terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Termasuk sumberdaya dari sumber Dana Keistimewaan (Danais) yang juga naik dari tahun ketahun seperti terlihat dalam tabel dibawah ini.

**GK Tahun 2018 RP414.899 >>> GK Per Maret 2019 Rp432.026 perkapita perbulan**

Sejak berlakunya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang DIY, untuk mendukung kewenangan urusan keistimewaan DIY pemerintah memberikan Dana Alokasi Khusus (Danais) yang naik dari tahun ketahun. Terlihat bahwa kenaikan kemampuan keuangan pemda DIY hanya berdampak kecil terhadap laju penurunan angka kemiskinan. Kenaikan APBD dari tidak berkorelasi secara langsung dengan laju pengurangan kemiskinan. Sejak 2013 sampai 2018 laju penurunan kemiskinan tertinggi pada tahun 2015 yang mencapai angka 1.39%, dan laju terendah pada tahun 2016 yang sebesar 0.06% dalam satu tahun. Dan secara rata-rata dalam enam tahun terakhir laju penurunan kemiskinan sebesar 0.644% pertahun. Sementara target yang dipatok dalam RPJMD 2017–2022 adalah menjadi 7% ditahun 2022. Hal ini menuntut penyelenggara pemerintah DIY untuk melakukan evaluasi secara kritis untuk mengetahui penyebab jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi. Bahkan tertinggi dibandingkan dengan propinsi lainnya di Pulau Jawa. Hal ini agar target yang ditetapkan dalam RPJMD 2017- 2022 yakni mencapai angka kemisinan sebesar 7% dapat diwujudkan. Dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas dan ikhlas maka bukan hal yang mustahil angka 7% dapat dicapai diakhir periode Gubernur tahun 2022 yang akan datang.



Dari grafik di atas terlihat jelas bahwa angka kemiskinan DIY mengalami penurunan dari tahun ketahun. Akan tetapi, laju penurunan kemiskinan tidak sama dalam setiap tahun anggaran. Kemampuan keuangan daerah makin meningkat, akan tetapi belum diikuti dengan kecepatan laju penurunan kemiskinan yang signifikan dengan kenaikan anggaran pembangunan. Ada faktor- faktor diluar kemampuan keuangan daerah yang perlu diperhatikan. Ketepatan strategi, kebijakan, program, sasaran dan kegiatan serta pengendalian sangat penting mendapatkan perhatian dari penyelenggara pemerintahan DIY.

Reformasi kebijakan dan perbaikan tata pemerintahan perlu mendapatkan perhatian. Hal ini untuk mencapai kondisi ideal birokrasi pemerintahan yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal yang cepat. Era perkembangan tehnologi informasi menuntut birokrasi pemerintah dapat bekerja dengan efektif, efisien, responsive, inovatif, transparan dan akuntabel tanpa melanggar peraturan perundang-undangan. Pemerintah DIY selama ini sudah menunjukan kinerja yang sangat baik. Terbukti dengan banyaknya memperoleh penghargaan dari pemerintah. Selama ini banyak daerah lain, baik propinsi maupun kota/kabupaten yang belajar dari DIY. Dalam persoalan penanganan kemiskinan maupun ketimpangan wilayah dan pendapatan, DPRD percaya bahwa DIY tidak kekurangan ide, konsep maupun strategi dan kebijakan.Yang lebih dibutuhkan adalah eksekusi terhadap ide, gagasan, konsep dan strategi yang telah dipilih untuk menjawab persoalan tersebut. Untuk itu pemberdayaan ASN dalam penyesuaian birokrasi di era pengembangan tehnologi informasi perlu dilakukan. Oleh sebab itu peningkatan dukungan terhadap kebutuhan infrastruktur tehnologi untuk menunjang kecepatan layanan dan informasi adalah suatu keniscayaan.

Menurut BPS masih ditemukan adanya data yang tidak akurat dalam hal penduduk miskin. Sehingga diperlukan koreksi data. Berdasar survey yang diadakan oleh BPS, masih ada kelompok masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi yang membeli/menerima beras miskin (raskin), dan sebaliknya justru ada warga yang semestinya memperoleh beras miskin/ rastra tidak memperoleh haknya sebagaimana mestinya. Secara metodologi salah satu factor penting untuk mengukur angka kemiskinan adalah apa yang disebut Garis Kemiskinan (GK). Pada Maret 2019 angka GK DIY sebesar Rp 432,026 perkapita perbulan, naik dibandingkan September 2018 yang sebesar Rp 414.899, dan GK tahun 2017 yang berada pada angka 396.271. Jumlah anggota keluarga di DIY rata-rata adalah 4.22 jiwa. Dengan demikian sebagai suatu keluarga dikategorikan miskin adalah;

Rp 432,026 x 4.22 jiwa = Rp1.823.150

Porsi makanan sebesar (71.97%) senilai Rp310,947 ekivalen Rp10,365 perhari/organisasi

Apabila suatu keluarga jumlah pengeluaran kurang dari angka tersebut maka akan di kategorikan sebagai keluarga miskin. Dengan memahami secara metodologis BPS tersebut maka yang dapat di lakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dapat di tempuh dengan pendekatan antara lain memberikan akses pada sumber pendapatan baru pada warga yang masuk kategori miskin.

Menurut Prof. Bambang Hari Wibisono dari Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional ( PSPPR ) UGM, permasalahan pembangunan dalam RPJMD DIY 2017 – 2022 adalah aspek aksesibilitas jalan yang masih belum optimal untuk meningkatkan/mengembangkan wilayah selatan yang merupakan kawasan tertinggal. Selain itu akses penduduk terhadap layanan dasar belum mencapai 100%, juga masih terdapat penduduk yang bertempat tinggal dihunian tidak layak. Hal ini sejalan dengan isyu strategis RPJMD DIY 2017 – 2022 yakni; tingginya angka kemiskinan, tingginya ketimpangan wilayah dan penyediaan infrastruktur dasar di kawasan pesisir selatan belum optimal. Dan hal ini sudah menjadi misi pembangunan DIY 2017 – 2022 dengan tema: “Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan, Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban”. Untuk mencapai misi tersebut ada tiga hal yang akan dilakukan.

a. Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya akses infrastruktur dasar

b.Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, misalnya dari aspek pendidikan

c. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya local dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Tingginya angka kemiskinan di DIY menurut Prof Bambang Hari Wibisono, disebabkan oleh terbatasnya akses secara ekonomi, sosial, budaya, pembangunan, dan partisipasi dalam masyarakat. Hal ini meliputi terbatasnya akses layanan kesehatan, akses perekonomian dan akses pada cakupan layanan infrastruktur. Terbatasnya akses pada cakupan layanan infrastruktur seperti; belum optimalnya aksesibilitas wilayah, contoh sekitar 20% kondisi jalan di DIY bagian selatan belum mantab. Kurangnya ketersediaan sarana prasarana lingkungan permukiman, seperti masih terdapat wilayah kumuh, rumah tidak layak huni masih 0,54%, akses air minum layak 80,52% dan akses sanitasi layak baru mencapai 88,91%. Cakupan layanan listrik yang masih belum merata, angka elektrikasi baru 96.3%. Jaringan komunikasi yang masih belum menjangkau seluruh wilayah karena masih banyak area yang blankspot. Layanan transportasi angkatan umum (public) kurang berkembang ditandai dengan trayek angkutan umum terbatas dan kondisi angkutan umum yang tidak layak.

Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD tahun 2021 mempunyai 4 bidang atau sektor sesuai dengan komisi yang ada di DPRD D.I Yogyakarta. Berbagai tema permasalahan pembangunan di D.I Yogyakarta dikatagorikan dalam bidang pemerintahan, bidang ekonomi, bidang infrastruktur pembangunan, dan bidang kesejahteraan sosial. Sesuai dengan bidang tersebut, maka pokok permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut.

### **2.3.1. Bidang Pemerintahan**

Persoalan kebijakan pembangunan di D.I Yogyakarta masih fokus pada persoalan angka kemiskinan, kesenjangan pendapatan (rasio Gini) dan kesenjangan infrastruktur pembangunan wilayah. Ketiga isu kebijakan pembangunan tersebut selalu mencuat dan menjadi tema utama dalam pembahasan kebijakan publik, khususnya ekonomi pembangunan. Di bidang pemerintahan, tema-tema utama kebijakan juga dipusatkan dalam mendorong terselesaikannya ketiga tema persoalan tersebut, meskipun bidang pemerintahan juga mempunyai banyak persoalan yang terkait dengan isu sosial dan politik nasional.

Beberapa persoalan terkait dengan pemerintahan untuk tahun 2021 tentu harus disesuaikan dengan tema pembangunan tahun tersebut. Pemerintah daerah D.I Yogyakarta teah menetapkan tema pembangunan tahun 2021 adalah: Peningkatan kualitas SDM berbasis keistimewaan yang sesuai dengan visi RPJMD pembangunan D.I Yogyakarta Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Peningkatan SDM berbasis Keistimewaan Yogyakarta tentu harus terkait dengan perkembangan jaman, khususnya di era teknologi informasi yang menunjang sektor pemerintahan.

Pada era revolusi industri 4.0 dengan teknologi informasi yang telah mengubah corak kebudayaan manusia, diantaranya adalah manifestasi teknologi dalam bidang pemerintahan dengan konteks kebutuhan percepatan layanan. Tuntutan jaman dalam era “Internet Things” menuntut pemerintah daerah untuk segera berinvestasi dalam bidang teknologi dengan tujuan good governace segera terwujud.

Tema Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja mempunyai makna menjadikan manusia Jogja yang berkualitas dan mempunyai kesejahteraan bertaraf minimal cukup, dan baik dalam segala bidang. Tentu saja hal ini berkaitan dengan pencapaian pembangunan seutuhnya di D.I Yogyakarta. Kemajuan pembangunan infrastruktur fisik, khususnya pengembangan kawasan selatan-selatan Yogyakarta yang sudah dimulai menuntut sektor pemerintahan mengkutinya dengan penerapan berbagai macam teknologi informasi di dalamnya.

Kebijakan Pemerintah Daerah DIY dalam mendorong *good governance* dinilai masih perlu ditingkatkan. Prinsip tranformasi kebijakan publik, khususnya dalam aksesibilitas *stakeholders*, pemerhati kebijakan, maupun masyarakat masih perlu diperbaiki. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat kemajuan pengelolaan kebijakan publik perlu dilakukan dengan prinsip *sharing* informasi, *sharing* data,dan *sharing* kebijakan. Kemajuan teknologi informasi diyakini mampu mendorong perbaikan tata pemerintahan dimaksud.

Pemberdayaan aparatur pemerintah menjadi penting diperhatikan dengan tujuan aparatur mampu mengimplementasikan kebijakan publik dan tepat sasaran. Kendala sumberdaya aparatur harus segera diatasi dengan cara investasi pendidikan, pelatihan, maupun investasi perangkat informasi dalam bentuk program dan kegiatan yang mendukung kecepatan layanan publik dan partisipasi publik dalam kebijakan daerah.

Adapun permasalahan per urusan pada bidang pemerintahan dapat disampaikan sebagai berikut,

#### **2.3.3.1. Urusan Ketertiban, Ketentraman umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Pasca pemilihan legislatif dan presiden menyisakan berbagai gejolak sosial di masyarakat yang tak kunjung terselesaikan. Berbagai perpecahan sosial telah terjadi karena perbedaan dukungan dan pilihan. Masyarakat tidak saja terpecah belah karena dukungan dalam pemilu legislatif ataupun presiden, akan tetapi masyarakat sudah terpolarisasi dan terdeferensiasi dalam berbagai bentuk ideologi tertentu yang mempunyai potensi untuk tetap memicu adanya konflik-konflik sosial.

Data, fakta dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa pasca pemilu tetap mempunyai potensi konflik tinggi. Perdebatan dalam media sosial dan dalam kerumunan masyarakat menunjukkan bahwa situasi sosial masih tetap memanas meskipun pemilu usai di laksanakan. Situasi ini membutuhkan intervensi pemerintah daerah D.I Yogyakarta untuk pencegahan terjadinya konflik sosial.

Persoalan sosial lain yang muncul adalah masyarakat mulai beradaptasi dengan berbagai teknologi informasi dengan kecenderungan gaya hidup individual. Sikap individual, menurunnya relasi sosial, dan apatis masyarakat terhadap jalannya pemerintahan dan lingkungan sosial masyarakat menjadi tumbuh subur, khususnya generasi muda. Generasi anak-anak, remaja dan generasi muda terindikasi tumbuh lebih baik dan cerdas karena dukungan teknologi, akan tetapi mereka mulai kehilangan “etika sosial” dalam bermasyarakat. Persoalan ini bisa memicu kenakalan remaja yang tak terkendalikan jika terjadi pembiaran lebih lanjut.

Persoalan ketertiban, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat menjadi populer karena penegakan perda dan perkada masih belum maksimal. Kesadaran warga masyarakat juga masih kurang untuk mentaatinya. Keresahan masyarakat terhadap kenakalan remaja atau “klithih” msaih juga dirasakan meskipun jauh berkurang.

##### SUB URUSAN KEBENCANAAN

Potensi bencana alam lokal di D.I Yogyakarta tetap menjadi ancaman tersendiri. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi Gunung Merapi, dan kekeringan tetap menjadi agenda sepanjang tahun oleh pemerintah daerah D.I Yogyakarta. Meskipun potensi kebencanaan sering terjadi, pemerintah daerah D.I Yogyakarta bersama komunitas masyarakat dan kewargaan telah mampu menanganinya dengan baik. Hal ini terbukti dari kecepatan penanganan bencana alam lokal yang sering terjadi di D.I Yogyakarta.

#### **2.3.3.2. Urusan Komunikasi dan Informatika: Adaptasi Teknologi Informasi Dalam Bidang Pemerintahan**

Perkembangan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan cukup maju pesat. Penggunaan teknologi informasi dalam era REVOLUSI INDUSTRI 4.0 di belahan dunia sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Akses Informasi tidak saja menjadi gaya hidup, akan tetapi telah menjadi kebutuhan masyarakat karena pengetahuan internet telah mengubah pola pikir manusia.

Kecepatan layanan pemerintah menjadi penting dalam konteks tersebut dengan investasi teknologi informasi. Pemerintah daerah D.I Yogyakarta telah melakukan investasi teknologi, bahkan pernah menjadi “pelari terdepan” dalam penggunaan informasi teknologi untuk layanan masyarakat maupun layanan informasi.

Penggunaan informasi teknologi tentu berkaitan dengan pola investasi pemerintah daerah untuk terus berkembang dalam pemberian layanan. D.I Yogyakarta masih dirasa kurang berinvestasi dalam teknologi informasi untuk kecepatan layanan ataupun dalam pemberian aksesbilitas bagi warga atau stakeholders dalam mengawal kebijakan daerah.

#### **2.3.3.3. Bidang Pemerintahan: Akuntabilitas Publik**

D.I Yogyakarta mempunyai prestasi yang baik dalam bidang pemerintahan. Perolehan WTP sepanjang tahun menunjukkan bahwa administrasi bidang pemerintahan menunjukkan bahwa prestasi yang diraih membanggakan.

Beberapa yang masih kurang dalam bidang pemerintahan adalah kualitas tata kelola pemerintahan seperti pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah dan meratanya layanan publik oleh aparatur daerah, khususnya Organisasi Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan,maka perlu optimalisasi terhadap beberapa hal seperti

1. pengelolaan keuangan daerah
2. Kontribusi aset-aset daerah dalam peningkatan Pendapatan Daerah dan
3. Peningkatan kualitas layanan public secara merata pada Organisasi Perangkat Daerah.

Layanan pemerintahan desa di D.I Yogyakarta juga perlu mendapat sorotan, dimana pemerintah desa bisa dijadikan ujung tombak layanan. Kelemahan pemerintah desa banyak dibidang layanan masyarakat yang masih lamban. Di sisi lain, pemerintah desa juga masih kurang dalam investasi teknologi informasi untuk memperkuat dan mempercepat layanan pada warga.

#### **2.3.3.4. Urusan Pertanahan Dan Tata Ruang**

Kebijakan perluasan tata ruang dan wilayah pembangunan di D.I Yogyakarta, khususnya kawasan selatan-selatan sedang dilakukan. Berbagai perencanaan pembangunan wilayah untuk mendorong keadilan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan ekonmi dilakukan.

Pembangunan bandara internasional NYIA tentu berdampak pada kemajuan infrastruktur pembangunan daerah dengan perubahan-perubahan kawasan ekonomi yang dilakukan terkait investasi daerah. Peruntukan kawasan pembangunan tersebut membutuhkan perubahan kebijakan kawasan, khususnya peralihan lahan dan peruntukan untuk tata ruangnya.

Persoalan yang muncul adalah perubahan kawasan tersebut bisa saja berpengaruh pada perubahan peruntukan kawasan, khususnya perubahan lahan produktif untuk ketahanan pangan dan area konservasi untuk peruntukan lainnya.

Kawasan ketahanan pangan bisa tergangu jika tidak ada konsep perlindungan dan konservasi di dalamnya.

#### **2.3.3.5 Kewenangan Keistimewaan Yogyakarta**

Urusan Keistimewaan Yogyakarta menjadi penting karena menjadi amanat UU No 13 Tahun 2012, dimana masih banyak regulasi yang belum terselesaikan untuk mempercepat program-program Keistimewaan Yogyakarta atau otonomi khusus sehingga masih menyisakan beberapa persoalan kebijakan yang mendukung terlaksananya program-program Keistimewaan Yogyakarta.

Persoalan lain yang muncul adalah kritik warga terhadap jalannya program dan kegatan dalam koridor Keistimewaan Yogyakarta. Warga banyak menilai bahwa program dan kegiatan masih belum tepat sasaran, dimana konstruksi program dan kegiatan Keistimewaan Yogyakarta masih banyak pada infrastruktur kebudayaan dibandingkan dengan pembangunan nilai-nilai Keistimewaan Yogyakarta. Sisi lain yang diwacanakan adalah salah satu tujuan Keistimewaan Yogyakarta dalam meningkatkan derajat kesejahteraan warga.

Proses penyusunan program dan kegiatan Keistimewaan Yogyakarta masih belum maksimal, dimana bentuk perencanaan program dan kegiatan perlu didukung oleh banyak pihak dan sumberdaya aparatur yang menguasai bidang Keistimewaan Yogyakarta.

### **2.3.2. Bidang Ekonomi**

Menurut data BPS DIY (Feb, 2019), Jumlah penduduk miskin DIY pada September 2018 di D.I. Yogyakarta sebanyak 450,25 ribu orang atau 11,81 persen terhadap total penduduknya. Garis kemiskinan di Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta pada September 2018 sebesar Rp 414.899 per kapita per bulan. Dalam satu semester terakhir, garis kemiskinan meningkat 1,26 persen dari kondisi Maret 2018 yang besarnya Rp 409.744 per kapita per bulan. Komoditi makanan masih mendominasi pembentukan Garis Kemiskinan dibandingkan dengan komoditi bukan makanan. Pada Maret 2018, Garis Kemiskinan Makanan tercatat sebesar Rp 296.077 per kapita per bulan dan kontribusinya terhadap Garis Kemiskinan sebesar 71,36 persen. Sementara pada saat yang sama, Garis Kemiskinan Non Makanan sebesar Rp 118.822 per kapita per bulan dan berkontribusi sebesar 28,62 persen terhadap Garis Kemiskinan.Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada periode September 2018 menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan Maret 2018. Demikian juga halnya dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang mengindikasikan semakin homogennya pengeluaran penduduk miskin. Sebaran penduduk miskin paling banyak di kawasan pedesaan. Oleh karena itu, Pemerintah DaerahDIY perlu mendorong sektor-sektor ekonomi untuk bisa tumbuh dan berkembang di kawasan pedesaan.

Berkenaan dengan angka kemiskinan dan keterkaitannya dengan pangan dan pertanian dapat tersebut dikemukakan permasalahan bidang ekonomi sebagai berikut:

#### **Urusan Pangan**

1. Belum ada upaya pemerataan pemanfaatan hasil produksi pangan pada musim panen dan paceklik
2. Ketergantungan masyarakat dalam konsumsi beras masih tinggi
3. Masih terdapat 7 desa rawan pangan (sama dengan 2016), yang disebabkan oleh rendahnya aksesibilitas, terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan pangan karena akibat kemiskinan masyarakat
4. Rendahnya pengawasan pangan yang beredar
5. Minimnya jumlah penyuluh pertanian
6. Belum sinergisnya peran lintas sektor dalam pembangunan ketahanan pangan

Untuk menjadi perhatian bersama, tujuan utama pembangunan ketahanan pangan di DIY adalah untuk mencukupi kebutuhan pangan sampai tingkat individu dengan mengoptimalkan sumber daya lokal. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang semakin tinggi menunjukkan kualitas konsumsi yang semakin baik, yang berdampak positif pula pada kesehatan dan peningkatan kualitas SDM

#### **Urusan Pertanian**

* + - 1. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air
      2. Kecilnya status dan luas kepemilikan lahan
      3. Tingginya alih fungsi lahan
      4. Belum optimalnya sistem perbenihan dan pembibitan
      5. Terbatasnya akses petani terhadap permodalan
      6. Belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik
      7. Rendahnya NTP akibat rendahnya daya saing produk pertanian
      8. Minat generasi muda untuk bekerja di bidang usaha pertanian semakin menurun
      9. Populasi ternak mengalami penurunan, terutama pada komoditas strategis

#### **2.3.2.3. Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi**

Masih minimnya tenaga kerja Handal;

Terbatasnya Lapangan Kerja Padat Karya;

Masih Tingginya Pengangguran Terdidik dan Angkatan kerja produktif;

Masih terbatas TKI merebut Pasaran kerja Luar;

Stagnasi Pembukaan Daerah transmigrasi Baru yang Produktif;

Masih terbatas, ketahanan ekonomi keluarga, melalui program transmigrasi

Pada bidang perekonomian perlu juga menjadi perhatian terkait urusan pilihan Kehutanan dengan permasalahan sebagai berikut:

#### **Urusan Kehutanan**

1. Masih terdapat lahan kritis di kawasan hutan
2. Hasil hutan produksi yang dikelola KPH Yogyakarta masih belum optimal
3. Masih terjadi kerusakan hutan akibat bencana alam, kebakaran hutan dan pembalakan liar
4. Belum tersedianya data potensi untuk pengembangan hutan rakyat
5. Potensi kerusakan hutan akibat dari banyaknya tingkat kunjungan wisata di sekitar hutan

#### **2.3.2.4. Urusan Kelautan dan Perikanan**

1. Masih rendahnya budaya bahari pada masyarakat DIY
2. Pelabuhan Tanjung Adikarto dibutuhkan sebagai klaster pertumbuhan ekonomi
3. Keterbatasan SDM Kelautan dan Perikanan
4. Biaya operasional nelayan (BBM dan sarana pendingin es) cukup tinggi untuk distribusi hasil tangkapan yang terbatas dan dalam skala kecil
5. Penyediaan kebutuhan ikan di DIY masih bergantung pada pasokan dari luar
6. Konsumsi ikan masyarakat DIY relatif kecil dibandingkan dengan tingkat nasional

#### **2.3.2.5. Urusan Pariwisata**

Sektor pariwisata yang menjadi andalan DIY tumbuh subur. Target jumlah wisatawan yang masuk ke DIY perlu dikoreksi karena pertumbuhan wisatawan yang cepat. Pemerintah daerah perlu mendorong gerakan inovasi wisata desa ataupun wisata yang memanfaatkan sumberdaya alam seperti wisata hutan untuk mendongkrak pendapatan masyarakat pedesaan atau masyarakat sekitar hutan. Mendorong hutan dan sumberdaya alam lainnnya untuk mendapatkan hasil dari jasa nonhutan sangat penting, bahkan pendapatan masyarakat sekitar hutan lebih tinggi dari sektor jasa wisata dibanding dengan hasil hutan itu sendiri.

Sektor ekonomi lain yang dikeluhkan adalah minimnya angka upah buruh di Yogyakarta dan investasi sektor formal. Minimnya upah buruh (UMR/UMK) mempengaruhi tingkat pendapatan buruh. Perlu perhatian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor perburuhan. Di sisi lain, Pemerintah Daerah juga harus mengatasi tingkat pengangguran terbuka yang tinggi di DIY. Pemerintah Daerah perlu membangun kawasan-kawasan ekonomi diluar wilayah kota dan perbatasan kota.

### ***2.3.3.* *Bidang Pembangunan***

Kesenjangan ekonomi masyarakat pedesaan lebih tinggi dikarenakan ketidakmerataan pembangunan infrastruktur antara kota dan desa. Pembangunan infrastruktur pedesaan perlu segera dilakukan untuk membuka aksesibilitas ekonomi masyarakat desa. Kesenjangan pembangunan menjadi persoalan utama dengan tujuan membuka jalur-jalur ekonomi masyarakat desa untuk segera bangkit dan berbenah.

Dalam program perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan kawasan-kawasan pedesaan, khususnya kawasan yang berbatasan dengan propinsi Jawa Tengah. Kondisi masyarakat perbatasan yang minim pembangunan infrastruktur mestinya mendapat perhatian lebih dengan tujuan untuk memudahkan aksesibilitas ekonomi untuk perkembangannya. Selama ini fasilitas jalankhususnya jalan desabanyak yang sudah rusak dan butuh perhatian.

Upaya penanggulangan kemiskinan baik melalui jalur pembangunan sektoral, regional, maupun yang khusus masing-masing mengandung lima pokok perhatian, yaitu pengembangan kualitas manusianya, pengembangan sumberdaya sosial ekonomi, pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan sosial ekonomi, penguatan kelembagaan pembangunan, dan penguatan dukungan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Program pembangunan yang memberikan penekanan pada pendekatan pemberdayaan masyarakat memiliki dimensi (ruang masalah) dan matranya (cakupan kewilayahan) sendiri, antara lain mencakup:

1) Program penanggulangan kemiskinan. Dimensinya adalah masalah pengurangan penduduk miskin kronis, dan matranya adalah kawasan/daerah seperti daerah kumuh perkotaan, daerah pantai, daerah pedalaman, dan desa tertinggal; dan

2) Program jaring pengaman sosial. Dimensinya adalah masalah pengurangan penduduk miskin akibat krisis atau penduduk dengan kemiskinan yang parah, dan matranya adalah kawasan/wilayah daerah seperti daerah kumuh perkotaan, daerah pantai, daerah pedalaman, dan desa tertinggal.

Berkenaan dengan bidang Pembangunan perlu menjadi perhatian masalah berdasarkan urusan sebagai berikut,

#### **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

1. Adanya ketidakseimbangan aksesibilitas wilayah wilayah perbatasan terutama perbatasan antara DIY Dengan Jawatengah di Kabupaten Gunungkidul Dengan kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten serta Kabupaten Sukoharjo yang pada umumnya kondisi jalan dalam keadaan rusak sedang sampai berat, oleh sebab itu perlu perhatian khusus akan kondisi tersebut walaupun status jalan kebanyakan merupakan jalan kabupaten.

2. Aksesibilitas penduduk terhadap ketersediaan air minum yang cukup dirasa masih jauh dari mencukupi. fakta menunjukkan bahwa banyak daerah daerah yang masih saja mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan air bersih sebagai sarana kehidupan dasar,

3. Belum sepenuhnya masyarakat perkotaan maupun pelosok pedesaan yang katagori miskin mendapatkan akses secara penuh terhadap kebutuhan akan air minum yang layak, karena keterbatasan kesediaan air baku baru untuk mendukung PDAM ataupun SPAMDES

4. Pengendalian , pengawasan serta penertiban pemanfaatan bagian- bagian jalan provinsi belum secara optimal.

5. Belum terpenuhinya target untuk penambahan secara kwantitatif maupun kwalitatif terhadap produk air baku baru, hal ini terkendala masalah kewenangan.

6. Di bidang Jasa Kontruksi masih adanya mutu dan kwalitas kontruksi yang sesuai standart, karena pembinaan yang selama ini dilakukan hanya dilaksanakan oleh Dinas PU ESDM dan belum menjadi tanggung jawab semua pihak.

7. Dalam urusan tata ruang belum tersedianya rencana detail tata ruang (RDTR) serta peraturan Zonasi(PZ) sebagai acuan untuk perijinan serta belum ditetapkanya instrumen untuk pengendalian.

8. Banyaknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang harus digunakan sebagai pedoman atau landasan yuridis, jelas akan menimbulkan ketidak seimbangan baik itu lingkungan sosial, ekonomi maupun nilai nilai kultur dan lain lain. Proses alih fungsi lahan untuk kepentingan hunian atau industri yang terjadi secara masif perlu segera di hentikan kalau tidak ingin terjadi gradasi terhadap kwalitas lingkungan

9. Konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi agro ekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani serta turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak baginya. Hal ini akan menyebabkan rawan pangan bagi daerah, cepat atau lambat, akibat semakin terkikisnya lahan pertanian.

#### **Urusan Perumahan**

Sesuai Perda DIY Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah TAHUN 2012–2017, sasaran pembangunan urusan bidang perumahan adalah menurunnya perumahan dan lingkungan yang tidak layak huni yang kinerjanya diukur menggunakan indikator persentase rumah tidak layak huni. Pengurangan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) dilakukan melalui fasilitasi perbaikan kualitas rumah yang diwujudkan dengan bantuan stimulan bahan bangunan kepada masyarakat. Hasil identifikasi awal pada tahun 2012 jumlah rumah yang tergolong rumah tidak layak huni (RTLH) sejumlah 91.200 unit. Hingga tahun 2015 jumlah RTLH yang tersebar di DIY sejumlah 74.491 unit atau setara dengan 7,17%. Dan target sampai dengan 2017 sebesar 6,75%.. Adapun permasalahan pada Urusan Perumahan di DIY adalah, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah kabupaten dan kota dengan pemerintah daerah Provinsi dalam penanggulangan dan pengembangan wilayah yang berkenaan dengan kawasan kumuh serta kondisi rumah rumah yang tidak layak huni.

#### **Urusan Perhubungan**

Kemacetan . Faktor-foktor penyebab kemacetan lalu lintas antara lain: tidak seimbangnya luas atau kapasitas jalan dengan jumlah kendaraan bermotor, ledakan penduduk, peningkatan penggunaan kendaraan pribadi, rendahnya kualitas angkutan umum, kurangnya disiplin dari para pengguna jalan serta kurangnya penanganan dari pemerintah.

Terjadinya polusi udara akibat asap kendaraan bermotor yang sudah tidak laik jalan, terutama angkutan umum yang tidak melakukan uji emisi secara berkala.

Sering terjadinya kecelakaan bagi pengguna kendaraan bermotor disebabkan kurangnya sarana dan prasarana perhubungan.

Perlunya penambahan rute layanan angkutan orang berjalan, khususnya area luar kota yang menghubungkan antar kecamatan dalam skala prioritas

#### **Urusan Lingkungan Hidup**

pembangunan di bidang industri apabila tidak diikuti dengan AMDAL yang bisa dipertanggungjawabkan tentu akan semakin meningkatkan jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia.

kelemahan sistem peraturan perundangan dan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan.

#### **2.3.3.5. Urusan Perencanaan Pembangunan**

1. Minimnya sosialisasi rencana penyusunan RKPD kepada masyarakat.
2. Masyarakat menjadi apatis dan enggan terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan daerah karena usulan masyarakat seringkali tidak bisa direalisasikan akibat terjadinya pemotongan/pemangkasan berbagai usulan yang masuk
3. Terjadi perubahan/tambahan kegiatan yang sebelumnya tidak masuk dalam usulan SKPD.
4. Tidak ada koordinasi dan sinkronisasi antara program yang dibiayai dana community development dari perusahaan dengan program yang dibiayai APBD.

Sistem perencanaan (E-Planning) belum mengakomodir usulan yang sifatnya politis (dari DPRD

### **Bidang Kesejahteraan Rakyat**

Untuk menyusun pokok-pokok pikiran DPRD untuk RKPD 2021, basis data yang digunakan merupakan capaian kinerja pemerintah DIY sampai dengan tahun 2018 serta dibandingkan dengan target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2017-2022. Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) DIY yang mencapai angka 79.59 dari target 80.29 ( relaisasi 99.13% ). Selain itu pertumbuhan ekonomi DIY di tahun 2018 mencapai rekor dengan angka pertumbuhan 6.2% lebih tinggi dibandikan angka nasional. Total APBD DIY tahun 2018 sebesar 5.544 Milyar dan agregat se-DIY sebesar 15.424 Milyar. Namun ada beberapa indicator penting yang setiap tahun menjadi catatan dan rekomendasi DPRD yakni Angka Kemiskinan, Indeks Ketimpangan ( Gini ) dan Indeks Ketimpangan Wilayah ( Williamson ) yang masih membutuhkan perhatian lebih.

Tahun 2018, angka kemiskinan sampai dengan September 2018 sebesar 11.81% dari target yang direncanakan sebesar 11.23% ( realisasi 94.83% ). Garis Kemiskinan ( GK ) per September adalah 414.899. Angka 11.81% tersebut ekivalen dengan jumlah penduduk miskin 450.250 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 16.080 orang. Dan jika menggunakan indicator jumlah penduduk miskin, target 2018 tercapai karena di patok target 484.947 jiwa. Realisasi jumlah penduduk miskin versus target adalah 107.7%. Dengan demikian maka laju rata-rata penurunan kemiskinan selama Sept 2013 – Sept 2018 adalah sebesar 0.644%.

Sebagai perbandingan angka kemiskinan nasional per September 2018 adalah 9.66%. jika dibandingkan dengan propinsi lain di Jawa maka DIY termasuk yang paling tinggi. Jawa Tengah 11.81%, Jawa Timur 11.19%, Banten 10.85%, Jawa Barat 7.25% dan DKI sebesar 3.55%. JIka kita melihat angka kemiskinan per kabupaten/kota terlihat dengan jelas bahwa ada kesenjangan antara wilayah kota Jogja ( 6.98%) dan Kabupaten Sleman ( 7.65% ) dengan tiga kabupaten yang lain yaitu Bantul ( 13.43% ), Gunungkidul ( 17.12% ) dan Kulonprogo ( 18.30% ) seperti terlihat pada Tabel 4.4 ( hal 4-9 ) LKPJ 2018.

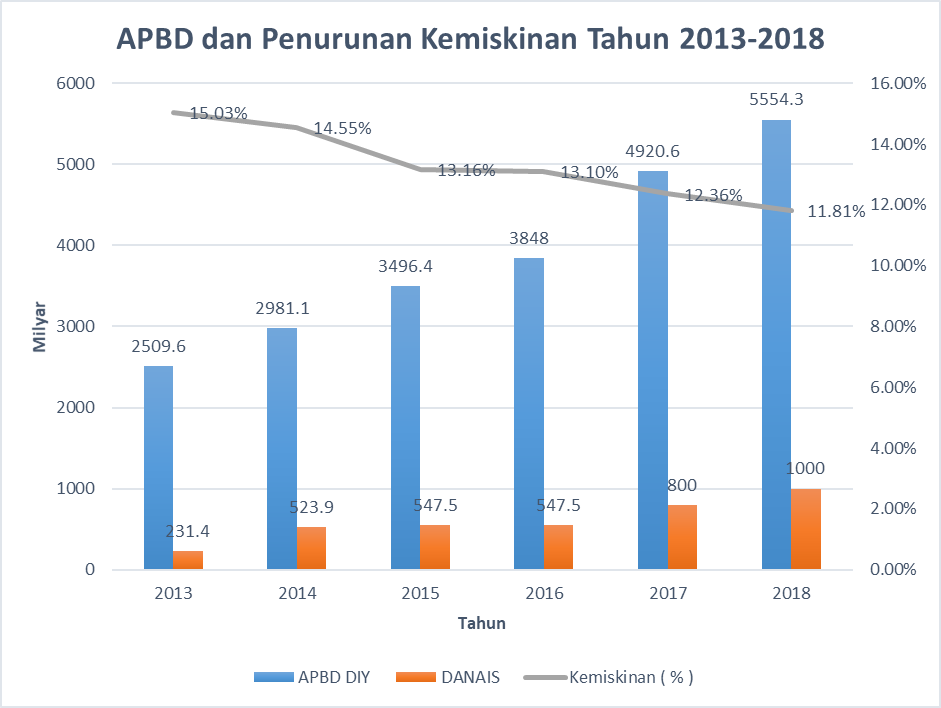
Dari sisi kemampuan keuangan faktanya dari tahun ketahun selalu meningkat. Kemampuan keuangan pemda DIY terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Demikian juga anggaran dari sumber Dana Keistimewaan ( Danais ) yang juga naik dari tahun ketahun.

Tabel 15 Perbandingan APBD DIY, Danais dan Angka Kemiskinan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TAHUN** | **APBD DIY** | **DANAIS** | **Kemiskinan**  **( % )** | **Laju Penurunan** |
| 2013 | 2.509.569.218.343 | 231.4 milyar | 15.03 |  |
| 2014 | 2.981.068.320.421 | 523.9 milyar | 14.55 | 0.48 |
| 2015 | 3.496.425.502.266 | 547.5 milyar | 13.16 | 1.39 |
| 2016 | 3.847.962.965.846 | 547.5 milyar | 13.10 | 0.06 |
| 2017 | 4.920.626.776.618 | 800 milyar | 12.36 | 0.79 |
| 2018 | 5.554.331.177.406 | 1 trilyun | 11.81 | 0.55 |
| 2022 | ( berdasar RPJMD ) |  | 7 |  |

Catatan: GK Tahun 2017 Rp 396.271; GK Tahun 2018 RP 414.899

Sejak berlakunya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang DIY, untuk mendukung kewenangan urusan keistimewaan DIY pemerintah memberikan Dana Alokasi Khusus ( Danais ) yang naik dari tahun ketahun. Terlihat bahwa kenaikan kemampuan keuangan pemda DIY hanya berdampak kecil terhadap laju penurunan angka kemiskinan. Kenaikan APBD dari tidak berkorelasi secara langsung dengan laju pengurangan kemiskinan. Sejak 2013 sampai 2018 laju penurunan kemiskinan tertinngi pada tahun 2015 yang mencapai angka 1.39%, dan laju terendah pada tahun 2016 yang sebesar 0.06% dalam satu tahun. Dan secara rata-rata dalam enam tahun terakhir laju penurunan kemiskinan sebesar 0.644% pertahun. Sementara target yang di patok dalam RPJMD 2017 – 2022 adalah menjadi 7 % di tahun 2022. Berat namun harus optimis. Dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas dan ikhlas maka bukan hal yang mustahil angka 7% dapat di capai di akhir periode Gubernur tahun 2022 yang akan datang.



Gambar 12 APBD dan Penurunan Kemiskinan

Dari grafik di atas terlihat bahwa angka kemiskinan DIY mengalami penurunan dari tahun ketahun. Namun laju penurunan kemiskinan tidak sama dalam setiap tahun anggaran. Kemampuan keuangan daerah yang makin besar tidak serta merta di ukuti dengan kecepatan laju penurunan kemiskinan yang sama. Ada factor-faktor diluar kemampuan keuangan daerah yang perlu di perhatikan. Ketepatan startegi, kebijakan, program, sasaran dan kegiatan serta pengendalian sangat penting mendapatkan perhatian dari penyelenggara pemerintahan DIY.

Menurut BPS ditemukan adanya data yang tidak akurat dalam hal data penduduk miskin. Sehingga diperlukan koreksi data. Secara metodologi salah satu factor penting untuk mengukur angka kemiskinan adalah apa yang disebut Garis Kemiskinan ( GK ). Pada tahun 2018 angka GK DIY sebesar 414.899, naik jika dibandingkan dengan GK tahun 2017 yang berada pada angka 396.271. Jumlah anggota keluarga di DIY rata-rata adalah 4.22 jiwa. Dengan demikian sebagai suatu keluarga dikategorikan miskin adalah;

414. 899 x 4.22 jiwa = 1.750.874

Porsi terbesar untuk konsumsi ( 71.36%)

Apabila suatu keluarga jumlah pengeluaran kurang dari angka tersebut maka akan di kategorikan sebagai keluarga miskin. Dengan memahami secara metodologis BPS tersebut maka yang dapat di lakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dapat di tempuh dengan pendekatan sebagai berikut.

#### **2.3.4.1. Urusan Pendidikan**

Seberapa besar pengaruh pendidikan terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY? Menurut pakar peraih hadiah nobel Jeffry Sach yang mengatakan “**orang bodoh karena miskin, dan orang miskin karena bodoh”** ( *poverty trap* ). Untuk memutus jebakan tersebut maka pendidikan harus di lakukan dan di intervensi oleh pemerintah. Jumlah penduduk DIY berdasar BPS tahun 2019 berjumlah 3.818. 266. Dari jumlah tersebut jumlah, yang masih berada pada usia sekolah ( 7-18 tahun ) ada sebanyak 17,54% atau sejumlah 669.723 anak dan 89,64% ( 600.340 anak ) penduduk usia sekolah masih tercatat sebagai peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, menengah maupun khusus. Sementara yang 10,36% penduduk usia sekolah tersebut tidak ada keterangan. Masih ada 69.383 anak yang belum diketahui status pendidikannya.

Salah satu parameter untuk melihat kinerja urusan pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Capaian pemerintah DIY untuk parameter ini adalah 9.24 tahun ( 2017 ) naik dari 9.10 tahun ( 2016 ). Namun untuk LKPJ 2018 ini capaian rata-rata lama sekolah tidak lagi disampaikan. Demikian juga untuk parameter angka melek huruf yang pernah mencapai angka 94.64 pada tahun 2017. LKPJ 2018 menyampaikan capaian indicator kinerja program pemda yaitu Harapan Lama Sekolah, yang di definisikan sebagai lamanya sekolah ( dalam tahun ) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angkanya adalah 15.55 yang merupakan angka proyeksi ( menunggu publikasi data resmi BPS ) dengan mempertimbangkan tren capaian 2014-2018. Mengapa parameter rata-rata lama sekolah untuk 2018 tidak disampaikan. Demikian juga untuk angka melek huruf.

Jika dilihat dari parameter Angka Partisipasi Kasar ( APK ) dan Angka Partisipasi Murni ( APM ), pemerataan akses pendidikan di DIY masih perlu terus di tingkatkan terutama untuk jenjang sekolah menengah atas. Capaian APK untuk jenjang pendidikan menengah selama 2014-2018 menunjukan angka fluktuatif dengan rata-rata APK 92.88 ( Gambar 1.13 ) buku LKPJ 2018.

Dengan melihat data-data tersebut program wajib belajar 12 tahun perlu mendapatkan dukungan yang lebih besar lagi dari pemerintah daerah. Dan kewenangan pendidikan sekolah menengah sudah menjadi kewenangan pemerintah propinsi berdasar UU 23 Tahun 2014.

Dari masalah kuantitas, untuk sekolah menengah DPRD juga melihat masalah kualitas yang masih perlu di tingkatkan. Dari data jumlah pengangguran terbuka, yang pada tahun 2018 berjumlah 73.350 orang, bertambah 9.331 orang, jika dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 64.019 orang. Dan hal ini meningkatkan capaian TPT yang tahun 2018 sebesar 3.35% dari target 2.78% ( realisasi 82.98% ).

Pengangguran menurut kelompok umur didominasi penganggur usia muda dan produktif berusia di bawah 35 tahun yang jumlahnya mencapai 89,59% naik jika dibandingkan dengan proporsi di tahun 2014 yang sebesar 78,80%. Dan pengangguran menurut pendidikan didominasi pendidikan menengah ( SMA dan SMK ) yakni 46,51%, sementara yang berpendidikan diploma dan sarjana mencapai 21,26%

Berdasar laporan yang ada bahwa angka ujian nasional SMK tahun 2018 mengalami penurunan. Hasil ujian nasional SMK sebesar 54.77, jauh dari target yakni 57.65 ( 95% ), dan mengalami penurunan dibanding capaian 2017 yakni 57.43. Hal itu tidak terjadi pada SMA. Rata-rata hasil ujian nasional: SMA 62.5 dari target sebesar 57.45 ( realisasi 108.79%) dan naik dibanding 2017 yang mencapai 57.39. Sasaran akhir RPJMD yakni tahun 2022 untuk rata-rata hasil ujian nasional SMA adalah 58.41 dan untuk SMK adalah 58.29.

Jika di lihat dari persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan ( SNP ) di laporkan bahwa sekolah yang telah memenuhi SNP > 90 adalah sebesar 156/460 x 100% = 33.91%, meliputi SMA sebanyak 52 dari 163 sekolah, SMK sebanyak 79 dari 218 sekolah dan SLB sebanyak 25 dari 79 sekolah. Dari capaian SNP > 90 masih banyak sekolah menengah yang difasilitasi agar bisa memenihi SNP yang telah ditetapkan.

Dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pengangguran peran pemuda aktif perlu di tingkatkan. Di laporkan dalam LKPJ 2018 bahwa jumlah pemuda kader aktif bertambah sebanyak 217 pemuda, yakni dari 6567 pemuda menjadi 6784. Perlu upaya yang lebih keras dan tepat sasaran agar pemuda kita tidak banyak yang menganggur. Terutama kegiatan yang mendukung kewirausaaan ( *entrepreneurship* ) yang berdampak secara positif terhadap perbaikan ekonomi kita.

Untuk Prosentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju ( realisasi 25 atau 419% ) SMK/SMA/SLB hasilnya 18/29/39 atau sangat baik 25/baik 38/cukup 27/kurang sebanyak 10 sekolah. Pendidikan berbasis budaya sangat penting mengingat pendidikan karakter perlu ditanamkan sejak usia dini terutama melalui sekolah agar nantinya lulusan peserta didik kita, tidak hanya pintar secara ilmu pengetahuan dan ketrampilan namun juga memiliki akhlak atau budi pekerti yang baik.

Selain itu perlu diperhatikan kebutuhan dan permasalahan peningkatan kualitas urusan pendidikan di DIY sebagai berikut:

* + - 1. Peningkatan Kualitas Pendidikan;
      2. Tenaga Kependidikan;
      3. Sarana dan Prasarana Pendidikan;
      4. Sekolah Ramah anak;
      5. Pendidikan Berbasis budaya;
      6. Pemantapan Budaya Adilihung;
      7. Riset Budaya yang terbarukan;
      8. Antisipasi Nilai-nilai Budaya Asing

#### **2.3.4.2. Urusan Kesehatan**

Urusan kesehatan bertujuan untuk memperbaiki umur harapan hidup ( UHH ). UHH DIY termasuk tinggi, jika dibandingkan propinsi lain, yakni 74. 87 tahun. Memang belum mencapai target yang di harapkan yakni 75.06 (realisasi 99.74%). Sejumlah parameter kesehatan terus di usahakan untuk diperbaiki, seperti; angka kematian ibu dan balita, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, serta pencegahan dan pengendalian penyakit. Pada tahun 2018 angka kasus kematian ibu, bayi dan balita masih mengalami kecenderungan naik. Pada tahun 2017 angka kasus kematian sebesar 313. Dan angka kematian balita 343 kasus. Untuk angka kematian ibu ( AKI ) tahun 2017 sebanyak 34 kasus. Tahun 2018 tidak ada laporan. Untuk angka prevalensi kurang energy protein ( KEP ) tahun 2018 sebesar 7.94% mengalami penurunan dibanding tahun 2017 yang sebesar 8.26%

Di laporkan bahwa berdasar hasil riset kesehatan dasar ( Riskesdas ) tahun 2018, masih da prevalensi penyakit menular seperti infeksi saluran pernafasan ( ISPA ) Pneumonia, Tuberculosis TB Paru, diare, malaria dan filariasis walaupun masih dibawah angka nasional. Namun untuk penyakit yang tidak menular seperti kanker, stroke, ginjal kronis, diabetes, jantung dan hipertensi menunjukan prevalensi melebihi angka nasional. Penyakit lain seperti HIV AIDS dan TB terus bertambah.

Untuk capaian indicator urusan kesehatan sesuai dengan RPJMD ada empat indictor dan hasilnya mencapai realisasi 100% bahkan lebih. Sebagai contoh indicator kinerja sasaran persentase pukesmas melaksanakan program jogja sehat dengan pendekatan keluarga. Target 67.77, dan realisasi 100 sehingga capainnya adalah 149%. Namun yang perlu di perhatikan adalah keterkaitan antara capaian indicator ini dengan masih tingginya angka kejadian penyakit menular sebagaimana dipaparkan di atas. Demikian juga dihubungkan dengan parameter AKI, Angka kematian bayi, angka kematian balita serta KEP ( gizi buruk ). Sulitnya menekan kasus kematian ibu, bayi dan balita dari tahun ketahun disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah kondisi 3 T ( terlambat merujuk, terlambat sampai dan terlambat mendapatkan pertolongan ) dan kualitas kesehatan ibu hamil. Sehingga bentuk intervensi kebijakan mengenai permasalahan ini perlu ditekankan. Akses pada sarana pelayanan kesehatan yang tertandar dan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata sehingga dapat mencegah dari kematian perlu diperhatikan.

Demikian juga dengan capaian persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi. Pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 64.89% terealisasi 66.41%. Hal ini patut kita apresiasi dimana akreditasi memberi jaminan akan pelayanan kesehatan yang terstandard di unit-unit pelayanan kesehatan kita. Namun yang masih memprihatinkan kita adalah belum meratanya jumlah sarana pelayanan kesehatan yang ada terutama Rumah Sakit dan ketersediaan dokter spesialis. Dari IPM kita bisa melihat banyak hal. IPM DIY adalah 79.59 yang merupakan akumulasi dari IPM per Kabupaten/Kota. IPM Kota Jogja 85.49, Sleman 82.85, Bantul 78.67, Kulonprogo 73.23 dan Gunungkidul 68.73. Dengan demikian DPRD terus mendorong agar ada political will untuk memberikan prioritas kebijakan dan anggaran untuk mengurangi kesenjangan diberbagai bidang pemerintahan.

Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah DIY terkait dengan tingginya prevalensi penyakit tidak menular ( PTM ) sebagaimana telah dipaparkan di atas. Jika program dan kegiatan yang ada belum Nampak hasilnya maka perlu dilakukan pendekatan yang berbeda. Hal ini untuk mencegah kenaikan kasus setiap tahun.

Selain itu perlu diperhatikan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

Kualitas Pelayanan kesehatan terhadap Ibu dan anak masih per;

Edukasi makanan sehat untuk keluarga dan siswa, belum terpadu antar stakeholder;

Perlunya Pendampingan keluarga sehat

Kondisi RSUD & Puskesmas, yang belum ramah terhadap Lansia, anak-anak serta Difabel/ penyandang disabilitas

#### **2.3.4.3. Urusan Sosial**

Keberhasilan penurunan jumlah penduduk miskin DIY dari target sebesar 484.947 dan diturunkan tahun 2018 dengan realisasi sebesar 450.250 ( realisasi sebesar 107.7% ) perlu mendapatkan apresiasi. Walaupun secara prosentase jumlah penduduk miskin angka tersebut belum tercapai. Sebab sampai dengan September 2018 adalah 11.81% dari target 11.23%. Pemerintah DIY telah melakukan terobosan yakni dengan melaksanakan Kegiatan Fasilitasi dan Jenjang Ekonomi Bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM Tahun 2018. Bentuk kegiatannya berupa pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan ( KPM PKH ) graduasi dengan usaha ekonomi produktif berupa pemberian modal usaha. Mekanisme dilakukan dengan Bantuan Keuangan Khusus merealisasikan 301 KPM PKH graduasi di 5 kabupaten/kota dengan bantuan modal usaha masing-masing sebesar Rp 2.300.000.

Kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan tahapan pelaksanaan kegiatan. Waktu pelaksanaan selama 3 tahun yang di tempuh dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahun 1; kegiatan yang dilaksanakan yaitu kabupaten/kota mengusulkan by name by address KPM PKH, yang telah graduasi selanjutnya dilakukan sosialisasi dan assessment bimbingan motivasi dan seterusnya.
2. Tahun 2; focus kegiatan pada peningkatan kapasitas KPM yang masih bertahan sampai dengan ahir tahun pertama. KPM akan diberikan penguatan dengan kegiatan berupa family development session program kemampuan peningkatan keluarga ( P2K2 ).
3. Tahun 3; penambahan modal usaha sebagai bentuk penghargaan bagi KPM PKH yang berhasil. Keberhasilan pemberdayaan KPM PKH graduasi dengan memperhatikan tiga aspek yaitu: aspek kelembagaan, aspek ekonomi dan aspek sosial.

Dari pemerintah pusat penanganan kemiskinan melalui program PKH ditahun 2018 pemerintah DIY telah merealisasikan peyaluran PKH sampai dengan tahan IV sejumlah 213.557 KPM, dari KPM tersebut anaknya yang sekolah sampai jenjang perguruan tinggi ad 5.692 anak. Selain itu juga ada program bantuan pangan nontunai di DIY sebanyak 317.210 KPM.

Mencermati apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah DIY bekerjasama dengan Pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi. Apakah dari sejumlah warga yang telah menerima KPM PKH tersebut yang telah melewati tahapan-tahapan tersebut sudah bisa mandiri, menjadi wirausaha mandiri dan berapa nilai omset atau jumlah tenaga kerja yang dapat diberdayakan program ini. LKPJ 2018 terlu memberikan laporan yang lebih rinci mengenai hal tersebut. Data jumlah penerima manfaat juga perlu di sampaikan per Kabupaten/Kota untuk melihat sejauhmana distribusinya. Jangan sampai program ini tidak mencerminkan problem DIY yang sedang berusaha untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan (pendapatan maupun wilayah).

Selain itu perlu diperhatikan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

Mengkondisikan DIY bebas Gepeng dan Anjal

Meminimalisasi, Peredaran dan bebas narkoba (keluarga, masyarakat sekolah)

Peningkatan peran kepemudaan, melalui program kewirausahaan;

Maksimalisasi dan Sosialisasi Peran kelembagaan sosial untuk masyarakat luas.

#### **2.3.4.4. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu menjadi perhatian terkait permasalahan/ kebutuhan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perda Nomor: 2 tahun 2018 tentang Perlindungan anak, belum maksimal
2. Masih terjadi Kekerasan terhadap Perempuan dan anak;
3. Masih tingginya angka perceraian, Perlu maksimalisasi Edukasi Pra-Nikah;
4. Peningkatan kesetaraan Gender, masih Perlu Edukasi
5. Perlunya Pencegahan Nikah Usia Dini dikalangan Remaja;
6. Perlu Kampanye anti Pekerja anak-anak

**BAB III**

**PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021**

## Pengelolaan Keuangan Daerah

### **Dasar Hukum Pengelolaan**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **Struktur Keuangan Daerah**

1. Pendapatan Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang terdiri atas:
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Dana Perimbangan;
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
5. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
6. Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Desa yang terdiri dari Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
7. Belanja Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.
8. Pembiayaan Daerah bersumber dari :
9. Penerimaan Pembiayaan**,** yang berasal dari
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA);
11. Pencairan Dana Cadangan;
12. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
13. Penerimaan Pinjaman Daerah;
14. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
15. Penerimaan Piutang Daerah;
16. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir;
17. Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan.
18. Pengeluaran Pembiayaan
19. Pembentukan Dana Cadangan;
20. Penyertaan Modal;
21. Pembayaran Pokok Utang;
22. Pemberian Pinjaman Daerah;
23. Penyelesaian Kegiatan DPA – L;
24. Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu yang Belum Terselesaikan.

### **Kerangka Pendanaan**

1. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai dengan kewenangan yang diserahkan;
2. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan;
3. Penyelengaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai dari APBD;
4. Sedangkan penyelengaraan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pusat dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Untuk kerangka pendanaan APBD Tahun 2020 berdasarkan pada hasil rekapitulasi sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain-lain Daerah Yang Sah, maka perangkaan yang didapat dari pendapatan daerah tersebut dirumuskan kebijakan dan langkah yang perlu dilakukan dibidang Keuangan Daerah yang terdiri atas:

1. Kebijakan Bidang Pendapatan Daerah;
2. Kebijakan Bidang Belanja Daerah;
3. Kebijakan Bidang Pembiayaan Daerah.

### **Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah merupakan sumber penerimaan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Meliputi kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

1. Dana Perimbangan

Meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA), dan Dana Alokasi Umum (DAU).

1. Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Alokasi Khusus, serta Dana Bantuan Keuangan.

Kebijakan yang perlu ditetapkan di bidang Pendapatan Daerah adalah :

1. Pencermatan semua potensi sumber Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kelompok Lain-ain Pendapatan Yang sah;
2. Intensifikasi pemungutan dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah.

Kebijakan tersebut perlu dijabarkan dalam perumusan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatkan manajemen tata kelola penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme pelayanan yang akurat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat;
3. Menekan kemungkinan terjadinya kebocoran dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

**Pendapatan Daerah**

Tabel 3.1. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah DIY Tahun 2015-2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun | Pendapatan Daerah  (Rp) | % |
| 1 | LRA Th 2015 | 3.400.014.811.777,00 | - |
| 2 | LRA Th 2016 | 3.899.192.985.313,51 | 14,68 |
| 3 | LRA Th2017 | 5.085.241.219.285,27 | 30,41 |
| 4 | APBD Th 2018 | 5.182.962.876.476,63 | 1,92 |
| 5 | RKPD Th 2019 | 6.282.431.150.970,28 | 21,12 |

Rata-rata persentase kenaikan Pendapatan Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir adalah 17,03%. Dengan demikian perkiraan Pendapatan Daerah Tahun 2020 adalah Rp7.252.329.175.980,40.

**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2015-2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun | Pendapatan Asli Daerah (PAD)  (Rp) | % |
| 1 | LRA Th 2015 | 1.593.110.769.595,00 | **-** |
| 2 | LRA Th 2016 | 1.673.743.196.521,51 | 5,06 |
| 3 | LRA Th2017 | 1.851.973.396.065,27 | 10,64 |
| 4 | APBD Th 2018 | 1.733.998.980.629,63 | -6,37 |
| 5 | RKPD Th 2019 | 1.921.526.631.490,28 | 10,81 |

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata kenaikan Pendapatan Asli Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir adalah 5,03%. Dengan demikian perkiraan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 adalah sebesar Rp2.018.179.421.054,10.

**Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah Rp7.252.329.175.980,40

PAD Rp2.018.179.421.054,10 (27,82)

**Kontribusi kelompok PAD**

1. Pajak Daerah 86,46 %
2. Retribusi Daerah 2,26 %
3. Hasil Kekayaan Daerah 4,46 %
4. Lain-lain PAD 6,19 %

Tabel 3.3. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2019

| No | Tahun | Realisasi  (Rp) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LRA Th 2015  PAD  Pajak Daerah | 1.593.110.769.595,00  1.397.772.209.370,00 | 87,73 |
| 2 | LRA Th 2016  PAD  Pajak Daerah | 1.673.743.196.521,51  1.440.571.518.513,00 | 86,06 |
| 3 | LRA Th2017  PAD  Pajak Daerah | 1.851.973.396.065,27  1.583.875.063.583,00 | 82,52 |
| 4 | APBD Th 2018  PAD  Pajak Daerah | 1.733.998.980.629,63  1.525.970.677.535,00 | 88,00 |
| 5 | RKPD Th 2019  PAD  Pajak Daerah | 1.921.526.631.490,28  1.693.249.366.202,43 | 88,13 |

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata kontribusi paling tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah sebesar 86, 46%.

Tabel 3.4. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Tahun 2015-2019

| No | Tahun | Realisasi  (Rp) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LRA Th 2015  PAD  Retribusi Daerah | 1.593.110.769.595,00  45.811.953.262,71 | 2,87 |
| 2 | LRA Th 2016  PAD  Retribusi Daerah | 1.673.743.196.521,51  36.603.583.321,00 | 2,18 |
| 3 | LRA Th2017  PAD  Retribusi Daerah | 1.851.973.396.065,27  41.432.293.725,53 | 2,23 |
| 4 | APBD Th 2018  PAD  Retribusi Daerah | 1.733.998.980.629,63  37.471.040.290,00 | 2,16 |
| 5 | RKPD Th 2019  PAD  Retribusi Daerah | 1.921.526.631.490,28  36.693.669.375,00 | 1,90 |

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD adalah 2,26%.

Tabel 3.5. Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap PAD Tahun 2015-2019

| No | Tahun | Realisasi  (Rp) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LRA Th 2015  PAD  Hasil Kekayaan Daerah | 1.593.110.769.595,00  45.811.963.979,68 | 2,87 |
| 2 | LRA Th 2016  PAD  Hasil Kekayaan Daerah | 1.673.743.196.521,51  57.333.770.984,56 | 3,42 |
| 3 | LRA Th2017  PAD  Hasil Kekayaan Daerah | 1.851.973.396.065,27  71.411.759.885,57 | 3,85 |
| 4 | APBD Th 2018  PAD  Hasil Kekayaan Daerah | 1.733.998.980.629,63  75.639.486.244,44 | 4,76 |
| 5 | RKPD Th 2019  PAD  Hasil Kekayaan Daerah | 1.921.526.631.490,28  85.874.687.657,66 | 4,46 |

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata kontribusi Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap PAD adalah 3,79%.

Tabel 3.6. Kontribusi Lain-lain PAD Yang Sah terhadap PAD Tahun 2015-2019

| No | Tahun | Realisasi  (Rp) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LRA Th 2015  PAD  Lain-lain PAD | 1.593.110.769.595,00  52.502.631.979,98 | 3,29 |
| 2 | LRA Th 2016  PAD  Lain-lain PAD | 1.673.743.196.521,51  139.240.023.702,95 | 8,31 |
| 3 | LRA Th2017  PAD  Lain-lain PAD | 1.851.973.396.065,27  155.254.278.571,17 | 8,38 |
| 4 | APBD Th 2018  PAD  Lain-lain PAD | 1.733.998.980.629,63  94.924.534.096,19 | 5,47 |
| 5 | RKPD Th 2019  PAD  Lain-lain PAD | 1.921.526.631.490,28  105.708.908.255,19 | 5,50 |

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata kontribusi Lain-lain Pendapatan Asli Yang Sah terhadap PAD adalah 6,19%.

**Dana Perimbangan**

Tabel 3.7. Realisasi dan Proyeksi Dana Perimbangan Tahun 2015-2019

| No | Tahun | Realisasi/Proyeksi  (Rp) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LRA Th 2015 | 1.021.886.268.197 | **-** |
| 2 | LRA Th 2016 | 1.677.108.535.480 | 66,07 |
| 3 | LRA Th2017 | 2.379.856.461.840 | 40,23 |
| 4 | APBD Th 2018 | 2.396.221.583.000 | 0,68 |
| 5 | RKPD Th 2019 | 2.280.283.780.480 | -0,04 |

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan Dana Perimbangan selama 5 (lima) tahun adalah 26,69%. Dengan demikian Dana Perimbangan untuk tahun 2020 diperkirakan adalah Rp2.887.751.379.599,80. Sedangkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah adalah 39,81%.

Tabel 3.8. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun | Realisasi/Proyeksi  (Rp) | % |
| 1 | LRA Th 2015 | 785,017.773.985 | **-** |
| 2 | LRA Th 2016 | 528.335.253.312 | -32,69 |
| 3 | LRA Th2017 | 853.411.361.363 | 61,52 |
| 4 | APBD Th 2018 | 1.052.742.042.347 | 23,35 |
| 5 | RKPD Th 2019 | 2.080.620.739.000 | 97,63 |

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Yang Sah selama 5 (lima) tahun adalah 37,43%. Dengan demikian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk Tahun 2020 diperkirakan adalah Rp2.859.813.205.755,50, sedangkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah adalah 36,82%.

Tabel 3.9. Pendanaan Daerah Tahun 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Jumlah  (Rp) | % |
| 1 | PAD | 2.018.179.421.053,90 | 25,98 |
| 2 | Dana Perimbangan | 2.887.751.579.599,80 | 37,18 |
| 3 | Lain-lain Pendapatan | 2.859.813.205.755,50 | 36,82 |
| 4 | Jumlah | 7.765.744.006.408,70 | 23,35 |

### **Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Berdasarkan Permenkeu No 117/PMK/2017 Pasal 3 c tentang batas maksimal defisit APBD Tahun 2018 adalah 4% dari Pendapatan Daerah.

Perkiraaan Pendapatan Daerah Tahun 2020 adalah Rp7.765.744.006.408,70, defisit 4% sebesar Rp310.629760.256,34, sehingga Belanja yang diperkenankan Tahun 2020 Rp8.076.373.766.665,04.

Tabel 3.10. Belanja Daerah

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Uraian | Jumlah  (Rp) |
| 1 | Pendapatan Daerah Th 2020 | 7.765.744.006.408,70 |
| 2 | Defisit Anggaran (4%) | 310.629760.256,34 |
| 3 | Pendanaan Belanja Daerah Th 2020 | 8.076.373.766.665,04 |
| 4 | Pembiayaan | 310.629.760.256,34 |

Dengan demikian kebijakan yang perlu diambil adalah:

1. Belanja Daerah yang efektif dan efisien akan menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan. Berapapun besarnya pendapatan akan menjadi kurang bermakna apabila dalam pola belanjanya masih terjadi pemborosan;
2. Belanja Daerah disusun berdasarkan suatu analisis kebutuhan nyata yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Tidak sekedar secara linier, dengan anggaran tahun sebelumnya sebagai acuan utama, tetapi dirumuskan sebagai suatu peningkatan proporsional dari anggaran tahun berjalan, dengan memper timbangkan skala prioritas perumusan kebutuhan yang nyata;
3. Setiap pengalokasian Belanja Daerah diharapkan dapat bersinergis dengan upaya pengentasan kemiskinan, penyerapan pengangguran, pemberdayaan masyarakat serta pengurangan disparitas pembangunan antar wilayah.

**Penentuan Proporsi Belanja**

Untuk menentukan proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dalam toleransi maksimal 4% dari Pendapatan Daerah diperlukan penentuan kebijakan sebagai berikut:

1. **Belanja Tidak Langsung**
2. Perhitungan kenaikan gaji pegawai karena kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberian tunjangan dan pengurangan karena pensiun dengan accress 2,5%;
3. Pada jenis Belanja Pegawai karena yang bersifat tetap dan mengikat pelaksanaan Belanja Pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun yang berkenaan. Pengalokasian tambahan belanja pegawai harus bersinergi dengan upaya peningkatan kinerja pegawai;
4. Biaya rapat dan perjalanan dinas keluar daerah serta pengadaan sarana mobilitas dikendalikan sesuai dengan urgensinya;
5. Belanja Tidak Langsung yang berupa Hibah dan Bantuan Sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
6. Belanja Langsung Tidak Terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*stanby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam dan bencana sosial.
7. **Belanja Langsung**
8. Proporsionalitas Belanja Langsung harus lebih banyak diarahkan untuk Belanja Publik atau belanja yang dampak dan benefitnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan;
9. Belanja Langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat;
10. Belanja Langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
11. Belanja Langsung yang mendukung program kegaitan strategis yang terkait dengan agenda nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.

### **Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Tabel 3.11. Pembiayaan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
| 1 | Pendapatan Daerah Th 2020 | 7.765.744.006.408,70 |
| 2 | Defisit Anggaran (4%) | 310.629760.256,34 |
| 3 | Pendanaan Belanja Daerah Th 2020 | 8.076.373.766.665,04 |
| 4 | Pembiayaan | 310.629.760.256,34 |

Defisit anggaran tersebut akan ditutup dengan kebijakan pembiayaan daerah. Pengertian Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah yang terdiri dari: a) Penerimaan Pembiayaan dan b) Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan bersumber dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA);
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
6. Penerimaan Piutang Daerah;
7. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir;
8. Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan.

Pengeluaran Pembiayaan dapat dipergunakan untuk:

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal;
3. Pembayaran Pokok Utang;
4. Pemberian Pinjaman Daerah;
5. Penyelesaian Kegiatan DPA – L;
6. Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu yang Belum Terselesaikan.

Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan sebagai berikut:

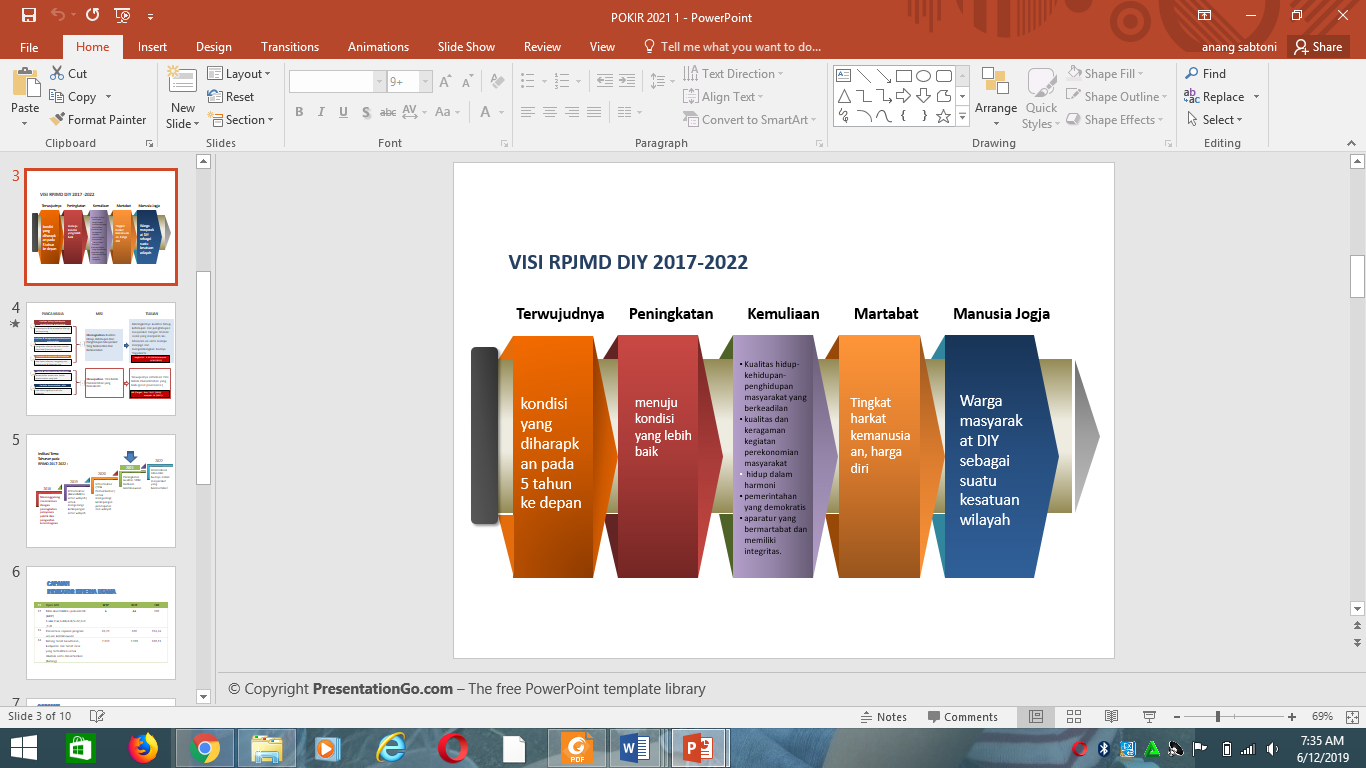
1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin dapat ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu;
2. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal bagi perusahaan daerah;
3. Membentuk dana cadangan untuk antisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam dan bencana lainnya.

## Rekomendasi dan pokok-pokok pikiran DPRD DIY

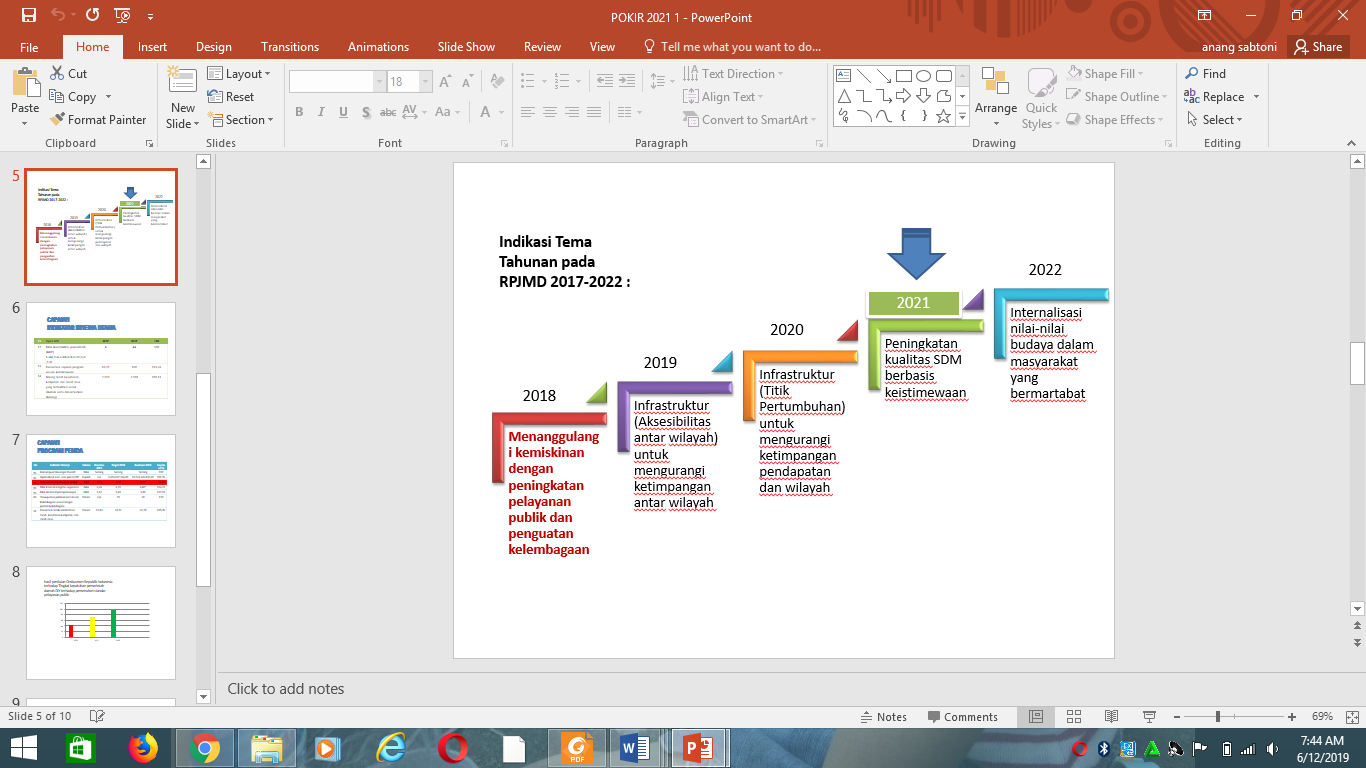
### **Bidang Pemerintahan**

Persoalan kebijakan pembangunan di D.I Yogyakarta masih fokus pada persoalan angka kemiskinan, kesenjangan pendapatan (rasio Gini) dan kesenjangan infrastruktur pembangunan wilayah.

Ketiga isu kebijakan pembangunan tersebut selalu mencuat dan menjadi tema utama dalam pembahasan kebijakan publik, khususnya ekonomi pembangunan. Di bidang pemerintahan, tema-tema utama kebijakan juga dipusatkan dalam mendorong terselesaikannya ketiga tema persoalan tersebut, meskipun bidang pemerintahan juga mempunyai banyak persoalan yang terkait dengan isu sosial dan politik nasional.



Beberapa persoalan terkait dengan pemerintahan untuk tahun 2021 tentu harus disesuaikan dengan tema pembangunan tahun tersebut. Pemerintah daerah D.I Yogyakarta teah menetapkan tema pembangunan tahun 2021 adalah: **Peningkatan kualitas SDM berbasis keistimewaa**n yang sesuai dengan visi RPJMD pembangunan D.I Yogyakarta **Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja**. Peningkatan SDM berbasis Keistimewaan Yogyakarta tentu harus terkait dengan perkembangan jaman, khususnya di era teknologi informasi yang menunjang sektor pemerintahan.



Di era revolusi industri 4.0 dengan teknologi informasi yang telah mengubah corak kebudayaan manusia, diantaranya adalah manifestasi teknologi dalam bidang pemerintahan dengan konteks kebutuhan percepatan layanan. Tuntutan jaman dalam era “Internet Things” menuntut pemerintah daerah untuk segera berinvestasi dalam bidang teknologi dengan tujuan good governace segera terwujud.

Tema **Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja** mempunyai makna menjadikan manusia Jogja yang berkualitas dan mempunyai kesejahteraan bertaraf minimal cukup, dan baik dalam segala bidang. Tentu saja hal ini berkaitan dengan pencapaian pembangunan seutuhnya di D.I Yogyakarta. Kemajuan pembangunan infrastruktur fisik, khususnya pengembangan kawasan selatan-selatan Yogyakarta yang sudah dimulai menuntut sektor pemerintahan mengkutinya dengan penerapan berbagai macam teknologi informasi di dalamnya.

Saat ini Pemerintah DIY terus berbenah diri dan berkomitmen untuk melakukan perubahan guna mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi yakni: *Birokrasi* *yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta* *yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.* Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu terlebih dahulu melakukan Identifikasi Kondisi Umum Birokrasi saat ini yang didasarkan pada capaian kinerja sasaran pemerintah daerah.

Berdasarkan Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah tahun 2018, Jika dilihat dari sasaran Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, maka telah dicapai oleh pemerintah DIY selama 9 tahun berturut-turut (2010 - 2019) mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

| **CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMDA DIY TAHUN 2018** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja | Satuan | *Baseline* | 2018 | | Capaian | Keterangan |
| 2017 | Target | Realisasi | (%) |
| 11 | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | 100 | Tercapai |
| *Sumber: BPPSD DIY, 2019 (data diolah)* | | | | | | | |

Opini BPK tersebut merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat (4) kriteria yakni:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
2. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*),
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Hasil evaluasi kinerja pemerintah provinsi se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2018 menempatkan Pemda DIY dalam kategori “AA” untuk capaian kinerja pemerintahan. Untuk predikat ini menempatkan Pemda DIY sebagai satu-satunya dan pertama kali dalam sejarah pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang mendapatkan predikat “AA” *(Sangat Memuaskan)*. Hal ini berarti bahwa Pemda DIY memiliki kinerja sangat tinggi dan sangat akuntabel karena menjadikan Sistem Akuntabilitas sebagai budaya kerja.

| **CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMDA DIY TAHUN 2018** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja | Satuan | *Baseline* | 2018 | | Capaian | Keterangan |
| 2017 | Target | Realisasi | (%) |
| 12 | Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP) 1=AA;2=A;3=BB;  4=B; 5=CC;6=C;7=D | Nilai | A | A | AA | 100 | Tercapai |
| *Sumber: BPPSD DIY, 2019 (data diolah)* | | | | | | | |

Selanjutnya apabila melihat perkembangan hasil penilaian Ombusmen Republik Indonesia, terhadap Tingkat kepatuhan pemerintah daerah DIY, terhadap pemenuhan standar pelayanan public dari tahun 2016, mendapat skor 43,45 atau pada *zona merah* , kemudian pada tahun 2017 sudah naik skornya yakni 71,51 atau pada *zona kuning* dan tahun 2018 mendapat skor 95,65 atau pada posisi *zona hijau*. Hal ini menunjukan adanya peningkatan dalam pemenuhan standar pelayanan public.

**HASIL PENILAIAN OMBUSMEN REPUBLIK INDONESIA**

100

20

60

80

40

2016

2017

2018

71,51

95,65

43,45

Dalam kaitannya dengan sasaran pemda DIY yakni Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan, maka untuk mewujudkan sasaran tersebut diperlukan adanya Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah. Dalam Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah terdapat 4 (empat) indikator kinerja program sebagai tolok ukur keberhasilan, yaitu:

1. Kemampan Keuangan Daerah,
2. Optimalisasi Aset-Aset Pemda DIY,
3. Nilai Eksternal Pelayanan Publik,
4. Nilai Internal Integritas Organisasi, dan Nilai Eksternal Persepsi Korupsi*.*

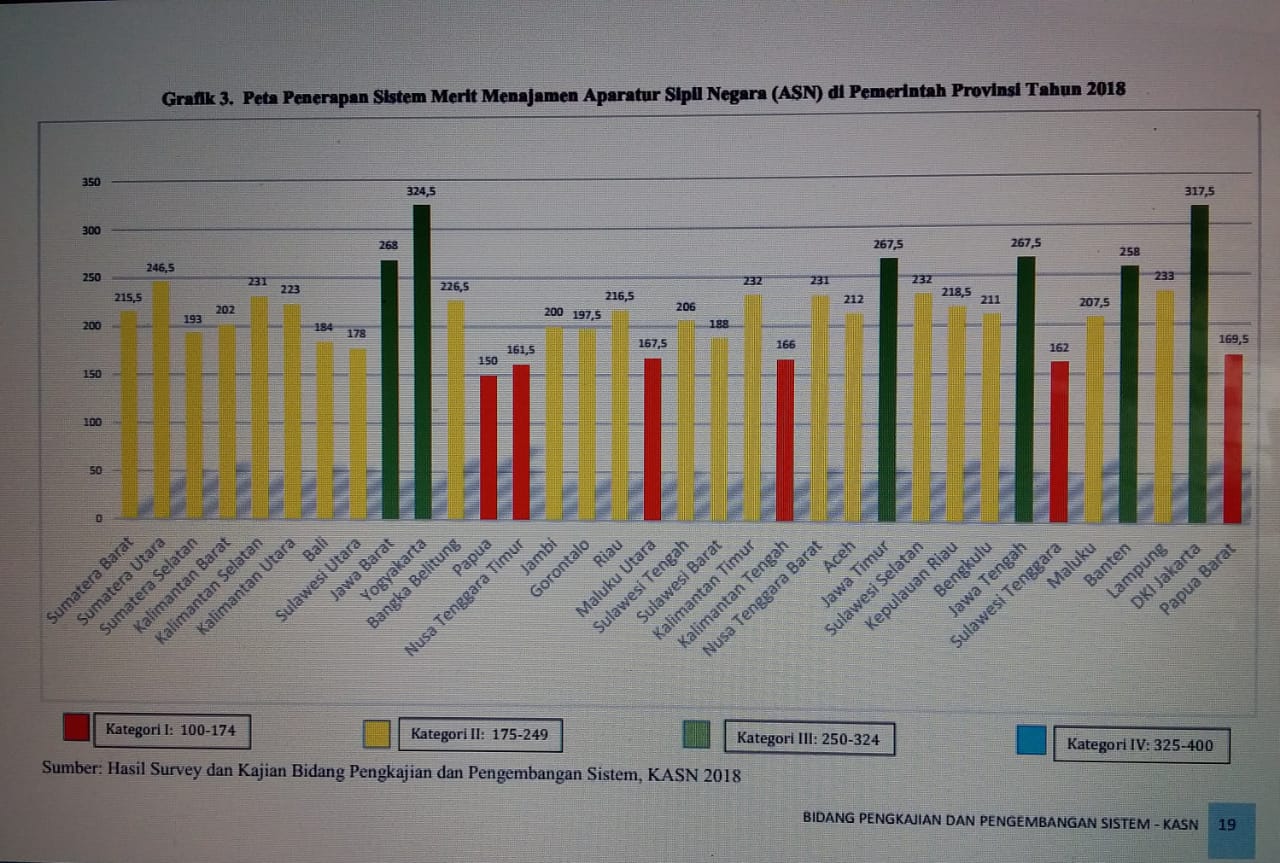
Sebagaimana hasil sementara yang disampaikan, untuk integritas organisasi dan nilai persepsi korupsi sudah pada hasil yang baik atau sesuai target, namun untuk nilai eksternal pelayanan publik masih kurang dari target (8,28) yang diharapkan (8,50) . Dengan tidak tercapainya target terhadap nilai eksternal pelayanan publik menggambarkan bahwa kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan belum sesuai yang diharapkan.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAPAIAN INDIKATOR NILAI EKSTERNAL PELAYANAN PUBLIK, NILAI INTERNAL INTEGRITAS ORGANISASI, DAN NILAI EKSTERNAL PERSEPSI KORUPSI** | | | | | | |
| No | Indikator | Capaian 2016 | Capaian 2017 | Target 2018 | Realisasi  2018 | Target Akhir RPJMD | |
| 1 | Nilai Eksternal Pelayanan Publik | 8,44 | 8,43 | 8,50 | 8,28\* | 8,8 | |
| 2 | Nilai internal integritas organisasi | 4,16 | 4,03 | 4,20 | 4,86\* | 4,6 | |
| 3 | Nilai eksternal persepsi korupsi | 5,21 | 5,62 | 5,40 | 5,81\* | 6 | |

Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaanPenerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Penerapan sistem merit bertujuan untuk memastikan jabatan yang ada di birokrasi pemerintah diduduki pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Dengan demikian maka tujuan pembangunan bidang SDM Aparatur untuk mewujudkan pegawai ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja tinggi dapat diwujudkan.

Pada akhir bulan November 2017, Pemda DIY mendapatkan *Award* dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan kriteria “Perintis Pengembangan Implementasi Merit *System* dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Level Provinsi”. Pada bulan Maret 2018, KASN melakukan verifikasi dan menetapkan indeks/tingkat penerapan sistem merit dan skor yang diperoleh Pemda DIY adalah 324,5, masuk dalam kategori III (Baik), yang artinya sudah memenuhi “sebagian besar” kriteria sistem merit.

Manajemen sumber daya manusia yang berbasis merit dipercayai dapat menarik orang-orang terbaik untuk bekerja di suatu organisasi karena sistem tersebut memberi kesempatan kepada siapa saja untuk mengembangkan kariernya sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan lain seperti gender, suku, dan faktor-faktor non-merit lainnya. Penerapan sistem merit juga dipercayai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi korupsi.

****

Tak dapat dipungkiri bahwa meskipun sudah banyak hal positif yang telah dicapai, serta banyak penghargaan yang diterima, masih terdapat permasalahan dan tantangan dalam mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik, guna mencapai sasaran pemerintah daerah yang telah ditetapkan *(Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan, Meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan, dan Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa)* **.**

Permasalahan dalam tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat dari berbagai demensi:

1. *Pola Pikir dan Budaya Kerja* , permasalahan yang sering ditemui adalah belum mampu menciptakan birokrat yang proporsional yang berorientasi pada pelayanan yang lebih baik dan kinerja yang optimal. Implementasi Program Budaya Pemerintahan SATRIYA keberhasilan yang dicapai masih kurang maksimal. Hal itu disebabkan antara lain kurangnya pemahaman terhadap nilai filosofi luhur budaya pemerintahan SATRIYA yang bersumber dari kearifan lokal DIY.
2. *Akuntabilitas Pemerintah* , dalam dimensi akuntabilitas masih terdapat kesalahan dan penyalahgunaan wewenang dalam administrasi kepemerintahan. Hal ini terbukti masih ditemukannya beberapa catatan atas hasil pemeriksaan BPK, walaupun opini yang di berikan adalah WTP. Dengan demikian sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan masih perlu ditingkatkan. Salah satu unsur pendukung akuntabilitas adalah *Sumber Daya Manusia* yang kompeten, profesional dan bermoral.
3. *Pelayanan Masayarakat* , Pelayanan kepada masyarakat masih belum memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, dan hak dasar yang dimiliki oleh warga Negara, dari capaian kinerja program masih ditemukan indicator pelayanan eksternal belum memenuhi target , walaupun hasil penilaian ORI menempatkan DIY pada zona hijau yang berarti tingkat kepatuhan tinggi.
4. *Manajemen SDM,* Manajemen SDM belum diimplementasikan secara total untuk meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi , walaupun pemerintah DIY telah mendapatkan anugerah dari Komisi Aparatus Sipil Negara dengan predikat baik akan tetapi pada level III.
5. *Peraturan perundangan,* Masih banyak peraturan perundang-undangan yang overlapping, tidak konsisten, multi interprestasi, yang perlu diyinjau ulang, diselaraskan, dan disempurnakan

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut maka tantangan kedepan adalah perlu membangun manajemen ASN yang mendukung pencapaian visi dan misi instansi dan memastikan identifikasi kebutuhan pegawai lebih akurat, dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi instansi.

Membangun sistem pembinaan karier yang berkelanjutan, yang dimulai sejak mereka diterima menjadi pegawai sampai mereka mengakhiri masa jabatannya, agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional, menjadi suatu keharusan dengan didukung dengan membangun manajemen kinerja untuk memastikan masing-masing pegawai dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Tantangan yang lain adalah menyusun kebijakan penggajian, penghargaan yang dikaitkan dengan kinerja dan disiplin untuk menjadi *reward and punishment* yang efektif dalam mendorong kinerja serta mengoptimalkan budaya kerja SATRIYA yang lebih produktif, serta menyiapkan para calon pemimpin yang dibutuhkan instansi dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan membangun *talent pool* yang berkesinambungan melalui upaya peningkatan kapasitas pegawai secara konvensional maupun nonkonvensional.

Capaian kinerja pemda DIY tahun 2018 telah melampaui target, bahkan sampai akhir RPJMD DIY (2022). Namun demikian yang menjadi tantangan kedepan adalah bagaimana mempertahankan predikat SAKIP tertinggi tersebut, oleh karena itu upaya mempertahankan tidak bisa sekadar mempertahankan, tetapi perubahan harus terus terjadi, sehingga diperlukan adanya reformasi.

Perubahan yang cepat secara global harus diantisipasi oleh pemerintah DIY dengan membangun *human capital* di sektor pemerintahan, agar DIY mampu bersaing dengan daerah-daerah lain maupun di tingkat global, sehingga pilihan tema pembangunan untuk RKPD DIY tahun 2021 merupakan pilihan yang tepat yakni *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Keistimewaan.* Oleh karenanya menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan desain pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih baik.

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan aktor utama penggerak birokrasi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik,sehingga dibutuhkan ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja tinggi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara . Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tersebut disusun sebagai bagian dari program reformasi birokrasi, yang merupakan upaya untuk mentransformasi birokrasi Pemerintah Indonesia, dari *rule-based bureaucracy* menuju ke *dynamic governance*. Sejalan dengan itu maka manajemen Aparatur Sipil Negara juga harus berubah dari administrasi kepegawaian, menuju ke pembangunan *Human Capital.*

Untuk mewujudkan ASN yang diharapkan, maka penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di instansi pemerintah DIY, sudah merupakan sesuatu yang “*urgent*”, karena ASN yang profesional, sangat mendukung tercapainya tujuan reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang efektif dan efisien, serta melayani.

Reformasi birokrasi saat ini mampu secara perlahan merubah pola pikir dan perilaku birokrasi yang sudah ada. Meskipun secara perkembangannya kurang signifikan, namun perubahan dari tahun ke tahun sudah meningkatkan kualitas reformasi birokrasi. Dengan adanya reformasi birokrasi, diharapkan bisa memberikan manfaat secara nyata kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta mewujudkan pemerintahan yang memberikan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, maka reformasi birokrasi harus terus dilaksanakan hingga ke seluruh unit kerja dan memastikan budaya kinerja yang telah terbangun bisa terkoordinir.

Esensi reformasi birokrasi tidak hanya dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi melainkan ditujukan untuk mengembangkan atau memperbarui berbagai hal yang sudah baik sebagai wujud antisipasi terhadap tantangan yang ada.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka beberapa hal yang terus harus dilakukan oleh pemerintah DIY adalah:

1. Meningkatkan komitmen aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Upaya ini memang tidak mudah, mengingat hal ini terkait dengan mentalitas, etika, kesadaran serta empati masing-masing birokrat. Namun hal ini dapat ditempuh dengan pembuatan sistem yang kemudian mengharuskan aparatur untuk dapat memberikan pelayanan dan mengerjakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Membenahi dan meningkatkan mutu pelayanan publik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, dapat diupayakan dengan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat termasuk disabilitas, memperpendek proses birokrasi, mempercepat waktu pelayanan, memberikan kenyamanan tempat pelayanan, dan mengubah budaya pelayanan dengan memberikan pelatihan kepada pegawai (birokrat) untuk memberikan pelayanan layaknya kepada konsumen, sehingga semangat hospitality sangat diutamakan.
3. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan akses kepada masyarakat, ikut berperan dalam melakukan pengawasan. Pemerintah dapat memberikan kemudahan akses dengan membentuk lembaga pengaduan atau memaksimalkan fungsi lembaga pengawasan yang sudah ada.
4. Peningkatan penegakan hukum melalui perbaikan terhadap sistem kerja internal serta keselarasan antara lembaga penegak hukum dan lembaga pengawasan. Bentuk akuntabilitas bukan sebatas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (Lakip), tetapi juga perlu pemahaman lebih terhadap konsep akuntabilitas itu sendiri. Keberhasilan pemerintah bukan sebatas terserapnya anggaran melalui program-program pemerintah atau pencapaian output, tetapi yang terpenting adalah outcome yang dicapai melalui program tersebut.
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program ini ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan reformasi birokrasi dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan target yang telah ditetapkan.
6. **PERMASALAHAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN**
7. **Ketertiban, Ketentraman umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Pasca pemilihan legislatif dan presiden menyisakan berbagai gejolak sosial di masyarakat yang tak kunjung terselesaikan. Berbagai perpecahan sosial telah terjadi karena perbedaan dukungan dan pilihan. Masyarakat tidak saja terpecah belah karena dukungan dalam pemilu legislatif ataupun presiden, akan tetapi masyarakat sudah terpolarisasi dan terdeferensiasi dalam berbagai bentuk ideologi tertentu yang mempunyai potensi untuk tetap memicu adanya konflik-konflik sosial.

Data, fakta dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa pasca pemilu tetap mempunyai potensi konflik tinggi. Perdebatan dalam media sosial dan dalam kerumunan masyarakat menunjukkan bahwa situasi sosial masih tetap memanas meskipun pemilu usai di laksanakan. Situasi ini membutuhkan intervensi pemerintah daerah D.I Yogyakarta untuk pencegahan terjadinya konflik sosial.

Persoalan sosial lain yang muncul adalah masyarakat mulai beradaptasi dengan berbagai teknologi informasi dengan kecenderungan gaya hidup individual. Sikap individual, menurunnya relasi sosial, dan apatis masyarakat terhadap jalannya pemerintahan dan lingkungan sosial masyarakat menjadi tumbuh subur, khususnya generasi muda. Generasi anak-anak, remaja dan generasi muda terindikasi tumbuh lebih baik dan cerdas karena dukungan teknologi, akan tetapi mereka mulai kehilangan “etika sosial” dalam bermasyarakat. Persoalan ini bisa memicu kenakalan remaja yang tak terkendalikan jika terjadi pembiaran lebih lanjut.

Persoalan ketertiban, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat menjadi populer karena penegakan perda dan perkada masih belum maksimal. Kesadaran warga masyarakat juga masih kurang untuk mentaatinya. Keresahan masyarakat terhadap kenakalan remaja atau “klithih” msaih juga dirasakan meskipun jauh berkurang.

**REKOMENDASI**

Pasca pemilu legislatif dan presiden pemerintah daerah perlu membangun program resolusi konflik dalam masyarakat, khususnya antar pendukung kubu dalam pemilihan presiden. Resolusi konflik bisa dilakukan dengan penguatan aparatur pemerintah, pembangunan wacana dalam masyarakat ataupun menumbuhkan forum-forum resolusi konflik dalam kelompok masyarakat ataupun komunitas kewargaan. Target atau output yang hendak dicapai adalah pengurangan polarisasi pandangan warga terhadap fanatisme dukungan dan polarisasi ideologi lain yang berkembang. Pembangunan wacana demokrasi menjadi penting dalam pendidikan politik kewargaan untuk meyatukan kembali waca ideologi kebangsaan.

Kebijakan pemerintah daerah DI. Yogyakarta dalam urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka arah strategis kebijakan program dan kegiatan bisa kearah penguatan pengetahuan warga masyarakat mengenai kebijakan ketentraman, ketertiban umum dan pencegahannya. Pemerintah daerah DI. Yogyakarta bisa membangun program kerja tindakan preventif berupa pendidikan politik kewargaan bersama warga masyarakat atau kelompok komunitas yang tersebar di DI. Yogyakarta untuk menangani berbagai penyakit sosial kewargaan.

Pembinaan terhadap generasi anak-anak, remaja dan kelompok kepemudaan menjadi penting untuk berlanjut. Manifestasi program pembinaan tersebut bermanfaat untuk mendorong kesadaran warga dan komunitas agar terus mengawal generasi muda dalam berkehiduan dan kesadaran sosial.

1. **ADAPTASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM BIDANG PEMERINTAHAN**

Perkembangan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan cukup maju pesat. Penggunaan teknologi informasi dalam era REVOLUSI INDUSTRI 4.0 di belahan dunia sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Akses Informasi tidak saja menjadi gaya hidup, akan tetapi telah menjadi kebutuhan masyarakat karena pengetahuan internet telah mengubah pola pikir manusia.

Kecepatan layanan pemerintah menjadi penting dalam konteks tersebut dengan investasi teknologi informasi. Pemerintah daerah D.I Yogyakarta telah melakukan investasi teknologi, bahkan pernah menjadi “pelari terdepan” dalam penggunaan informasi teknologi untuk layanan masyarakat maupun layanan informasi.

Penggunaan informasi teknologi tentu berkaitan dengan pola investasi pemerintah daerah untuk terus berkembang dalam pemberian layanan. D.I Yogyakarta masih dirasa kurang berinvestasi dalam teknologi informasi untuk kecepatan layanan ataupun dalam pemberian aksesbilitas bagi warga atau stakeholders dalam mengawal kebijakan daerah.

**REKOMENDASI**

Pemerintah daerah D.I Yogyakarta memmbutuhkan investasi teknologi infrmasi dalam banyak bidang pemerintah, khusunsya mengenai berbagai data base yang bisa diakses oleh masyarakat ataupun stakeholders. Pembangunan data base digital online, ataupun pengadaan server yang mendukung jalannya data base di lingkungan pemerintah daerah D.I Yogyakarta.

Pengembangan sistem informasi teknologi penting dilakukan untuk mendukung kecepatan layanan, ketepatan layanan, efektivitas dan efisiensi layanan. Di sisi lain, pengembangan sistem teknologi informasi juga mendorong tercapainya kecepatan informas kebijakan publik, transparansi dan akuntabilitas knerja pemerintah.

1. **BIDANG PEMERINTAHAN**

D.I Yogyakarta mempunyai prestasi yang baik dalam bidang pemerintahan. Perolehan WTP sepanjang tahun menunjukkan bahwa administrasi bidang pemerintahan menunjukkan bahwa prestasi yang diraih membanggakan.

Beberapa yang masih kurang dalam bidang pemerintahan adalah kualitas tata kelola pemerintahan seperti pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah dan meratanya layanan publik oleh aparatur daerah, khususnya Organisasi Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan,maka perlu optimalisasi terhadap beberapa hal seperti

* pengelolaan keuangan daerah
* Kontribusi aset-aset daerah dalam peningkatan Pendapatan Daerah dan
* Peningkatan kualitas layanan public secara merata pada Organisasi Perangkat Daerah.

Layanan pemerintahan desa di D.I Yogyakarta juga perlu mendapat sorotan, dimana pemerintah desa bisa dijadikan ujung tombak layanan. Kelemahan pemerintah desa banyak dibidang layanan masyarakat yang masih lamban. Di sisi lain, pemerintah desa juga masih kurang dalam investasi teknologi informasi untuk memperkuat dan mempercepat layanan pada warga.

**REKOMENDASI**

Untuk mendorong tercapainya tata pemerintahan yang baik dan bisa membangun layanan publik, maka beberapa rekomendasi kebijakan yang bisa diberikan adalah:

* Transparansi keuangan dan kebijakan publik perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah daerah.
* Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan lagi kinerja untuk pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
* Pemerintah daerah harus lebih meningkatkan kredibilitas dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
* Pemberian dukungan kepada pemerintah kabupaten dan desa untuk memperkuat layanan pada warga, khususya desa-desa yang belum mengaplikasikan teknologi informasi untuk pemberian layanan.
* Pemerintah daerah D.I Yogyakarta perlu menginvestasikan layanan informasi ataupun administratif kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan desa untuk bisa menampilkan layanan terintegrasi, khususnya administratif dan data base.

1. **KEBENCANAAN**

Potensi bencana alam lokal di D.I Yogyakarta tetap menjadi ancaman tersendiri. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi Gunung Merapi, dan kekeringan tetap menjadi agenda sepanjang tahun oleh pemerintah daerah D.I Yogyakarta. Meskipun potensi kebencanaan sering terjadi, pemerintah daerah D.I Yogyakarta bersama komunitas masyarakat dan kewargaan telah mampu menanganinya dengan baik. Hal ini terbukti dari kecepatan penanganan bencana alam lokal yang sering terjadi di D.I Yogyakarta.

**REKOMENDASI**

Pemerintah daerah D.I Yogyakarta terus menambah program pendidikan kebencanaan bagi warga, khususnya program desa tanggap bencana. Di sisi lain, pendidikan kebencanaan harus diperluas. Selama ini pendidikan kebencanaan banyak dilaksanakan kepada organisasi pengelola kebencanaan. Kedepan, pendidikan kebencanaan perlu dilakukan kepada organisasi komunitas kewargaan yang tumbuh berkembang untuk membangu solidaritas warga terhadap bencana alam yang terjadi.

1. **PERTANAHAN DAN TATA RUANG**

Kebijakan perluasan tata ruang dan wilayah pembangunan di D.I Yogyakarta, khususnya kawasan selatan-selatan sedang dilakukan. Berbagai perencanaan pembangunan wilayah untuk mendorong keadilan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan ekonmi dilakukan.

Pembangunan bandara internasional NYIA tentu berdampak pada kemajuan infrastruktur pembangunan daerah dengan perubahan-perubahan kawasan ekonomi yang dilakukan terkait investasi daerah. Peruntukan kawasan pembangunan tersebut membutuhkan perubahan kebijakan kawasan, khususnya peralihan lahan dan peruntukan untuk tata ruangnya.

Persoalan yang muncul adalah perubahan kawasan tersebut bisa saja berpengaruh pada perubahan peruntukan kawasan, khususnya perubahan lahan produktif untuk ketahanan pangan dan area konservasi untuk peruntukan lainnya.

Kawasan ketahanan pangan bisa tergangu jika tidak ada konsep perlindungan dan konservasi di dalamnya.

**REKOMENDASI**

Kebijakan tata ruang dan wilayah menyangkut pertanahan hendaknya dilakukan dengan arif dan bijaksana. Meskipun perubahan peruntukan lahan tidak bisa dihindari dengan adanya pembangunan infrastruktur wilayah, prinsip-prinsip dasar perlindungan tanah-tanah produktif untuk ketahanan pangan tetap dilindungi dan ditetapkan sebagai jalur hijau.

Pemerintah daerah D.I Yogyakarta perlu menetapkan area-area konservasi, khususnya konservasi tanah dan air sebagai bentuk perlindungan program ketahanan pangan serta konservasi tanah dan air.

1. **KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA**

Urusan Keistimewaan Yogyakarta menjadi penting karena menjadi amanat UU No 13 Tahun 2012, dimana masih banyak regulasi yang belum terselesaikan untuk mempercepat program-program Keistimewaan Yogyakarta atau otonomi khusus sehingga masih menyisakan beberapa persoalan kebijakan yang mendukung terlaksananya program-program Keistimewaan Yogyakarta.

Persoalan lain yang muncul adalah kritik warga terhadap jalannya program dan kegatan dalam koridor Keistimewaan Yogyakarta. Warga banyak menilai bahwa program dan kegiatan masih belum tepat sasaran, dimana konstruksi program dan kegiatan Keistimewaan Yogyakarta masih banyak pada infrastruktur kebudayaan dibandingkan dengan pembangunan nilai-nilai Keistimewaan Yogyakarta. Sisi lain yang diwacanakan adalah salah satu tujuan Keistimewaan Yogyakarta dalam meningkatkan derajat kesejahteraan warga.

Proses penyusunan program dan kegiatan Keistimewaan Yogyakarta masih belum maksimal, dimana bentuk perencanaan program dan kegiatan perlu didukung oleh banyak pihak dan sumberdaya aparatur yang menguasai bidang Keistimewaan Yogyakarta.

**REKOMENDASI**

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan otonomi khusus, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 arah kebijakan adalah Penguatan regulasi pendukung urusan-urusan keistimewaan DI Yogyakarta bisa terselesaikan.

Pembangunan keistimewaan di Daerah Istimewa disusun Dengan berlandaskan semangat keistimewaan yang meliputi Sangkan Paraning Dumadi, Hamemayuning Bawana, Manunggaling Kawulo Gusti. Semangat keistimewaan tersebut memaknai beberapa aspek pembangunan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu dalam Pembangunan keistimewaan di Daerah Istimewa perlu berbagai usaha dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Budaya , Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan,Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan dan Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Arah kebijakan untuk Keistimewaan Yogyakarta lebih bersifat pemberdayaan dan pembangunan nilai-nilai budaya D.I Yogyakarta untuk bisa menjadi bagian dari nilai-nilai kehidupan kewargaan, khususnya generasi muda. Di sisi lain, pemerataan capaian program dan kegiatan program Keistimewaan Yogyakarta hendaknya dilihat kembali untuk bisa dinikmati oleh banyak warga ataupun komunitas kewargaan.

Pelaksanaan program Keistimewaan Yogyakarta banyak dinilai cenderung tertutup, mulai dari perencanaan, implementasi program dan kegiatan, hingga output dan outcomenya. Keistimewaan Yogyakarta perlu didukung dengan teknologi informasi untuk mendorong proses transparansi dan akuntabilitasnya. Di sisi lain, penggunaan teknologi informasi dalam mendorong akselerasi program agar tepat sasaran juga dibutuhkan. Pengembangan sumberdaya manusia, khususnya ASN yang menangai semua program dan kegiatan di dalamnya perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

**Bidang Ekonomi**

**Urusan Pertanian:**

Realisasi sub sektor tanaman pangan di DIY pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 102.649 ton (-4,44%) dibandingkan tahun 2017. Produksi GKG padi total turun dari tahun 2017 sebesar 19.580 ton (-2,22%). Penurunan dipengaruhi oleh produksi padi sawah yang mengalami penurunan luas panen sebesar 6.431 ha (-5,62%). Produksi kacang hijau mengalami penurunan sebesar 57 ton (-18,94%) dikarenakan penurunan produktivitas dan penurunan luas panen. Produksi ubi kayu mengalami penurunan 120.175 ton (-11,72%), ubi jalar mengalami penurunan 1.559 ton (-29,48%), dan sorghum mengalami penurunan sebesar 8 ton (-25,81%) dikarenakan penurunan luas panen.

Realisasi produksi perkebunan tahun 2018 hanya tercapai sebesar 66.507,5 ton atau menurun sebesar 7.290,71 ton dibandingkan tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh alih fungsi lahan maupun alih komoditas ke komoditas lain. Selain itu, beberapa komoditas unggulan DIY produksinya mengalami penurunan.

Yang cukup stabil dan cenderung meningkat adalah produksi holtikultura, yaitu 396,406 ton (100,01% dari target tahun 2018). Peningkatan produksi beberapa komoditas unggulan holtikultura di DIY seperti cabe merah sebesar 3.998 ton (13,55%), cabe rawit sebesar 1.295 ton (15,44%) dan bawang merah 454 ton (3,25%) disebabkan oleh penambahan luas areal panen.

Populasi ternak tahun 2018 mengalami penurunan terutama pada komoditas strategis. Penurunan populasi sapi potong dikarenakan jumlah kelahiran tidak sebanding dengan jumlah ternak yang ke luar wilayah DIY. Penurunan populasi sapi potong tahun 2018 sebesar 11.795 ekor atau turun 1,4% dibanding tahun sebelumnya. Demikian juga dengan populasi sapi perah mengalami penurunan sebesar 57 ekor atau 1,4%. Populasi kambing mengalami penurunan sebesar 2.843 ekor atau 0,7%. Populasi domba mengalami penurunan 48.921 ekor atau 25,11% pada tahun 2018. Penurunan populasi kambing dan domba disebabkan karena berkurangnya kelompok pembudidaya kambing lokal yang aktif, selain itu peternak dalam melakukan pencegahan dan penanganan beberapa kasus penyakit yang umum terjadi di ternak kambing sering terlambat sehingga menyebabkan populasi kambing terus menurun. Daging domba merupakan alternatif pengganti daging sapi karena harganya yang relatif lebih murah sehingga mendorong peningkatan permintaan pemotongan domba. Populasi ayam ras petelur mengalami kenaikan sebesar 149.815 ekor atau 4,38%. Populasi ayam ras pedaging sebesar 185.805 ekor atau mengalami peningkatan sebesar 2,78%. Populasi itik sebesar 21.948 ekor atau mengalami penurunan sebesar 4,42% yang disebabkan menurunnya minat peternak untuk membudidayakan itik.

Setiap tahun Pemda DIY mengeluhkan semakin berkurangnya lahan pertanian produktif akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Di sisi lain, ada keterbatasan lahan untuk membuka areal baru. Menyikapi hal tersebut, Pemda DIY diharapkan mau dan mampu mengambil langkah-langkah nyata untuk menyelamatkan sektor pertanian sebagai andalan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pada periode 2013 – 2017, rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB DIY adalah sebesar 11,88%. Ini berarti bahwa sektor pertanian masih tetap menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi. Stabilitas pertumbuhan produksi pertanian tetap terjaga dengan baik. Akan tetapi, peningkatan produksi tanaman pangan belum memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani itu sendiri. Sumbangsih besar para petani terhadap PDRB DIY sesungguhnya tidak dirasakan langsung oleh mereka. Padahal sektor pertanian adalah sumber pendapatan utama rumah tangga pedesaan. Oleh karena itu, Pemda DIY harus lebih fokus untuk turut meningkatkan pendapatan petani, terutama para petani miskin yang berpendapatan rendah. Sebab kalau tidak, petani dan keluarganya akan tetap miskin. Lebih jauh dari itu, anak-anak petani pasti tidak akan mau mengikuti jejak orang tua mereka untuk menggeluti sektor pertanian. Karena dinilai tidak menjanjikan sebagai sandaran penopang hidup mereka.

Pengembangan agro industri adalah suatu ikhtiar yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk meningkatkan pendapatan petani. Teknologi agro industri pedesaan yang sekarang sudah ada perlu dilakukan peningkatan dan penguatan untuk mengoptimalkan hasilnya. Kepada para petani harus diberikan bantuan sarana produksi yang memadai sesuai dengan kebutuhan mereka.

Ada sejumlah produk makanan olahan yang banyak diproduksi, bahkan menjadi ikon DIY, bahan bakunya belum bisa dicukupi sendiri oleh DIY. Nangka sebagai bahan dasar utama gudeg, kacang hijau sebagai bahan dasar bakpia, singkong sebagai bahan dasar geblek, kripik, serta gatot dan thiwul, dicukupi dengan mendatangkan dari daerah lain. Secara bertahap, bahan-bahan baku seperti di atas mestinya bisa dicukupi sendiri oleh petani DIY. Selain memudahkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku yang sangat dibutuhkan tentu saja juga akan meningkatkan kesejahteraan para petani.

Terkait dengan rendahnya peningkatan populasi ternak, Pemda DIY perlu mendorong kapasitas peternak yang ada dengan meningkatkan serta mengintensifkan peran para penyuluh. Monitoring terhadap KUBE dan Kelompok Ternak harus juga dilakukan secara intensif. Bantuan bibit ternak kepada petani miskin dan rumah-rumah tangga miskin perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan mereka, dan sekaligus dapat ikut meningkatkan produksi ternak. DIY harus juga bisa memiliki sentra-sentra budidaya pakan hijau ternak, agar bisa setiap saat mencukupi kebutuhan pakan ternak. Selain itu perlu dilakukan upaya yang lebih baik lagi dalam menanggulangi penyakit A1 pada ternak unggas.

**Rekomendasi Kebijakan**

Terkait dengan beberapa hal di atas, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemda DIY, yaitu:

1. a. Menyikapi semakin terbatasnya lahan pertanian produktif, maka

sudah saatnya Pemda DIY untuk merencanakan pembukaan areal baru, yang prioritas penggarapannya diberikan kepada keluarga tani miskin dan tenaga kerja muda yang berminat untuk menjadi petani;

b. Untuk mencegah atau menekan peralihan fungsi lahan pertanian

pangan berkelanjutan, Pemda DIY diminta untuk berani mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, maka alih fungsi lahan akan terus berlangsung dengan cepat;

1. Pemda DIY harus melakukan berbagai upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Sebab kesejahteraan akan berdampak pada peningkatan produktivitas;
2. Guna memberikan nilai tambah pada produk olahan hasil pertanian, Pemda DIY harus terus mendorong dan memfasilitasi para petani untuk berani melakukan inovasi;
3. Pemda DIY mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan populasi ternak, terutama untuk mencukupi kebutuhan masyarakat DIY sendiri.

**Pokok-Pokok Pikiran Urusan Pertanian**

| **NO** | **IDENTIFIKASI PERSOALAN** | **POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian belum berjalan efektif | Memberikan insentif pada pemilik hewan |
| 2 | Peningkatan produksi tanaman pangan belum berimplikasi pada kesejahteraan petani | Meningkatkan jiwa kewirausahaan petani dalam merespon permintaan dan peluang pasar |
| 3 | Banyak komoditas penting belum bisa dicukupi sendiri oleh DIY | Membuat sentra-sentra pengembangan komoditas pendukung industri pangan khas DIY (nangka, singkong, kacang hijau dan kedelai) |
| 4 | Peningkatan populasi ternak masih rendah | * Memberikan bantuan ternak kepada rumah tangga miskin * Membuat sentra-sentra budidaya pakan hijau ternak |
| 5 | Meningkatkan pemasaran hasil pertanian yang langsung bisa aksesseble terhadap konsumen | Memberikan bantuan ternak kepada rumah tangga miskin dan membuat sentra-sentra budidaya pakan hijau ternak |
| 6 | Minimnya database hasil pertanian produktif | * Mendidik petani muda untuk aksesseble terhadap teknologi informasi pemasaran dan mendorong penggunaan teknologi *start up* untuk petani lokal D.I. Yogyakarta * Membuat sisitem data base lahan pertanian produktif dan hasilnya untuk perlindungan terhadap lahan pertanian |

* **Urusan Pangan**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan individu. Kondisi tersebut tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat setempat.

Pemda DIY dituntut untuk senantiasa mampu mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh warga masyarakat, terutama golongan miskin, dengan bertumpu pada pemenuhan sumber daya pangan lokal yang beragam melalui skema kearifan lokal.

Masyarakat dan para pelaku pengolahan pangan harus diberikan sosialisasi dan edukasi tentang pangan yang bermutu dan aman, serta proses pengolahan pangan yang baik dan benar. Pemda DIY juga harus selalu melakukan pengawasan secara intensif terhadap peredaran makanan, terutama di lingkungan sekolah dan pemukiman, melalui kerjasama dengan Balai POM dan instansi lain yang terkait. Ke depan, perlu dibuat perangkat hukum yang memungkinkan dilakukan penindakan terhadap pelanggar.

Wilayah (desa) rawan pangan di DIY harus dapat segera diselesaikan, seiring dengan pelaksanaan kegiatan pengentasan kemiskinan. Ketersediaan dan distribusi pangan harus dijamin secara merata. Selain itu tentu saja konsumsi pangan yang memenuhi kaidah B2SA (beragam, bergizi, seimbang, dan aman). Upaya sungguh-sungguh untuk mengentaskan desa rawan pangan akan berimplikasi positif pada pengurangan jumlah penderita gizi buruk dan gizi kurang yang saat ini angkanya masih cukup tinggi.

Pembangunan ketahanan pangan membutuhkan kelembagaan yang mantap dan didukung oleh SDM yang handal. Upaya pengembangan SDM perlu lebih dioptimalkan. SDM berperan sangat penting dan menentukan dalam pengelolaan dan dukungan pelaksanaan program/kegiatan kelembagaan ketahanan pangan. Keberadaan penyuluh dan program penyuluhan yang baik akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan.

**Rekomendasi Kebijakan**

Sesungguhnya DIY memiliki wilayah yang tidak terlalu luas, mudah dijangkau untuk melakukan distribusi pangan sampai ke rumah-rumah tangga. Persediaan cadangan pangan pun cukup. Sehingga mestinya bisa mengatasi masalah rawan pangan.

Ada beberapa kebijakan yang direkomendasikan yaitu:

1. Pemda DIY perlu lebih bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan kasus rawan pangan, karena berdampak langsung pada derajat kesehatan masyarakat, terutama gizi buruk.
2. Pemda DIY perlu menginisiasi lahirnya Peraturan Gubernur tentang Pengawasan produksi dan peredaran makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi.
3. Pemda DIY mendorong dan memfasilitasi perkembangan industri pangan berbasis sumber daya lokal.
4. Perlu peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh.

**Pokok-Pokok Pikiran Urusan Ketahanan Pengan**

| **NO** | **IDENTIFIKASI PERSOALAN** | **POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pola konsumsi rumah tangga masih kurang beragam, masih tergantung pada beras dan/ atau terigu | Masyarakat, terutama keluarga miskin, difasilitasi untuk dapat menghasilkan sendiri bahan pangan non beras dan/atau terigu |
| 2 | Di DIY masih ada Desa Rawan Pangan | Meningkatkan pengadaan bahan pangan dan memperlancar distribusi pangan sampai ke seluruh rumah tangga |
| 3 | Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mengkonsumsi dan memproduksi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) masih rendah | * Perlu secara terus menerus dilakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, dengan melibatkan lembaga-lembaga lain yang memiliki akses langsung ke masyarakat * Tingkatkan pengawasan terhadap peredaran pangan yang tidak aman dan membahayakan kesehatan terutama di lingkungan pendidikan anak |

* **Urusan Kelautan dan Perikanan**

Harus diakui bahwa produksi perikanan budidaya terus meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi peningkatan tersebut tetap belum mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan untuk masyarakat DIY. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Hal lain tentu saja harus terus diupayakan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya, dengan mendorong peningkatan kemampuan petani ikan, memperluas lahan, pengadaan benih yang berkualitas, dan penyediaan pakan dengan harga yang terjangkau.

Selain memperluas lahan budidaya ikan di kolam, perlu juga dilakukan optimalisasi budidaya ikan di tambak, sawah, jaring apung dan telaga. DIY memiliki potensi yang cukup baik untuk peningkatan produksi perikanan budidaya.

Di sisi lain, produksi perikanan tangkap seringkali mengalami fluktuasi. Selain karena masalah alam (cuaca), juga dipengaruhi oleh terbatasnya kemampuan nelayan untuk mengoperasikan kapal ikan bernotase besar. Oleh karena itu, para nelayan kita harus terus ditingkatkan kapasitasnya. Keberadaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng harus dioptimalkan. Dan secara bertahap perlu dilakukan penambahan kapasitas pelabuhan.

Belum semua masyarakat DIY menyadari bahwa ikan adalah salah satu sumber gizi yang baik untuk pertumbuhan. Oleh karena itu perlu sosialisasi dan promosi harus terus digalakkan pada masyarakat luas. Output yang diharapkan adalah bahwa masyarakat DIY semakin gemar mengkonsumsi ikan.

**REKOMENDASI**

Kemampuan nelayan di DIY umumnya dapat dikatakan masih nelayan pantai, belum nelayan samudera. Kemampuan untuk menangkap ikan baru di sekitar wilayah pantai, belum berani menjelajahi laut lepas. Hal ini menyebabkan tidak dapat memaksimalkan hasil tangkapan. Di sisi lain, nelayan DIY belum mampu secara mandiri untuk mengoperasionalkan kapal dengan bobot 30 GT ke atas.

Potensi perikanan budidaya pun belum bisa dioptimalkan oleh para petani ikan kita, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Terhadap Urusan Kelautan dan Perikanan, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang diusulkan, yaitu:

1. Pemda DIY harus terus mendorong dan memfasilitasi peningkatan kapasitas nelayan.
2. Potensi perikanan budidaya harus terus dioptimalkan, termasuk melakukan revitalisasi dan penambahan areal tambak udang di wilayah pesisir.
3. Mempercepat beroperasinya Pelabuhan Tanjung Adikarto, dan lebih mengoptimalkan kapasitas Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng.

**Pokok-pokok Pikiran Urusan Kelautan dan Perikanan**

| **NO** | **IDENTIFIKASI PERSOALAN** | **POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pengembangan perikanan budidaya belum dilakukan secara optimal | * Untuk meningkatkan produksi ikan budidaya, maka harus diperluas arealnya. Potensi sawah, tambak, jaring apung, dan tenaga harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai tempat pembudidayaan ikan * Lahan tambak udang puluhan hektar yang tergusur oleh area bandara di Kulonprogo harus segera dicarikan alternatif tempat yang leibh luas dan strategis |
| 2. | Banyak masyarakat yang belum mengerti manfaat ikan untuk pemenuhan gizi | * Sosialisasi Gemar Makan Ikan harus terus digalakkan di tengah-tengah masyarakat. Jalur pendidikan harus dapat dimanfaatkan dengan baik, dengan jalan sosialisasi kepada para siswa di sekolah-sekolah. Bagi sekolah yang memiliki halaman yang cukup, dapat djuga dimanfaatkan untuk pembuatan kolam ikan. |

* **Urusan Kehutanan:**

Hutan yang lestari adalah sebuah kebutuhan, karena sangat penting dalam menjaga kondisi fungsi hidrologis wilayah dan mendukung keberlangsungan hidup ekosistem yang berkelanjutan. Pengelolaan hutan harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi yang terintegrasi. Pendekatan lingkungan adalah bagaimana hutan tetap terjaga fungsi ekologisnya, dengan terus melakukan rehabilitas hutan dan lahan di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan. Sementara pendekatan sosial budaya adalah bagaimana dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan, yaitu memberikan fasilitasi untuk dapat melakukan tanaman tumpang sari di kawasan hutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Masyarakat diberi tanggungjawab untuk ikut mengamankan hutan. Sedangkan pendekatan ekonomi adalah bagaimana membuat program dan kegiatan yang dapat terus meningkatkan produksi hasil hutan.

Hutan harus terus berkembang dan dinamis dengan flora dan fauna yang lebih variatif, serta fasilitas pendukung yang memadai untuk optimalisasi fungsi hutan dalam perbaikan kualitas lingkungan, kebersihan udara, kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Hutan dapat dikatakan memenuhi fungsi ekologis ideal bagi kehidupan apabila mencapai minimal seluas 30% dari keseluruhan luas suatu wilayah. Menurut data tahun 2018, luas hutan di DIY sudah mencapai 30,61% (97.534,22 ha) dari luas wilayah DIY (3.185,80 km). Kalau dilihat dari persentase tersebut, maka hutan di DIY sudah cukup memenuhi fungsi ekologis ideal. Akan tetapi jumlah keluasan tersebut masih belum stabil karena masih didominasi oleh hutan rakyat seluas 78.400,27 ha. Hutan negara hanya seluas 19.133,95 ha. Dikatakan belum stabil karena keluasan hutan rakyat bisa saja berkurang karena alih fungsi dan dilakukan penebangan oleh pemilik lahan sehingga untuk dapat terus menjaga fungsi ekologi ideal hutan, maka dapat ditempuh dengan 3 cara, yaitu: (1) Menunjuk kawasan hutan baru; untuk memperluas kawasan hutan, khususnya hutan dalam fungsi konservasi; (2) Memperbanyak areal hutan konservasi perkotaan dengan tujuan untuk membangun kawasan hijau perkotaan dan menciptakan udara bersih; (3) Meningkatkan pendampingan dan pembinaan kepada pemilik lahan yang sekaligus pengelola hutan rakyat.

Dengan semakin banyak dan bervariasinya kendaraan yang selama 24 jam hilir mudik di jalanan, otomatis berpengaruh pada kebersihan udara di wilayah kita. Maka hutan taman kota harus terus diperluas dalam rangka meningkatkan kualitas udara yang lebih baik dan menjaga keseimbangan lingkungan.

**REKOMENDASI**

Upaya peningkatan produksi hasil hutan negara dalam beberapa tahun terakhir gagal mencapai target akibat minimnya hasil sadapan getah pinus dan tidak optimalnya kapasitas giling pabrik minyak kayu putih. Bahkan tenaga ahli kehutanan merekomendasikan untuk dihentikannya penyadapan getah pinus, guna menjaga kelestarian. Yang lumayan ada peningkatan adalah produksi kayu. Itupun tidak semuanya merupakan hasil tebangan terencana, karena sebagiannya merupakan kayu hasil sitaan barang bukti dan kayu roboh akibat bencana alam.

Rekomendasi kebijakan untuk Urusan Kehutanan adalah:

1. Mempertahankan lahan hutan konservasi;
2. Hendaknya tetap dijaga secara proporsional antara pendekatan lingkungan, sosial budaya dan ekonomi dalam pengelolaan hutan;
3. Rehabilitasi lahan kritis harus menjadi prioritas penanganan, dengan melibatkan masyarakat sekitar;
4. Guna meningkatkan produksi hasil hutan, peremajaan pohon pinus adalah suatu yang harus dilakukan. Demikian juga dengan penambahan tegakan kayu putih di lahan kosong antara tegakan yang sudah ada pada areal lahan yang telah ditentukan;
5. Membangun dan memperluas area konservasi.

**Pokok-pokok Pikiran Urusan Kehutanan**

| **NO** | **IDENTIFIKASI PERSOALAN** | **POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Produksi minyak kayu putih menurun | Untuk menjaga peran produk minyak kayu putih sebagai penyumbang PAD yang signifikan, maka harus terus dilakukan pengkayaan tegakan/populasi dan perluasan areal tanaman kayu putih produktif. |
| 2. | Pengelolaan hutan negara belum dilakukan secara optimal | Selain pinus, jati, dan kayu putih yang saat ini mendominasi populasi hutan negara, Pemda DIY perlu mempertimbangkan untuk menanam komoditas tanaman hutan lainnya, yang cepat tumbuh dan berproduksi, dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan keseimbangan lingkungan |
| 3. | Masyarakat sekitar hutan masih banyak yang belum sejahtera | Masyarakat sekitar hutan yang masih berpendapatan rendah, diberi akses untuk memanfaatkan hutan guna memperbaiki taraf hidup mereka. Mereka diperbolehkan untuk bercocok tanam dengan tetap menjaga kelestarian hutan, sekaligus menjamin keamanan hutan dari tindakan pengrusakan maupun pencurian. |
| 4. | Area hutan konservasi makin berkurang | Mempertahankan dan menambah luasan hutan konservasi |

1. **URUSAN KOPERASI , USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**Permasalahan:**

Koperasi dan UKM merupakan penggerak perekonomian utama di DIY. Menurut data BPS berdasarkan Sensus Ekonomi 2016 sekitar 98, 4% dari usaha atau perusahaan di DIY adalah berskala mikro dan kecil.

Namun minat masyarakat terhadap koperasi sangat rendah karena koperasi kurang dapat bersaing dengan pelaku usaha nonkoperasi. Sementara bagi masyarakat yang sudah bergabung di koperasi baik sebagai anggota bahkan para pengurus maupun pengawas kurang berpartispasi aktif dalam mengembangkan koperasi. Kapasitas dan kompetensi para pengurus dan pengelolanya pun masih rendah akibatnya banyak koperasi yang kurang berkembang dan tidak aktif.

Jumlah usaha mikro dan kecil memang meningkat namun skala Usaha menengah dan besar masih sedikit dan itu pun masih terkonsentrasi di Kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman. Sedikitnya usaha skala menengah ini dikarenakan kualitas SDM yang masih rendah, jaringan pemasaran yang kurang luas serta ketersediaan factor produksi yang masih terbatas seperti modal dan ketersediaan bahan baku.

Program yang dilakukan pemerintah DIY cukup berhasil dalam meningkatkan omzet koperasi dan UKM, namun demikian pembinaan SDM harus lebih ditingkatkan mengingat tantangan semakin besar. Keterbukaan ekonomi, perkembangan teknologi serta revolusi industry 4.0 membuat koperasi dan UKM harus memiliki inovasi dan daya saing.

Penumbuhan dan pengembangan Wirausaha Baru (WUB) perlu mendapat perhatian serius. Pertumbuhan WUB menjadi hal penting karena dapat mengurangi pengangguran, menyerap tenaga kerja baru dan menaikkan pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan. Namun pertumbuhan WUB perlu ditingkatkan lagi karena rasionya masih sangat kecil.

**REKOMENDASI**

Penumbuhan dan pengembangan koperasi perlu didorong pada sektor riil karena dapat mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal.

Sementara untuk sektor UKM diperlukan pendampingan, fasilitasi jejaring kemitraan dengan harapan dapat memperluas akses pemasaran dan meningkatkan kapasitas pelaku UKM.

Para pengelola koperasi dan UKM perlu ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya agar mampu bersaing dan dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan.

Pertumbuhan Wirausaha baru harus terutama dari kalangan muda harus ditingkatkan jumlahnya serta kapasitas usahanya.

1. **URUSAN PENANAMAN MODAL**

Permasalahan:

Pertumbuhan ekonomi di DIY masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga ( PKRT ) yang mencapai 12,15 % bahkan melebihi pertumbuhan PDRB DIY 5,16 %. Pola semacam ini sama dengan yang terjadi di tingkat nasional di mana pola konsumsi sangat dominan. Sementara investasi menduduki peringkat kedua setelah pola konsumsi. Pondasi ekonomi DIY akan lebih kuat apabila digerakkan oleh investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto ( PMTB ) sehingga tidak hanya menggantungkan kepada konsumsi.

Dengan adanya kegiatan penanaman modal maka akan menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru. Secara tidak langsung, kawasan di sekitar lokasi kegiatan investasi diharapkan dapat ikut menikmati dampak adanya kegiatan ekonomi tersebut atau multiflier effect. Di samping itu kegiatan investasi baik PMDN maupun PMA, diharapkan dapat mengutamakan penyerapan tenaga kerja local sehingga mengurangi pengangguran dan kemiskinan di wilayah tersebut.

Dibandingkan dengan daerah lain, DIY masih tertinggal dalam menarik para investor. Hal ini patut mendapat perhatian pemerintah daerah untuk memperhatikan dan meningkatkan pelayanan perizinan sehingga calon investor mempunyai kepastian hukum. Investasi di DIY masih terkonsentrasi di Kota Yogyakarta (42%) dan Kabupaten Sleman (41%). Jika investasi yang merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di kedua wilayah ini, maka ketimpangan antar wilayah akan semakin melebar. Dengan demikian, permasalahan penyebaran investasi ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

**REKOMENDASI**

* 1. Penyusunan rencana induk penanaman modal yang berbasis pada keunggulan potensi local
  2. Pembangunan infrastruktur penanaman modal yang merata terutama di daerah pesisir selatan.
  3. Peningkatan pelayanan perizinan terpadu sehingga tidak ada tumpang tindih antar instansi

1. **URUSAN PARIWISATA**

Permasalahan:

Visi Pariwisata DIY adalah menjadi daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara tahun 2025. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan langkah langkah yang tepat.

Jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata pada tahun 2016 hanya mengalami peningkatan sebesar 7 % jika dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2015 jumlah pengunjung daya tarik wisata (DTW) sebesar 18.435.445 orang, sementara untuk tahun 2016 berhasil mencapai 19.753.145 orang pengunjung. Hal ini menunjukan adanya kemungkinan wisatawan mulai mengalami kejenuhan terhadap daya tarik wisata yang ada. Sementara pertambahan obyek wisata belum sepenuhnya memenuhi permintaan pasar yang semakin luas dan beragam.

Meskipun secara keseluruhan jumlah kunjungan wisatawan di DIY mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari komposisi persentase di kabupaten/kota masih terdapat ketimpangan antar wilayah. Jumlah kunjungan wisatawan di DIY masih terkonsentrasi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Terutama Keraton, Malioboro, Gembira Loka, Taman Pintar dan Candi Prambanan. Di luar kedua daerah tersebut hanya pantai Parang Tritis dan Pantai Baron yang mampu menarik banyak wisatawan.

Akibat dari permasalahan tersebut maka berimbas pada penurunan lama tinggal wisatawan yang menyentuh angka 1,9 hari (hanya weekend saja) sehingga pengeluaran dan belanja wisatawan yang datang ke DIY pun juga sangat kecil yaitu Wisatawan nusantara sebesar Rp 1.910.475 dan Wisatawan manca sebesar US $ 828,23.

**REKOMENDASI**

Pengembangan kepariwisataan di DIY semestinya dikembangkan secara *sustainable tourism development*, dimana dalam pengembangan destinasi baru harus menjaga kelangsungan destinasi yang ada dan membentuk reputasi destinasi yang berkelas dunia untuk menciptakan keunikan dan keunggulan.

Untuk mencapai hal tersebut perlu disiapkan manajemen SDM dan kelembagaan yang memadai melalui pelatihan dan sertifikasi bagi SDM pelaku pariwisata.

Selain itu penataan sistem aksesibilitas dan manajemen transportasi ke lokasi daya tarik wisata (jaringan jalan, area parkir, penataan rute jalur/rute wisata dan angkutan umum) perlu dilakukan untuk mengurangi kemacetan akibat menumpuknya wisatawan yang berkunjung di satu lokasi daya tarik wisata.

Pengembangan pariwisata juga mengedepankan aspek pemberdayaan berbasiskan komunitas salah satunya adalah dengan pendekatan berbasiskan desa wisata. Pengembangan desa wisata disamping sebagai upaya pemberdayaan masyarakat lokal juga diharapkan dapat mendorong pelestarian lingkungan dan tradisi budaya lokal.

1. **URUSAN PERDAGANGAN**

Permasalahan:

Sektor perdagangan merupakan sektor dominan pendorong pertumbuhan ekonomi di DIY. Perkembangan sektor perdagangan tidak terlepas dari dukungan sektor ekonomi lainnya serta dukungan infrastruktur berupa sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan sektor perdagangan seperti pergudangan, pasar modern, pasar tradisional dan lainnya. Sektor perdagangan terbagi dalam perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri.

Perkembangan di sektor perdagangan dalam negeri dapat dilihat dari banyaknya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP Dilihat dari klasifikasinya, usaha perdagangan di DIY didominasi oleh golongan pengusaha kecil sebesar 87, 01%.

Perkembangan sektor perdagangan DIY juga didukung dengan tersedianya sarana perdagangan seperti toko modern dan pasar tradisional. Perkembangan sarana perdagangan tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah toko modern hingga tahun 2016 sejumlah 777 unit, sementara jumlah pasar tradisional sebanyak 349 unit. Peningkatan jumlah toko modern yang lebih pesat dibandingkan dengan pasar tradisional ini perlu menjadi perhatian.

Perkembangan perdagangan luar negeri di DIY dapat dilihat dari kegiatan ekspor. Nilai ekspor DIY meningkat 338, 02 juta US$. Peningkatan ekspor DIY terutama didukung oleh komoditas utama ekspor yaitu produk pakaian jadi, tekstil, mebel kayu, sarung tangan kulit dan minyak atsiri. Tujuan ekspor komoditas DIY terutama pada Jerman, diikuti oleh Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Belanda. Namun Infrastruktur ekspor ini masih terbatas karena hanya melalui transportasi udara saja.

**REKOMENDASI**

Pasar tradisional merupakan pusat ekonomi rakyat yang menjadi penyangga perekonomian nasional, sehingga diperlukan peningkatan kelembagaan, kapasitas pelaku usaha dan sarana prasarana penunjang di pasar-pasar tradisional agar pasar tradisional memiliki daya saing dan tetap terjaga eksistensinya.

Persaingan usaha sector perdagangan ini sangat kompetitif apabila tidak terkelola dengan baik akan memarjinalisasi pelaku usaha kecil, untuk itu Pemerintah Daerah dituntut mampu melindungi pelaku usaha kecil ini.

1. **URUSAN PERINDUSTRIAN**

Permasalahan:

Industri pengolahan skala IKM menghadapi permasalahan daya saing produk dari sisi kualitas, perubahan selera konsumen serta persaingan harga dengan produk import. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan industri yang hanya mencapai 5,12 % atau lebih kecil dari pertumbuhan PDRB yang mencapai 6,20 %. Untuk meningkatkan daya saing ini tidak dapat mengharapkan dari kekayaan alam yang terbatas.

Memang kondisi makroekonomi yang kondusif akan menciptakan potensi daya saing, namun itu belum cukup. Produktivitas sangat tergantung pada perbaikan kemampuan mikroekonomi dan tingkat persaingan lokal.

Sementara untuk IKM Industri Kreatif di DIY selama kurun waktu 2012 – 2016 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Jumlah IKM Industri Kreatif pada tahun 2016 sebesar 40.162 unit usaha. Jumlah IKM Industri Kreatif tercatat mendominasi sebesar 44,18% dari jumlah total IKM di DIY. Keberadaan sektor industri kreatif dipandang mampu memberi solusi penciptaan sisi pembeda yang membuat DIY memiliki nilai tawar lebih dibanding daerah lain untuk menutupi permasalahan keterbatasan lahan dan modal yang dialami DIY. Secara lebih luas, potensi ekonomi kreatif di DIY tidak hanya didukung oleh sektor industri pengolahan namun juga mencakup sektor lain seperti kuliner, musik, arsitektur, seni pertunjukan, seni rupa dan lainnya.

**REKOMENDASI**

Untuk dapat bersaing dengan industri luar, produk-produk DIY harus memiliki nilai tambah yang lebih dari pesaingnya.

Sektor industri pengolahan sebagai sektor yang dominan di DIY dan didukung oleh potensi sumber daya manusia yang memadai dan kekayaan warisan budaya yang istimewa diharapkan dapat membuka peluang industri pengolahan berbasis keistimewaan seperti kerajinan, batik, serta cinderamata khas DIY.

Dukungan komunitas intelektual di DIY diharapkan akan membuka peluang inovasi produk dan variasi industri pengolahan yang lebih besar dengan memaksimalkan sektor industri kreatif.

**BIDANG PEMBANGUNAN**

* 1. **URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam pembangunan. Jaringan jalan yang memadai dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap suatu daerah dan melancarkan mobilitas manusia dan barang yang pada akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi adalah satu-satunya penggerak terpenting bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini juga berlaku untuk Daerah istimewa yogyakarta dan juga bagi banyak daerah lain.

Kajian penting yang dilakukan beberapa ahli dalam penelitianya tentang pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada penduduk miskin, berupa studi kasus mengenai pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah, menghasilkan pesan yang sama: pertumbuhan ekonomi penting bagi penanggulangan kemiskinan. Namun, pertumbuhan dapat menjadi lebih atau kurang berpihak pada penduduk miskin. Pertumbuhan dapat menciptakan ketimpangan yang tajam, yang dapat mengoyak keutuhan masyarakat. Sebaliknya, pertumbuhan juga dapat menghasilkan pemerataan, yang membantu terintegrasinya masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan.

Ada dua jalan utama bagi rumah tangga dan individu di Indonesia untuk dapat terlepas dari belenggu kemiskinan pada masa belakangan ini yaitu perbaikan produktivitas pertanian di daerah pedesaan; dan peningkatan produktivitas nonpertanian. Sebagian besar individu yang telah terlepas dari kemiskinan dalam sepuluh tahun belakangan ini mengikuti salah satu dari kedua jalan tersebut di atas.Namun, transformasi struktural yang terjadi di Indonesia juga memainkan peranan penting, yakni dengan berpindahnya orang dari kegiatan pertanian ke kegiatan nonpertanian bersamaan dengan berlangsungnya proses urbanisasi secara pesat di sejumlah daerah pedesaan. Pertanyaannya adalah: kebijakan apa yang dapat membantu penduduk miskin menempuh kedua jalan tersebut? Bagaimanakah kebijakan dapat menolong penduduk miskin untuk menemukan dan tetap berada di jalan keluar dari kemiskinan? Meskipun jawabannya jelas tergantung pada sektor dan lokasi, dibutuhkan tiga tipe kebijakan yang saling terkait.

**Permasalahan:**

**Pertama**, pentingnya stabilitas ekonomi makro dipelihara. Perjuangan berat Indonesia untuk dapat pulih dari krisis ekonomi tahun 1998 difokuskan pada upaya pemulihan kepercayaan terhadap manajemen ekonomi makro. Ini adalah fokus yang tepat. Kestabilan ekonomi makro adalah batu pijakan bagi keberhasilan perekonomian dan penanggulangan kemiskinan. Krisis ekonomi tidak hanya menyebabkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang merosot, tetapi juga membuat penduduk miskin paling terpukul. Agar laju pengurangan angka kemiskinan dapat dipertahankan, diperlukan lingkungan ekonomi makro yang stabil dan kondusif.

**Kedua**, perlunya investasi untuk meningkatkan kemampuan penduduk miskin. khususnya yang ada di daerah perkotaan, memang miskin terutama karena mereka berpenghasilan rendah (bukan karena mereka menganggur). Pendapatan mereka rendah karena produktivitas pekerjaan yang mereka lakukan juga rendah, yang antara lain disebabkan sumber daya manusia yang sangat rendah. Peningkatan pendidikan untuk generasi mendatang dan pelatihan kerja untuk generasi saat ini sangatlah penting agar penduduk miskin dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Pada saat yang sama, bagi penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan dan yang sebagian besar penghasilannya berasal dari sektor pertanian, yang lebih penting adalah pengetahuan yang tepat mengenai bagaimana memacu peningkatan produktivitas pertanian. Ini membutuhkan investasi yang besar di bidang penelitian pertanian dan pembangunan kembali layanan penyuluhan pertanian yang efektif.

**Ketiga,** perlunya upaya menghubungkan penduduk miskin dengan berbagai peluang. Penduduk miskin di daerah pedesaan bukan hanya tidak memiliki kemampuan; mereka juga tidak memiliki sarana untuk terhubung dengan pertumbuhan. Kadang-kadang kaitan yang hilang itu bersifat fisik. Sebagai contoh, akses ke pasar di banyak daerah pedesaan terkendala oleh kualitas jalan yang buruk di tingkat kabupaten dan kecamatan. Akan tetapi, bentuk-bentuk kaitan yang lain juga berpengaruh: rumah tangga miskin lebih sulit untuk memperoleh kredit, antara lain karena mereka tidak mempunyai jaminan; dan penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami kesulitan untuk mengakses pasar tenaga kerja karena aturan perburuhan yang kurang memberi kesempatan untuk mempekerjakan para pekerja yang kurang trampil.

**Keempat, Hubungan Antara Kemiskinan dan Ketersediaan Infrastruktur**

Komponen sarana dan prasarana wilayah terdapat empat golongan yaitu prasarana transportasi, prasarana energi dan komunikasi, serta prasarana kesehatan. Tiga komponen tersebut merupakan modal fisik pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Banyak penelitian yang menyebutkan peranan sarana prasarana penting dalam perekonomian. Upaya pembenahan kondisi infrastruktur disadari berperan penting dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan dampak jangka panjangnya bagi PDB perkapita.

**Kelima, Infrastruktur Jalan**

Kawasan JLS berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan masyarakat di Pedesaan Kawasan Jalan Lintas Selatan dalam model. Variabel jalan memiliki slope positive, sehingga semakin besar luas jalan yang beraspal di Pedesaan Kawasan JLS, maka peluang masyarakat untuk tidak miskin di kawasan tersebut semakin besar. Hal ini diduga karena masyarakat yang tinggal di kawasan yang mudah akan akses jalan, lebih mudah untuk mencapai ke pusat perekonomian atau pusat-pusat keramaian sehingga lebih mudah dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Selain itu, akses jalan yang mudah akan memperlancar jalanya produktifitas barang dan jasa, sehingga akan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Keenam, Ketersediaan Air Bersih**

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang memang harus terpenuhi oleh seluruh masyarakat baik miskin ataupun tidak miskin sehingga kemudahan akses untuk mendapatkan air bersih sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Problematika di pedesaan adalah masyarakat desa sering kali masih terpaku terhadap penggunaan sumber mata air. Sehingga, seringkali satu sumur dapat dipakai oleh 2 atau lebih rumah tangga di pedesaan. Hal ini dilakukan agar biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat akan akses air dapat dibagi rata. Selain itu, masyarakat desa masih cenderung menggunakan air sungai untuk mencuci pakaian mereka, dimana penggunaan air tersebut akan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas kesehatan masyarakat.

**Ketujuh, Ketersediaan Listrik.**

Hal ini diduga karena listrik merupakan kebutuhan dasar yang wajib terpenuhi, karena seluruh alat yang digunakan untuk membantu kinerja manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari memerlukan energi litrik. Dimulai dari hal yang paling dasar yaitu sebagai sumber penerangan di malam hari, sampai hal besar seperti industri yang membutuhkan energi listrik untuk mengoperasikan alat-alat beratnya. Masyarakat atau rumah tangga yang tidak/belum menggunakan listrik, sudah dipastikan bahwa mereka adalah masyarakat yang benar-benar miskin atau terbelakang, sehingga listrik sangat berhubungat erat dengan dimensi kemiskinan. Penggunaan listrik dapat mengurangi pengeluaran masyarakat, hal ini dikarenakan penggunaan energi listrik lebih terjangkau untuk sumber penerangan dibandingkan dengan minyak bumi yang semakin langka dan semakin mahal.

**Kedelapan, Pelayanan Kesehatan.**

Kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan yang telah didukung penuh oleh pemerintah. Hal ini terbukti bahwa hampir seluruh rumah tangga masyarakat desa di Kawassan Selatan telah memperoleh bantuan kartu jamkesmas. Adalah merupakan faktor positif dalam menguangi angka kemiskinan secara significant.

**Kesembilan, Pendidikan.**

Mudahnya ketersediaan akses terhadap jenjang pendidikan formal di desa akan menjamin pemerataan pendidikan yang secara langsung akan meningkatkan kwalitas manusia serta menjamin ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai. Hal ini terbukti bahwa rata-rata tiap desa Kawasan Daerah istimewa yogyakarta telah memiliki 5 unit pendidikan formal, serta diperkuat oleh deskriptif data bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendikan yang paling dominan di Pedesaan.

**Pokok-pokok Pikiran Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

| URUSAN | IDENTIFIKASI PERSOALAN | POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD |
| --- | --- | --- |
| Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1. Adanya ketidakseimbangan aksesibilitas wilayah wilayah perbatasan terutama perbatasan antara DIY Dengan Jawatengah di Kabupaten Gunungkidul Dengan kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten serta Kabupaten Sukoharjo yang pada umumnya kondisi jalan dalam keadaan rusak sedang sampai berat, oleh sebab itu perlu perhatian khusus akan kondisi tersebut walaupun status jalan kebanyakan merupakan jalan kabupaten. 2. Aksesibilitas penduduk terhadap ketersediaan air minum yang cukup dirasa masih jauh dari mencukupi. fakta menunjukkan bahwa banyak daerah daerah yang masih saja mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan air bersih sebagai sarana kehidupan dasar, 3. Belum sepenuhnya masyarakat perkotaan maupun pelosok pedesaan yang katagori miskin mendapatkan akses secara penuh terhadap kebutuhan akan air minum yang layak, karena keterbatasan kesediaan air baku baru untuk mendukung PDAM ataupun SPAMDES 4. Pengendalian , pengawasan serta penertiban pemanfaatan bagian- bagian jalan provinsi belum secara optimal. 5. Belum terpenuhinya target untuk penambahan secara kwantitatif maupun kwalitatif terhadap produk air baku baru, hal ini terkendala masalah kewenangan. 6. Di bidang Jasa Kontruksi masih adanya mutu dan kwalitas kontruksi yang sesuai standart, karena pembinaan yang selama ini dilakukan hanya dilaksanakan oleh Dinas PU ESDM dan belum menjadi tanggung jawab semua pihak. 7. Dalam urusan tata ruang belum tersedianya rencana detail tata ruang (RDTR) serta peraturan Zonasi(PZ) sebagai acuan untuk perijinan serta belum ditetapkanya instrumen untuk pengendalian . 8. Banyaknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang harus digunakan sebagai pedoman atau landasan yuridis, jelas akan menimbulkan ketidak seimbangan baik itu lingkungan sosial, ekonomi maupun nilai nilai kultur dan lain lain. Proses alih fungsi lahan untuk kepentingan hunian atau industri yang terjadi secara masif perlu segera di hentikan kalau tidak ingin terjadi gradasi terhadap kwalitas lingkungan 9. Konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi agro ekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani serta turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak baginya. Hal ini akan menyebabkan rawan pangan bagi daerah, cepat atau lambat, akibat semakin terkikisnya lahan pertanian. | 1. peningkatan pelayanan sarana dan prasarana sesuai dengan SPM, antara lain melalui peningkatan aksesibilitas jangkauan pelayanan sarana dan prasarana di daerah terpencil, pedalaman, perbatasan. 2. pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui anggaran pemerintah daerah diarahkan untuk mendukung langkah-langkah stimulasi terhadap perekonomian dari sisi fiskal (pro-growth), memperluas penciptaan lapangan kerja produktif (pro-job), dan mengentaskan kemiskinan (pro-poor). 3. Upaya untuk Peningkatan jalan dan Jembatan serta Rehabilitasi maupun pemeliharaan jalan dan jembatan merupakan hal yang prioritas untuk memberikan akses yang seluas luasnya pada masyarakat sehingga berakibat dapat meningkatkan segi sosial ekonomi. Terutama terfokus pada peningkatan jalan dan jembatan pedesaan. 4. pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, telaga, embung serta sumberdaya air lainya, maupun pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan irigasi lainya serta upaya untuk pengendalian banjir. 5. Pengembangan Sistem Pengelolaan air minum Pedesaan (SPAMDES) terutama bagi daerah daerah yang sering dilanda kekeringan.dalm rangka memperluas penyediaan air baku. 6. Pengelolaan persampahan serta pengelolaan air limbah, terutama untuk limbah rumah tangga. 7. Perencanaa tata ruang dalam rangka untuk pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah RTRW untuk menghindari konversi lahan produktif dalam rangka mencegah gradasi ekosistem dan lain lain. |

* 1. **URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

Keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan Pemerintah melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warganya. Namun disadari bahwa penanggulangan kemiskinan bukan saja tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan tanggungjawab seluruh pemangku kepentingan daerah, oleh karena itu partisipasi masyarakat sipil, kelompok pelaku bisnis, kelompok perempuan, kaum miskin dan marginal adalah sebuah keharusan dalam penanggulangan kemiskinan.

Upaya penanggulangan kemiskinan baik melalui jalur pembangunan sektoral, regional, maupun yang khusus masing-masing mengandung lima pokok perhatian, yaitu pengembangan kualitas manusianya, pengembangan sumberdaya sosialekonomi, pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan sosialekonomi, penguatan kelembagaan pembangunan, dan penguatan dukungan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Program-program pembangunan yang memberikan penekanan pada pendekatan pemberdayaan masyarakat masing-masing memiliki dimensi (ruang masalah) dan matranya (cakupan kewilayahan) sendiri, antara lain mencakup:

1) Program-program penanggulangan kemiskinan. Dimensinya adalah masalah pengurangan penduduk miskin kronis, dan matranya adalah kawasan/daerah seperti daerah kumuh perkotaan, daerah pantai, daerah pedalaman, dan desa tertinggal; dan

2) Program-program jaring pengaman sosial. Dimensinya adalah masalah pengurangan penduduk miskin akibat krisis atau penduduk dengan kemiskinan yang parah, dan matranya adalah kawasan/wilayah daerah seperti daerah kumuh perkotaan, daerah pantai, daerah pedalaman, dan desa tertinggal.

Untuk menanggulangi kemiskinan yang kronis sekarang ini perdebatan tentang konsep dan definisi sudah tidak diperlukan lagi karena hanya menghabiskan energi dan yang paling penting waktu. Rakyat miskin tidak membutuhkan perdebatan konsep yang retorik dan cenderung berhenti dalam wacana. Yang diperlukan sekarang adalah kesepakatan bersama terhadap konsep dan kemudian diimplementasikan. Untuk itu diperlukan penajaman program karena konsep, sarana-prasarana, dan kelembagaan sudah tersedia secara lengkap. Langkahlangkah penyempurnaan tersebut dapat dilakukan dengan cara pertama, penggalian informasi dari masyarakat. Kedua, mengumpulkan pengaduan. Ketiga, dengan melibatkan organisasi masyarakat non-pemerintah atau LSM/KSM yang dinilai lebih tahu tentang kemampuan masyarakat sendiri, dan keempat adanya verifikasi program oleh tim pengendali yang berfungsi untuk penyempurnaan dan penajaman program selanjutnya.

**Pokok-pokok Pikiran Urusan Perencanaan Pembangunan**

| URUSAN | IDENTIFIKASI PERSOALAN | POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD |
| --- | --- | --- |
| Perencanaan Pembangunan | 1. Minimnya sosialisasi rencana penyusunan RKPD kepada masyarakat. 2. Masyarakat menjadi apatis dan enggan terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan daerah karena usulan masyarakat seringkali tidak bisa direalisasikan akibat terjadinya pemotongan/pemangkasan berbagai usulan yang masuk 3. Terjadi perubahan/tambahan kegiatan yang sebelumnya tidak masuk dalam usulan SKPD. 4. Tidak ada koordinasi dan sinkronisasi antara program yang dibiayai dana community development dari perusahaan dengan program yang dibiayai APBD. 5. Sistem perencanaan (E-Planning) belum mengakomodir usulan yang sifatnya politis (dari DPRD). | 1. Perencanaan pembangunan ekonomi. 2. Perencanan penegembangan wilayah. 3. Perencanaan pembangunan pemerintahan. 4. Pengembangan data dan informasi. 5. Perencanaan pembangunan daerah. 6. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. 7. Perencanaan pengembangan wilayah tertinggal. 8. Perencanaan pembangunan ekonomi, serta pengembangan kawasan 9. Kawasan perbatasan 10. Evaluasi implementasi dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD). 11. Evauasi sistem e-planning yang belum terbuka bagi sistem perencanaan dari jalur politis (DPRD) |

* 1. **URUSAN PERUMAHAN**

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi permasalahan penduduk miskin adalah pemenuhan hak dasar penduduk seperti pemenuhan atas pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, air bersih, dan sanitasi serta hak pemenuhan atas perumahan.

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan yang sulit dijangkau oleh masyarakat miskin di Indonesia Maupun secara khusus di daerah istimewa yogyakarta dimana bahwa angka kemiskinan masih diatas rata-rata nasional ( 12,46%)

Secara nasional Diperkirakan sekitar 4,5 juta unit besarnya ketersediaan rumah yang layak huni yang harus dipenuhi secara nasional, disamping meluasnya kawasan kumuh yang dihuni oleh penduduk merupakan permasalahan perumahan yang dihadapi oleh Daerah terutama di kota ko9ta besar seperti jakarta, surabaya dan mungkin juga Yogyakarta.

Sesuai Perda DIY Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah TAHUN 2012–2017, sasaran pembangunan urusan bidang perumahan adalah menurunnya perumahan dan lingkungan yang tidak layak huni yang kinerjanya diukur menggunakan indikator persentase rumah tidak layak huni. Pengurangan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) dilakukan melalui fasilitasi perbaikan kualitas rumah yang diwujudkan dengan bantuan stimulan bahan bangunan kepada masyarakat. Hasil identifikasi awal pada tahun 2012 jumlah rumah yang tergolong rumah tidak layak huni (RTLH) sejumlah 91.200 unit. Hingga tahun 2015 jumlah RTLH yang tersebar di DIY sejumlah 74.491 unit atau setara dengan 7,17%. Dan target sampai dengan 2017 sebesar 6,75%.

**Pokok-pokok Pikiran Urusan Perumahan**

| URUSAN | IDENTIFIKASI PERSOALAN | POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD |
| --- | --- | --- |
| Perumahan | 1. Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah kabupaten dan kota dengan pemerintah daerah Provinsi dalam penanggulangan dan pengembangan wilayah yang berkenaan dengan kawasan kumuh serta kondisi rumah rumah yang tidak layak huni. | 1. Ditingkatkan koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah kabupaten dan kota serta dengan pemerintah pusat untuk bersama sama dalam perumusan arah kebijakan strategis dan pembuatan kesepakatan-kesepakatan, rencana dan program bersama dalam mengatasi permasalahan perumahan kumuh dan rumah yang tidak layak huni. 2. Rehabilitasi perumahan kumuh dan rumah tidak layak huni. 3. Ditargetkan tahun 2019 jumlah rumah tidak layak huni dibawah 6%. |

**4. URUSAN PERHUBUNGAN.**

Transportasi merupakan tolok ukur dalam interaksi keruangan antar wilayah dansangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatuwilayah.

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sistem jaringan transportasi dapat dilihat dari segi efektivitas, dalam arti selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, rendah polusi serta dari segi efisiensi dalam arti beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam satu kesatuan jaringan sistem transportasi.

Kemajuan transportasi akan membawa peningkatan mobilitas manusia, mobilitas faktor-faktor produksi dan mobilitas hasil olahan yang dipasarkan. Makin tinggi mobilitas yang dilakukan maka semakin cepat gerakan distribusi serta lebih singkat waktu yang diperlukan dalam mengolah bahan dan memindahkan nya dari tempat dimana bahan tersebut yang semula kurang bermanfaat ke lokasi dimana manfaatnya lebih besar. Peningkatan produktivitas, karena transportasi ini merupakan motor utama penggerak kemajuan ekonomi. Ekonomi yang berkembang akan ditunjukkan oleh adanya mobilitas yang tinggi, dengan ditunjang transportasi yang memadai dan lancar. Seperti hal nya negara-negara maju, mereka memiliki transportasi yang mendukung dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Dengan transportasi yang baik, akan memudahkan terjadinya interaksi antara penduduk lokal dengan dunia luar. Keterisolasian merupakan masalah pertama yang harus ditangani.Transportasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Kajian transportasi dan perkembangan wilayah memiliki dimensi persoalan dengan rentang yang luas dan kompleks. Oleh karena itu untuk dapat memahami pola kerja transportasi dan aksesibilitas, dituntut untuk memiliki pandangan yang luas tidak hanya pada satu bidang kajian ilmu saja.

Dalam kontek pembangunan Di Daerah istimewa Yogyakarta yang tercover dalam RPJMD tahun 2017-2022 bahwa transportasi direncanakan tidak hanya direncanakan untuk sekedar mendukung pembangunan di DIY akan tetapi lebih dari pada itu bahwa transportasi harus menjadi bagian dari pendidikan budaya dan penegembangan pariwisata Daerah dimana tujuan pembangunan uusan perhubungan tersebut memiliki beberapa indikator antara lain:

1. Penyediaan layanan angkutan Umum.
2. Penerapan Management lalu lintas perkotaan pada kawasan prioritas.
3. Keselamatan Transportasi.
4. Pengembangan Dan pengelolaan simpul transportasi dan perpakiran.

**Pokok-pokok pikiran urusan Perhubungan.**

| URUSAN | IDENTIFIKASI PERSOALAN | POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD |
| --- | --- | --- |
| Perhubungan | 1. Kemacetan . Faktor-foktor penyebab kemacetan lalu lintas antara lain: tidak seimbangnya luas atau kapasitas jalan dengan jumlah kendaraan bermotor, ledakan penduduk, peningkatan penggunaan kendaraan pribadi, rendahnya kualitas angkutan umum, kurangnya disiplin dari para pengguna jalan serta kurangnya penanganan dari pemerintah. 2. Terjadinya polusi udara akibat asap kendaraan bermotor yang sudah tidak laik jalan, terutama angkutan umum yang tidak melakukan uji emisi secara berkala. 3. Sering terjadinya kecelakaan bagi pengguna kendaraan bermotor disebabkan kurangnya sarana dan prasarana perhubungan. 4. Penambahan rute layanan angkutan orang berjalan, khususnya area luar kota yang menghubungkan antar kecamatan dalam skala prioritas | 1. pembangunan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan. 2. Pembangunan Bandara Internasional Di Kulon Progo. 3. rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan. 4. peningkatan pelayanan angkutan . 5. peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. 6. management rekayasa lalu lintas. 7. pengendalian dan pengamanan lalu lintas. 8. pembangunan lampu penenrangan jalan, pagar pengaman jalan serta trafick light pada daerah daerah persimpangan yang padat . 9. pembinaan , pengawasan dan pengendalian transportasi antar kota antar propinsi maupun antar kota dlam propinsi terkait dengan keselamatan penumpang. 10. pengembangan sisten transportasi massaal serta penataan transportasi perkotaaan. 11. Penambahan armada angkutan orang di jalan (bus transportasi) 12. pengembangan transportasi berbasis keistimewaan. 13. penataan , pembinaan maupun pengendalian angkutan non kendaraan bermotor. |

1. **URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**

Sumber masalah degradasi kualitas lingkungan hidup berawal dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan degradasi kualitas lingkungan hidup harus dimulai dari proses pengambilan keputusan pembangunan pula. Sebagai suatu instrumen pengelolaan lingkungan hidup, implementasi KLHS adalah pada proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan.

Undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa kwalitas lingkungan yang semakin menurun akan mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makluk hidup lainya oleh sebab itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh sungguh dan konsisten serta kontinue bagi pemangku kepentingan maupun SKPD yang mempunyai tupoksi untuk itu.

Pengawasan serta pengkajian akan kwalitas lingkungan baik itu mengenai kawalitas udara, air maupun penciptaan ruang terbuka hijau merupakan hal yang urgen untuk menjadikan kwalitas akan lingkungan secara konstan dapat dijaga.

Pengalaman implementasi berbagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup, utamanya AMDAL, menunjukkan bahwa meskipun AMDAL sebagai salah satu instrumen pengelolaan lingkungan cukup efektif dalam memasukkan pertimbangan-pertimbangan lingkungan dalam rancang-bangun proyek-proyek individual, tapi secara konsep pembangunan menyeluruh, instrumen AMDAL belum memadai dalam memberikan jalan keluar terhadap dampak lingkungan kumulatif, dampak tidak langsung, dan dampak lingkungan sinergistik.

Saat ini, pergeseran orientasi kebijakan pengelolaan lingkungan telah mengarah pada intervensi di tingkat makro dan pada tingkat hulu dari proses pengambilan keputusan pembangunan. Esensinya adalah bahwa kerjasama antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan akan lebih efektif apabila lebih fokus pada upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan pada tingkat makro/nasional daripada terbatas pada pendekatan di tingkat proyek.

Standarissi kwalitas lingkungan hidup secara umum didasarkan pada 3 hal yaitu:

1. Kwalitas air sungai.

Kwalitas air sungai akan sangat dipengaruhi oleh:

1. Pembuangan limbah padat dan limbah cair ke sungai baik dari limbah rumah tangga, maupun peternakan dan UMKM.
2. Degradasi fungsi Lahan pada daerah resapan air akibat pengurangan kerapatan vegetsi sehingga menyebabkan air hujan kurang efektif terserap ke dalam tanah, menyebabkan kurang ddebit air sungai pada musim kemarau dan banjir pada musim penghujan.
3. Pengunaan pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan pada sektor pertanian.
4. Konversi lahan pertanian perkebunan dan kehutanan menjadi daerah pemukiman.
5. Kwalitas air tanah.
6. Kondisi kwalitas udara Ambien serta
7. Kondisi hutan dan lahan

**Pokok pokok pikiran urusan Lingkungan Hidup**

| URUSAN | IDENTIFIKASI PERSOALAN | POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD |
| --- | --- | --- |
| Lingkungan Hidup | 1. pembangunan di bidang industri apabila tidak diikuti dengan AMDAL yang bisa dipertanggungjawabkan tentu akan semakin meningkatkan jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. 2. kelemahan sistem peraturan perundangan dan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan. | 1. pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 2. perlindungan dan konservasi sumber daya alam. 3. peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup. 4. pengelolaan ruang terbuka hijau. 5. kaderisasi lingkungan hidup 6. pengelolaan sampah mandiri. |

**BIDANG KESRA (PENDIDIKAN, KESEHATAN, SOSIAL)**

Pembangunan disektor Kesejahteraan Rakyat, KESRA (Meliputi : Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak,Sosial dan Tenaga Kerja, Kebudayaan, Pengendalian Pendudukan & KB dan Tranmigrasi) merupakan *Etalase* dari seluruh *proses* dan *tujuan* dari pembangunan yang di laksanakan pemerintah sampai saat ini. Bidang kesra bermuara pada *Kesejahteraan Rakyat* sebagai puncak resonansi pembangunan yang terencana, terpadu dan berkelanjutan. Sebagaimana yang dicita-citakan dalam Dasar Negara RI *sila kelima* Pancasila, *Keadilan sosial* bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Dalam proses pembangunan yang telah di *planning*, tentu banyak kendala yang ditemui di lapangan. Mulai dari keterbatasan sumber dana pembangunan, kualitas SDM, ketepatan sasaran Pembangunan, kecocokan antara indikator capaian dengan fakta hasil pembangunan, begitu pula selalu ditengarai ada indikasi kebocoran dana pembangunan, keterbatasan penggalian sumber-sumber dana pembangunan, penguasaan teknologi dan informasi yang belum maksimal, keterbatasan rentang waktu yang tersedia dengan pelaksanaan program pembangunan, karena sistem pengawasan pembangunan yang belum mapan dan stabil, pengaturan dan pemerataan biaya pembangunan, manajemen pembangunan yang belum terintegrasi secara baik. Sampai pada belum terserapnya dana pembangunan secara tepat, akurat dan proporsional (sesuai alokasi dalam APBN maupun APBD).

Merujuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025”, maka ( paling tidak untuk tahun anggaran 2020 ) prinsip pembangunan *terintegratif* mutlak harus dilaksanakan sesuai komitmen dari seluruh pemangku kepentingan.Tujuannya untuk mensasari pembangunan yang efektif, efisien berbasis *akuntabilitas dan berkelanjutan.* Bila prinsip dan komitmen pembangunan tersebut, bisa dipenuhi dan ditegakkan, maka sangat memungkinkan terbukanya peluang iklim *good governance* dilingkungan aparatur pemerintah, selaku *stakeholder*, pemegang sekaligus penggerak pembangunan Nasional maupun Daerah.

Bidang *Kesra* selalu menjadi *issue sensitif* dalam setiap tahapan pembangunan, karena bidang menjadi tolok ukur dan sorotan bagi kemajuan tingkat daerah maupun tingkat Nasional, tidak terkecuali termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu *Bidang ini* menjadi Inti sasaran dan sekaligus barometer pembangunan.

Dalam visi DIY 2025 Bidang Kesra ini dapat kita lihat yaitu sebagai *“Pusat pendidikan, budaya dan tujuan Wisata dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera”*. Melalui visi tersebut Pemerintah daerah DIY menginginkan warganya menjadi *cerdas, mandiri, terampil dan* berkarakter*.* Data penunjang untuk menuju harapan tersebut, telah membuka peluang bagi pencapaiannya, diantaranya Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat DIYpada tahun 2018mencapai angka 74,87 tahun atau 99,74 % dari target 75,06. Kemudian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY tahun 2018 capaiannya sebesar 79,59 dari target 80,29 atau 99,13%, diatas rata-rata nasional yang berada pada angka 70,18.Maka, layak dan rasional bila Pemerintah daerah DIY berupaya keras untuk meningkatan kualitas dan pengembangan pendidikan berserta fasilitas-fasilitasnya, menjadikan sektor pendidikan di DIY sebagai *destinasi pendidikan Nasional* yang terkemuka di Indonesia, khususnya pada tingkat Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, sektor pendidikan menjadi program *skala prioritas* dalam penyusunan RKPD tahun 2021, karena sesuai dengan Tema sentral Pembangunan pada 2021 yaitu **“*Peningkatan kualitas SDM berbasis Keistimewaan”.***

Begitu pula dengan urusan Program dan kegiatan bidang Kesehatan, juga mendapatkan perhatian yang seimbang. Untuk pencapaian sebuah kemajuan pembangunan salah satu syaratnya adalah *Terwujudnya Kesehatan yang Prima.* Pada tahun-tahun sebelumnya telah diusulkan bahwa untuk menuju masyarakat DIY sehat berkualitas, yakni melalui program Jaminan Kesehatan (Jamkesmas) bagi seluruh Masyarakat DIY, karena satu dan lain hal program ini belum bisa beroperasi, maka RKPD DIY 2021 program ini harus diupayakan dapat terealisasi, APBD DIY TAHUN 2021 harus merespon secara *serius dan proporsional* dan menjadi *starting point bagi pelaksanaannya.* Sekalipun untuk tingkat nasional sudah ada JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang langsung dikelolah oleh BPJS, prihal ini dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui kendala-kendala yang cukup kompleks serta memberatkan pengguna JKN tersebut. Dalam hal ini, diharapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terus melakukan berbagai upaya serta koordinasi untuk melakukan evaluasi bersama, tentang Pelaksanaan JKN yang dilaksanakan oleh BPJS, sekaligus mengupayakan untuk mengintegrasikan pelanyanan Jamkesmas DIY bersama atau melalui BPJS yang sudah ada di daerah.

Faktor dan keresahan lain, yang bisa menghambat bagi pencapaian Visi 2025 Pemerintah DIY adalah *masalah ketenagakerjaan* dan penanganan masalah-masalah sosial pada umumnya. Sektor ini, harus di upayakan mendapatkan perhatian yang sepadan dengan masalah-masalah yang muncul maupun sedang ditangani. Harus di akui, dampak kemajuan sains dan teknologi, pasti ada sekolompok masyarakat yang terkalahkan atau yang terpinggirkan akibat dari hal-hal tersebut. Maka dalam hal ini, Pemerintah DIY tidak boleh lalai memecahkan dan sekaligus menangani persoalan-persoalan tentang Ketenagakerjaan. Berupaya menemukan solusi cerdas, dapat meminimalisir dampak kemajuan sains dan teknologi yang ada saat ini. Sebagai catatan, sepanjang tahun 2014-2018 pertumbuhan angkatan di DIY mengalami kenaikan yang cukup signifikan tercatat sebanyak 2.191.742 pada tahun 2018. Era tumbuhnya sains dan teknologi saat ini menuntut kita untuk menghadirkan *pekerja-pekerja handal* dan profesional, yang dapat menjawan dan sekaligus mengisi momntum kemajuan tersebut.

Begitu pula dalam penanganan di Bidang Sosial, Sebagai contoh, selama ini terkesan dalam penangan masalah PMKS (Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial) lebih banyak bertumpu pada langkah-langkah *reaktif bukan solutif.* Kedepan, prihal ini harus ditangani dari hulu hingga hilir sebab musyabab munculnya PMKS tersebut.

Dalam rangka menuju masyarakat DIY yang mandiri dan berkarakter, sebagaimana yang diamanatkan dalam Visi DIY 2025, maka salah satu kuncinya adalah mendorong kemandirian dan kreativitas warga DIY yang memiliki etos kerja, pantang menyerah, ulet, motivasi dan semangat kerja tinggi, agar pada hari esok masyarakat DIY mampu berbuat lebih dan dapat berdiri sejajar dengan masyarakat daerah provinsi lain. Kesemua itu, harus berakar pada budaya yang kuat dan teruji, seperti peradaban yang sudah terbangun pada negara-negara Maju yang berakar pada Budayanya.

Pemerintah Daerah DIY harus terus-menerus mendorong semaksimal mungkin *aspek* *Kebudayaan* menjadi *nilai inti,* *spirit dan inspirasi* bagi Penumbuhan kreatifitas masyarakat secara masif dan berkesinambungan bagi tumbuhnya dinamika Pembangunan di DIY secara dinamis dan berkelanjutan. Begitu pula *aspek* *Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana,* harus pula menjadi Inti Penggerak bagi lajunya Pembangunan Daerah. Dengan Pengendalian pertumbuhan penduduk yang terukur dan terencana, akan sangat memudahkan bagi Pemerintah Daerah untuk mendesain pembangunan yang berorientasi pada Peningkatan *Kesejahteraan Rakyat*. Tak kalah pentingnya juga harus diberikan perhatian yang sama yaitu *aspek Transmigrasi* sebagai salah sektor pendukung pembangunan yang berorientasi Peningkatan Kesejahteraan rakyat. Sektor ini harus dikelola dengan tepat sasaran dan terintegrasi dari seluruh stakeholder yang ada, akan memberikan kemudahan bagi penyebaran penduduk secara terencana dan berkesinambungan. Oleh karena itu, ***sembilan sektor*** ***(Urusan Bidang Kesra)*** memegang peranan penting dalam proses dan dinamika Pembangunan di DIY. Maka dalam hal ini, OPD terkait dengan *Bidang Kesra*, memiliki tanggungjawab besar serta harus menyiapkan langkah-langkah *taktis,* *strategis yang bersifat solutif* untuk pelaksanaan dalam pencapaiannya.

**Urusan Pendidikan**

Menurut pakar peraih hadiah nobel Jeffry Sach yang mengatakan *“Orang bodoh karena miskin, dan orang miskin karena bodoh” (poverty trap).* Untuk memutus jebakan tersebut maka pendidikan harus di lakukan dan di intervensi oleh pemerintah. Jumlah penduduk DIY berdasar BPS tahun 2019 berjumlah 3.818. 266. Dari jumlah tersebut jumlah, yang masih berada pada usia sekolah ( 7-18 tahun ) ada sebanyak 17,54% atau sejumlah 669.723 anak dan 89,64% ( 600.340 anak ) penduduk usia sekolah masih tercatat sebagai peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, menengah maupun khusus. Sementara yang 10,36% penduduk usia sekolah tersebut tidak ada keterangan. Masih ada 69.383 anak yang belum diketahui status pendidikannya.

BPS menemukan data bahwa penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak tamat SD sebesar 30,81%, yang tamat SD/SLTP sebesar 44,95% dan yang tamat SLTA sebesar 24,24%. Hal ini juga berkorelasi dengan data ketenagakerjaan. Dimana penduduk miskin usia 15 tahun yang tidak bekerja sebesar 32,27%, yang bekerja disector informal sebesar 46,37% dan yang bekerja disector formal 21,37%. Dari data tersebut jelas ada korelasi yang positif antara latar belakang pendidikan dengan kondisi ketenagakerjaan. Selain itu pendapatan penduduk miskin yang usia15 tahun ke atas yang bekerja di sector formal belum mencukupi kebutuhan hidup layak menurut standar BPS.

Salah satu parameter untuk melihat kinerja urusan pendidikan adalah rata-ratalama sekolah. Capaian pemerintah DIY untuk parameter rata-rata lama sekolah tahun 2018 adalah 9,32 naik dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 9.24 tahun, dan 9.10 tahun pada tahun 2016. Namun dalam LKPJ 2018 ini capaian rata-rata lama sekolah tidak lagi disampaikan, diganti dengan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang di definisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. HLS tahun 2018 adalah 15.56 tahun. Parameter pendidikan lainnnya adalah angka partisipasi murni (APK) dan angka partisipasi kasar (APK). Jika dilihat dari parameter Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), pemerataan akses pendidikan di DIY masih perlu terus ditingkatkan terutama untuk jenjang sekolah menengah atas. Capaian APK untuk jenjang pendidikan menengah selama 2014-2018 menunjukan angka fluktuatif dengan rata-rata APK 92.88 (Gambar1.13) buku LKPJ 2018.

Dengan melihat data-data tersebut program wajib belajar 12 tahun perlu mendapatkan dukungan yang lebih besar lagi dari pemerintah daerah. Dan kewenangan pendidikan sekolah menengah sudah menjadi kewenangan pemerintah propinsi berdasar UU 23 Tahun 2014. Dari masalah kuantitas, untuk sekolah menengah DPRD juga melihat masalah kualitas yang masih perlu ditingkatkan. Dari data jumlah pengangguran terbuka, yang pada tahun 2018 berjumlah 73.350 orang, bertambah 9.331 orang, jika dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 64.019 orang. Dan hal ini meningkatkan capaian TPT yang tahun 2018 sebesar 3.35% dar target 2.78% (realisasi 82.98%).

Pengangguran menurut kelompok umur didominasi penganggur usia muda dan produktif berusia di bawah 35 tahun yang jumlahnya mencapai 89,59% naik jika dibandingkan dengan proporsi di tahun 2014 yang sebesar 78,80%. Dan pengangguran menurut pendidikan didominasi pendidikan menengah ( SMA dan SMK ) yakni 46,51%, sementara yang berpendidikan diploma dan sarjana mencapai 21,26%

Berdasar laporan yang ada bahwa angka ujian nasional SMK tahun 2018 mengalami penurunan. Hasil ujian nasional SMK sebesar 54.77, jauh dari target yakni 57.65 ( 95% ), dan mengalami penurunan dibanding capaian 2017 yakni 57.43. Hal itu tidak terjadi pada SMA. Rata-rata hasil ujian nasional: SMA 62.5 dari target sebesar 57.45 (realisasi 108.79%) dan naik dibanding 2017 yang mencapai 57.39. Sasaran akhir RPJMD yakni tahun 2022 untuk rata-rata hasil ujian nasional SMA adalah 58.41 dan untuk SMK adalah 58.29. Jika dilihat dari persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dilaporkan bahwa sekolah yang telah memenuhi SNP > 90 adalah sebesar 156/460 x 100% = 33.91%, meliputi SMA sebanyak 52 dari 163 sekolah, SMK sebanyak 79 dari 218 sekolah dan SLB sebanyak 25 dari 79 sekolah. Dari capaian SNP > 90 masih banyak sekolah menengah yang difasilitasi agar bisa memenuhi SNP yang telah ditetapkan.

Dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pengangguran peran pemuda aktif perlu ditingkatkan. Dilaporkan dalam LKPJ 2018 bahwa jumlah pemuda kader aktif bertambah sebanyak 217 pemuda, yakni dari 6567 pemuda menjadi 6784. Perlu upaya yang lebih keras dan tepat sasaran agar pemuda kita tidak banyak yang menganggur. Terutama kegiatan yang mendukung kewirausaaan (entrepreneurship) yang berdampak secara positif terhadap perbaikan ekonomikita.

Untuk Prosentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju ( realisasi 25 atau 419% ) SMK/SMA/SLB hasilnya 18/29/39 atau sangat baik 25/baik 38/cukup 27/kurang sebanyak 10 sekolah. Pendidikan berbasis budaya sangat penting mengingat pendidikan karakter perlu ditanamkan sejak usia dini terutama melalui sekolah agar nantinya lulusan peserta didik kita, tidak hanya pintar secara ilmu pengetahuan dan ketrampilan namun juga memiliki akhlak atau budi pekerti yang baik.

**REKOMENDASI**

1. Meningkatkan cakupan akses pendidikan peserta didik dengan sasaran wajib belajar 12 tahun
2. Meningkatkan bantuan untuk pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dengan beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya
3. Meningkatkan kualitas lulusan sekolah terutama sekolah kejuruan untuk peningkatan akses lapangan kerja

**III. Urusan Kesehatan**

Urusan kesehatan bertujuan untuk memperbaiki umur harapan hidup (UHH). UHH DIY termasuk tinggi, jika dibandingkan propinsi lain, yakni 74. 82 tahun. Memang belum mencapai target yang di harapkan yakni 75.06 ( realisasi 99.74% ). Sejumlah parameter kesehatan terus diusahakan untuk diperbaiki, seperti; angka kematian ibu dan balita, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, serta pencegahan dan pengendalian penyakit. Pada tahun 2018 angka kasus kematian ibu, bayi dan balita masih mengalami kecenderungan naik. Pada tahun 2017 angka kasus kematian sebesar 313. Dan angka kematian balita 343 kasus. Untuk angka kematian ibu (AKI) tahun 2017 sebanyak 34 kasus. Tahun 2018 tidak ada laporan. Untuk angka prevalensi kurang energy protein ( KEP ) tahun 2018 sebesar 7.94% mengalami penurunan dibanding tahun 2017 yang sebesar 8.26%

Di laporkan bahwa berdasar hasil riset kesehatan dasar ( Riskesdas ) tahun 2018, masih da prevalensi penyakit menular seperti infeksi saluran pernafasan ( ISPA ) Pneumonia, Tuberculosis TB Paru, diare, malaria dan filariasis walaupun masih dibawah angka nasional. Namun untuk penyakit yang tidak menular seperti kanker, stroke, ginjal kronis, diabetes, jantung dan hipertensi menunjukan prevalensi melebihi angka nasional. Penyakit lain seperti HIV AIDS dan TB terus bertambah.

Untuk capaian indicator urusan kesehatan sesuai dengan RPJMD ada empat indictor dan hasilnya mencapai realisasi 100% bahkan lebih. Sebagai contoh indicator kinerja sasaran persentase pukesmas melaksanakan program jogja sehat dengan pendekatan keluarga. Target 67.77, dan realisasi 100 sehingga capainnya adalah 149%. Namun yang perlu di perhatikan adalah keterkaitan antara capaian indicator ini dengan masih tingginya angka kejadian penyakit menular sebagaimana dipaparkan di atas. Demikian juga dihubungkan dengan parameter AKI, Angka kematian bayi, angka kematian balita serta KEP (gizi buruk). Sulitnya menekan kasus kematian ibu, bayi dan balita dari tahun ketahun disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah kondisi 3 T (terlambat merujuk, terlambat sampai dan terlambat mendapatkan pertolongan) dan kualitas kesehatan ibu hamil. Sehingga bentuk intervensi kebijakan mengenai permasalahan ini perlu ditekankan. Akses pada sarana pelayanan kesehatan yang tertandar dan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata sehingga dapat mencegah dari kematian perlu diperhatikan. Demikian juga dengan capaian persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi.

Pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 64.89% terealisasi 66.41%. Hal ini patut kita apresiasi dimana akreditasi memberi jaminan akan pelayanan kesehatan yang terstandard di unit-unit pelayanan kesehatan kita. Namun yang masih memprihatinkan kita adalah belum meratanya jumlah sarana pelayanan kesehatan yang ada terutama Rumah Sakit dan ketersediaan dokter spesialis. Dari IPM kita bisa melihat banyak hal. IPM DIY adalah 79.59 yang merupakan akumulasi dari IPM per Kabupaten/Kota. IPM Kota Jogja 85.49, Sleman 82.85, Bantul 78.67, Kulonprogo 73.23 dan Gunungkidul 68.73. Dengan demikian DPRD terus mendorong agar ada political will untuk memberikan prioritas kebijakan dan anggaran untuk mengurangi kesenjangan diberbagai bidang pemerintahan.

Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah DIY terkait dengan tingginya prevalensi penyakit tidak menular (PTM) sebagaimana telah dipaparkan diatas. Jika program dan kegiatan yang ada belum Nampak hasilnya maka perlu dilakukan pendekatan yang berbeda. Hal ini untuk mencegah kenaikan kasus setiap tahun.

**REKOMENDASI**

1. Meningkatkan layanan dasar kesehatan, berupa sarana Rumah Sakit dengan standard an pemerataan tenaga medis (dokter spesialis) untuk wilayah selatan DIY dan wilayah tertinggal untuk meningkatkan derajad kesehatan penduduk
2. Meningkatkan pola hidup sehat dan sadar kebutuhan gizi (kalori) untuk menunjang standar pola hidup sehat dan kecukupan kalori yang erat kaitannya dengan standa rhidup sehat menurut WHO.
3. Peningkatan layanan posyandu baik posyandu balita maupun posyandu lansia untuk mendukung semakin banyaknya lansia sebagai konswensi naiknya UHH warga DIY.

**IV. Urusan Sosial**

Keberhasilan penurunan jumlah penduduk miskin DIY dari target sebesar 484.947 dan diturunkan tahun 2018 dengan realisasi sebesar 450.250 ( realisasi sebesar 107.7% ) perlu mendapatkan apresiasi. Walaupun secara prosentase jumlah penduduk miskin angka tersebut belum tercapai. Sebab sampai dengan September 2018 adalah 11.81% dari target 11.23%. Pemerintah DIY telah melakukan terobosan yakni dengan melaksanakan Kegiatan Fasilitasi dan Jenjang Ekonomi Bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM Tahun 2018. Bentuk kegiatannya berupa pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan ( KPM PKH ) graduasi dengan usaha ekonomi produktif berupa pemberian modal usaha. Mekanisme dilakukan dengan Bantuan Keuangan Khusus merealisasikan 301 KPMPKH graduasi di 5 kabupaten/kota dengan bantuan modal usaha masing-masing sebesar Rp 2.300.000 Kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan tahapan pelaksanaan kegiatan. Waktu pelaksanaan selama 3 tahun yang ditempuh dengan tahapan sebagai berikut:

1) Tahun 1; kegiatan yang dilaksanakan yaitu kabupaten/kota mengusulkan by name by address KPM PKH, yang telah graduasi selanjutnya dilakukan sosialisasi dan assessment bimbingan motivasi dan seterusnya.

2) Tahun 2; focus kegiatan pada peningkatan kapasitas KPM yang masih bertahan sampai dengan ahir tahun pertama. KPM akan diberikan penguatan dengan kegiatan berupa family development session program kemampuan peningkatan keluarga (P2K2).

3) Tahun 3; penambahan modal usaha sebagai bentuk penghargaan bagi KPM PKH yang berhasil. Keberhasilan pemberdayaan KPM PKH graduasi dengan memperhatikan tiga aspek yaitu: aspek kelembagaan, aspek ekonomi dan aspek sosial.

Dari pemerintah pusat penanganan kemiskinan melalui program PKH ditahun 2018 pemerintah DIY telah merealisasikan peyaluran PKH sampai dengan tahan IV sejumlah 213.557 KPM, dari KPM tersebut anaknya yang sekolah sampai jenjang perguruan tinggi ad 5.692 anak. Selain itu juga ada program bantuan pangan non tunai di DIY sebanyak 317.210 KPM.

Mencermati apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah DIY bekerjasama dengan Pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi. Dari sejumlah warga yang telah menerima KPM PKH tersebut yang telah melewati tahapan-tahapan tersebut sudah bisa mandiri, menjadi wirausaha mandiri dan berapa nilai omset atau jumlah tenaga kerja yang dapat diberdayakan program ini. LKPJ 2018 terlu memberikan laporan yang lebih rinci mengenai hal tersebut. Data jumlah penerima manfaat juga perlu di sampaikan per Kabupaten/Kota untuk melihat sejauh mana distribusinya. Jangan sampai program ini tidak mencerminkan problem DIY yang sedang berusaha untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan (pendapatan maupun wilayah).

**REKOMENDASI**

1. Peningkatan layanan pada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terutama bagi warga miskin, gepeng dan PMKS lainnya
2. Perbaikan data jumlah penduduk miskin untuk menghilangkan adanya data penduduk miskin yang tidak tepat sasaran (inklusi/ekslusi)
3. Meningkatkan layanan pada program peningkatan PKH untuk hasil yang baik, tepat sasaran, transparan dan akuntabel

**URUSAN KEBUDAYAAN**

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, memberikan Keistimewaan kepada DIY salah satunya adalah tentang *Kebudayaan,* kewenangan kebudayaan tersebut, meliputi kewenangan mengatur dan mengurus pelestarian, pembaharuan aset dan nilai-nilai budaya Jawa, Yogyakarta khususnya. Kewenangan urusan kebudayaan tersebut didasarkan bahwa Yogyakarta – Kesultanan dan Pakualaman – memiliki budaya yang khas, merupakan *pilar* dari kebudayaan Jawa pada umumnya. Dalam konteks ini Kebudayaan, dimanifestasikan dalam wujud nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat-istiadat, benda, seni dan tradisi luhur memiliki akar kuat dalam masyarakat Yogyakarta yang telah dibentuk melalui proses wacana yang intens dan panjang. Budaya Yogyakarta, dalam wujudnya sebagai nilai telah memainkan peranan *strategis dan penting* khususnya dalam proses pembentukan masyarakat Indonesia menjadi komunitas bangsa, di mana saat ini bangsa Indonesia *sudah eksis* menjadi bangsa dan negara yang berdaulat.

Keistimewaan Bidang Kebudayaan ini, menjadi focus dan otoritas Pemerintah Daerah DIY, maka dalam pelaksanaannya secara otomatis akan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota beserta Pemerintah Desa. Oleh karena itu, kebijakan dibidang Kebudayaan, yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota wajib merujuk pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah DIY. Maka, sehubungan hal itu, Pemerintah Daerah DIY harus menjadikan *Kebudayaan* *sebagai roh* atas seluruh dinamika, aktifitas pemerintahan, dan kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah *taktis* untuk penguatan nilai budaya ke dalam aktifitas-kehidupan keseharian masyarakat, baik dalam lingkungan pemerintahan maupun dalam dinamika sosial kemasyarakatan umumnya.

Dalam LKPJ Gubernur tahun 2018, dilaporkan bahwa Permasalah yang muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Kebudayaan antara lain:

1. Belum optimalnya upaya pelestarian yang meliputi penggalian, reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya (budaya, adat, dan tradisi) yang menjadi spirit Renaisans Yogyakarta;
2. Peninggalan warisan budaya benda semakin terancam kelestariannya karena dinamika perkotaan;
3. Belum optimalnya perlindungan hukum terhadap aset budaya fisik maupun non-fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa;
4. Pengelolaan kekayaan budaya sebagai aset, untuk menarik kunjungan wisata belum Optimal;
5. Kelembagaan pengelolaan kawasan budaya dan organisasi penggerak dan penggiat seni budaya, juga belum dinamika yang lebih dan Optimal.

Bila kita Merujuk Capaian program dan kegiatan pada Urusan bidang kebudayaan pada2018, yang melaksanakan 3 Program pendukung dan 11 program teknis dengan 45 kegiatan, yang didukung alokasi Dana sebesar Rp. 152.822.249.518,00 realisasi keuangan mencapai Rp. 136.753.745.522,00 atau 89,99 % sedangkan capaian fisik sebesar 99,27 %. Usaha untuk penguatan tatanan kehidupan dengan berbasis pada *budaya sebagai roh*, diharapkan kedepan capaian-capaian tersebut sedapat mungkin pada tahun 2021 ditingkat lebih baik lagi, sebagai *pengungkit* munculnya kreatifitas dibidang Budaya, sekaligus memantapkan DIY sebagai pusat *kebudayaan* dalam gerak kehidupan masyarakat di DIY. Dengan kata lain, *Budaya khas* *Yogya* *menjadi Icon DIY kedepan****.***

**REKOMENDASI**

* 1. Implementasi UU Nomor 13 tahun 2012, khususnya di bidang Kebudayaan, perlu pengawalan khusus, mengingat arti penting nilai-nilai Budaya, sebagai Ruh dan basis Undang-Undang Keistimewaan dan sekaligus Ikon Daerah istimewa Yogyakarta, sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Nasional.
  2. Penggalian, Pengembangan, Pemantapan/kristalisasi nilai-nilai Orsinalitas budaya, sebagai basis Budaya DIY.
  3. Penguatan nilai-nilai budaya, sebagai rujukan Pengembangan nilai-nilai budaya yang terbarukan, sesuai hakekat tumbuh-kembangnya budaya, yang berakar pada budaya Jogjakarta.
  4. Peningkatan fasilitasi, dalam rangka Perekayasaan budaya asli dalam mengahadapi *terpaan* budaya luar yang masif-global kedalam budaya Adihulung Yogyakarta.
  5. Peningkatan fasilitasi pemeliharaan dan Riset budaya, dalam konteks pelestarian dan pengembangan budaya, sebagai artepak budaya Adiluhung harus terus didukung dan galakan.
  6. Perumusan, Pemantapan dan sosialisasi ***Simbol-simbol Budaya***, sebagai Inti Budaya, dan Identitas Keistimewaan Yogyakarta, menjadi keniscayaan untuk segera diwujudkan.

**Tabel 9 : Pokok-pokok Pikiran Urusan Kebudayaan**

| **URUSAN** | **IDENTIFIKASI PERSOALAN** | **POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD** |
| --- | --- | --- |
| **Kebudayaan** | * 1. Perintah UUK, di Bidang Budaya;   2. Segera ada turunan regulasi terkait tentang Budaya, Peraturan Pelaksanaan   3. Perlu peningkatan Pemahaman pada masyarakat tentang UUK dibidang kebudayaan;   4. Kebudayaan masih dipahami dalam terminologi sempit.   5. Budaya, sebagai “Roh keistimewaan”   6. Melahirkan “Maskot Budaya” atau simbol Jogja Istimewa | * + 1. Peningkatan sosialisasi UUK dibidang Kebudayaan;     2. Menggali Nilai-nilai Orsinilitas Budaya DIY;     3. Melakukan Penguatan Nilai-nilai Budaya Utama dlm seluruh aspek Kehidupan masyarakat DIY;     4. Pengawalam & Peningkatan Fasilitasi perekayasaan Budaya;     5. Peningkatan fasilitasi Maintenance dan Riset Budaya.     6. “Perumusan nilai-nilai Budaya”, sebagai Roh Jogja Istimewa     7. Merumuskan identitas Budaya yang khas Yogyakarta. |

**URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**

Dalam urusan pengendalian Penduduk, khususnya pada program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di tingkat Kabupaten/Kota telah menjadi kewenangan daerah, *bahkan menjadi urusan wajib* sesuai dengan amanat *PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Oleh sebab itu, daerah memiliki keleluasaan untuk mengembangan program KKBPK. Program KKBPK, dapat berhasil bila memenuhi beberapa aspek antara lain: *pertama*, pengendalian kuantitas penduduk. *Kedua,* peningkatan kualitas penduduk yang diukur dengan peningkatan ketahanan, ketiga peningkatan kesejahteraan keluarga. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat dilihat dari indikator  yang merupakan cerminan dari pelaksanaan Delapan fungsi uatama keluarga sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, meliputi: (1) fungsi keagamaan, (2) fungsi sosial budaya, (3) fungsi cinta kasih, (4) fungsi perlindungan, (5) fungsi reproduksi, (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan, (7) fungsi ekonomi dan (8) fungsi pembinaan lingkungan.

Sejalan dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi *sentral* dalam proses pembangunan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan terencana disegala bidang, termasuk dalam bidang kependudulan, salah satunya adalah menciptakan kondisi ideal antara pertumbuhan kependudukan dengan ketersediaan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini dengan tanpa harus mengurangi untuk menyiapkan kebutuhan generasi mendatang.

Dalam konteks Pengendalian kependudukan dan KB paling tidak ada dua hal utama yang perlu mendapat perhatian, khususnya tentang integrasi penduduk dalam pembangunan, antara: 1) penduduk tidak hanya diposisikan sebagai obyek, akan tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan, 2) penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan usaha pemberdayaan dalam rangka menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Maka “pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas”, mutlak menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Distribusi umur penduduk dan penurunan rasio ketergantungan penduduk muda (youth dependency ratio) di Indonesia, akan membentuk keadaan ideal, akan mengkondisikan potensi *bonus demografi.* Penduduk usia kerja, hampir dua kali lipat komposisinya bila dibanding dengan jumlah penduduk dibawah usia 15 tahun. Rasio ketergantungan penduduk Indonesia tersebut, telah menurun dari 54/100 pada tahun 2000 menjadi 51/100 pada tahun 2011 dan turun menjadi 50/100 tahun 2012.

*Mapping kependudukan* ini, akan terus turun mencapai angka terendah, *endingnya* diharapkan pada tahun 2020- 2030, besaran angkanya sekitar *44 per 100,* dengan catatan bila pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Maka Bonus demografi tersebut akan menjadi nyata, bila momentum dan kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk menghasilkan kemajuan dan memicu pertumbuhan ekonomi, termasuk didalamnya membangun ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa kedepan.

Berpijak pada pencapaian kinerja dalam kurun lima tahun terakhir urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah menunjukan trend yang membaik 0,52% pada tahun 2013 meningkat menjadi 0,24% pada tahun 2016 ( indikatornya penurunan jumlah pernikahan dibawah umur 20 tahun). Untuk menuju capaian yang lebh baik, pada tahun 2021, maka diperlukan kebijakan, strategi dan upaya khusus dalam pengendalian pendudukan dan Keluarga Berencana melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), terutama melalui pencapaian sasararan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, khususnya untuk menurunkan: *lajunya pertumbuhan penduduk (LPP).*

Hasil survey Demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) Total Fertility Rate ((TFR) DIY secara perlahan terus mengalami peningkatan, terhitung sejak 2012 sampai 2017, angka kenaikannya mencapai 2,2. Peningkatan ini pula disinyalir sebagai penyebab terjadinya peningkatan pertumbuhan Penduduk di DIY. Sasaran utama urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain meningkatnya rata-rata Usia kawin pertama Perempuan dan keberdayaan keluarga, Balita dan Lansia. Dua sasaran Pengendalian diatas menggunakan indikator, pertama indikator Umur bagi Usia Kawin Pertama perempuan. Kedua, menggunakan persentase Legalitas Keluarga. Capaian tahun 2018 antara lain:**1)** Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan target 24,40, realisasi 25,32 atau sekitar 103,77%; **2)** Persentase Legalitas Keluarga (perkawinan dan kelahiran) target 98,00 realisasi 98,15 atau capaian sekitar 100,15%. Oleh karena itu, dalam rangka untuk peningkatan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, rekomendasinya sebagai berikut:

**REKOMENDASI**

* + - 1. Peningkatan fasilitasi Pelaksanaan UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mutlak dilakukan dalam rangka pengendalian Pertumbuhan Pendudukan dan KB secara berkesinambungan;
      2. Peningkatan kapasitas skill dan ketrampilan tenaga Kependudukan dan KB kontinu harus dilakukan;
      3. Pengendalian dan Penurunan secara terukur tentang Lajunya pertumbuhan Penduduk (LPP) sudah menjadi kesadaran dan keniscayaan semua pihak;
      4. Diperlukan langkah-langkah efektif Penurunan angka kelahiran total (TFR);
      5. Mendorong Peningkatan Pemakaian terhadap Kontrasepsi (CPR);
      6. Mendorong Peningkatan Jumlah Peserta KB dikalangan Usia subur;
      7. Menurunkan Jumlah Kehamilan yang tidak diinginkan (WUS);

**Tabel 10 : Pokok-pokok Pikiran Urusan Pengendalian Pendudukan**

**& Keluarga Berencana**

| **URUSAN** | **IDENTIFIKASI PERSOALAN** | **POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD** |
| --- | --- | --- |
| **Pengendalian Penduduk & KB** | * 1. Masih lemahnya Pemahaman regulasi tentang Kependudukan dan KB;   2. Masih rendahnya motivasi dan skill tenaga Lapangan yg terkait Pengendalian Penduduk & KB;   3. Masih tingginya angka kelahiran dan Lajunya Pertumbuhan Penduduk;   4. Masih rendahnya minat Usia subur untuk memasangan alat Kontrasepsi;   5. Berkurangnya peserta KB produktif;   6. Masih rendahnya Pemahaman tentang Reproduksi, dikalangan Usia Subur dan remaja. | * + 1. 1. Peningkatan Fasilitasi dalam rangka percepatan Implementasi UU No.52 tahun 2009;     2. Peningkatan skill dan ketrampilan tenaga lapangan Kependudukan dan KB;     3. Pengendalian dan penurunan lajunya pertumbuhan Penduduk secara terpadu;     4. Mendorong Penurunan angka kelahiran Total (TFR) dan Peningkatan Pemakaian Kontrasepsi (CPR);     5. Mendorong jumlah Peserta KB;     6. Diperlukan langkah-langkah efektif utk Menurunkan Jumlah Kehamilan yang tidak dinginkan (WUS); |

**URUSAN TRANSMIGRASI**

Dalam Pelaksanaan urusan *Transmigrasi* sebagaimana diatur dalam Perubahan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014, tentang pelaksanaan Undang-undang Ketransmigrasian. Secara umum pengembangan dan pelaksanaan transmigrasi dilakukan melalui beberapa pendekatan diantaranya yakni pembentukan/pembangunan *Satuan Pemukiman (SP)* namun untuk Wilayah Kalimantan akan menerapkan pendekatan *Satuan Pemukiman Pemugaran* (SP-Pugar). Melalui pendekatan ini diharapkan, para transmigrasi langsung dapat diintegrasikan dengan masyarat setempat. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah bersama Pemerintah Daerah, diharapkan akan mempermudah dan memperlancar proses pelaksanaan Program Transmigrasi, baik dari daerah asal maupun di daerah tujuan Transmigrasi.

Pemerintah Daerah DIY selama kurun waktu 4 tahun terakhir, atau sepanjang periode 2014-2018 telah memberangkatkan Transmigran, sebanyak 334 KK, khusus pada tahun 2018, meberangkat sebanyak 36 KK ke 5 lokasi antara lain:

* + - 1. Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Sijunjung padang Tarok, SP I sebanyak 10 KK;
      2. Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Kayong Utara, Tanjung Sinta SP 3, sebanyak 8 KK;
      3. Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Paser, Kaladen sebanyak 10 KK;
      4. Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali, Kabera sebanyak 4 KK;
      5. Provinsi Gorontalo, kabupatenPohuwato, Sandalan, sebanyak 4 KK.

Dalam penyelengaraan urusan transmigrasi, strategi yang digunakan adalah meningkatkan kualitas penempatan, pemberdayaan tenagakerja serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi. Indikator yang digunakan adalah Jumlah kesempatan kerja pada tahun 2018 sebesar 2.118.392 orang atau capaian realisasi sebesar 106, 97%. Karena Urusan Transmigrasi masuk dalam program penempatan, Perluasan kesempatan kerja. Pada tahun 2018 Urusan Transmigrasi mendapatkan alokasi Dana anggaran sebesar Rp. 5.417.775.300,00 untuk melaksanakan 1 Program dengan 7 kegiatan, Realisasi keuangan sebesar Rp. 4.854.039.970,00 atau sebesar 98,06%.

Pemerintah Daerah, khususnya OPD terkait, masih ada kendala atau permaslahan dalam pengelolaan Program Transmigrasi, khususnya dalam pelaksanaan tahun anggaran 2018 antara lain:

* 1. *Pelaksanaan rekrutmen dan Penempatan,* pada tahun berjalan yang dilaksanakan oleh Kabupaten /Kota sesuai surat pemberitahuan Pemberangkatan dari Pusat, bila ada yang mengundurkan diri OPD terkait di Kabupaten/Kota ada kesulitan dan hambatan untuk mencari Pengganti Peserta Transmigrasi;
  2. *Belum ada Penerapan secara Ketat reward dan Punishment* bagi Daerah asal dan tujuan transmigrasi, yang melanggar kesepakatan kerjasama antar-Daerah (KSAD), dengan sebab itu KSAD belum dapat dilaksanakan secara Optimal.

Hal-hal tersebut, harus menemukan solusi yang tepat oleh Pemerintah bersama pemerintah Daerah, agar kendala yang ada dapat diatasi secara teknis dilapangan. Disamping itu, peserta transmigrasi tidak cukup hanya dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga harus diberikan muatan khusus tentang *Ketrampilan untuk memahami adat-istiadat dari budaya setempat* ( Daerah tujuan Transmigrasi ).

Sebaiknya Pemerintah Daerah, perlu *melakukan Public Hearing*mendengar langsung keluhan penduduk, pemuka agama dan tokoh adat setempat dan bila perlu masyarakat sekitar, juga mendapatkan perlakuan dan *apresiasi* yang sama dari pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam rangka menjaga harmoni pergaulan, stabilitas daerah dan kesuksesan Program Nasional Transmigrasi.

**REKOMENDASI**

1. desak m
   * + 1. Mendesak melakukan Penataan Ulang dan re-konseptualisasi, tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan Transmigrasi;
       2. Perlu melakukan penyiapan dan pengelolaan calon peserta Transmigrasi secara *terpadu,* agar percepatan akulturasi budaya antara pendatang dan penduduk setempat dapat terbentuk secara harmonis;
       3. Perlu melakukan sosialisasi secara terbuka dan akuntabel dalam pengelolaan program Transmigrasi, baik dari daerah asal maupun sampai di daerah tujuan;
       4. Perlu Melakukan *publing hearing* dan *Lobbying* yang terpetakan secara baik, dengan masyarakat daerah tujuan, agar konsep KSAD dapat terlaksana, dalam rangka untuk kelancaran dan kesuksesan program Transmigrasi;
       5. Perlu terus menerus sosialisasi dan motivasi masyarakat, untuk melakukan perluasan lapangan kerja melalui program *transmigrasi* yang di inisiasi oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah. Sebagai pelaksanaan Umum Transmigrasi.

**Tabel 11 : Pokok-pokok Pikiran Urusan Transmigrasi**

| **URUSAN** | **IDENTIFIKASI PERSOALAN** | **POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD** |
| --- | --- | --- |
| **Transmigrasi** | * 1. Masih Ada Kesenjangan Pemahaman tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan Transmigrasi;   2. Masih minimnya kesiapan Calon Peserta Transmigrasi,   3. Masih Ada mis komunikasi antara masyarakat calon Peserta dengan Pemerintah, selaku penyelenggara program,   4. Terus Menurunnya animo masyarakat utk ambil bagian program Transimigrasi, baik secara mandiri atau langsung dikelola Pemerintah.   5. Masih lemahnya pengelolaan program secara profesional, | * + 1. Diperlukan pemahaman baru dan re-konseptualisasi terkait dengan Program Transmigrasi;     2. Diperlukan Penyiapan dan pendekat bari bg Calon Peserta Transmigrasi secara alamiah     3. Perlu peningkatan sosialisasi dan pemahaman secara utuh dan mencerahkan;     4. Diperlukan langkah-langkah Public Hearing, dengan masyarakat lokasi tujuan, agar tercipta harmoni antar warga; dg warga pendatang     5. Peningkatan motivasi dan stimulan bagi Calon transmigrasi, agar memiliki kemauan dan tekad untuk bertransmigrasi;     6. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk peningkatan Pengelolaan Program secara Profesional |

**BAB IV**

**PENUTUP**

Membangun kebijakan publik dalam dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah harus memperhatikan proses politik yang dilakukan oleh DPRD. Salah satu agenda mendesakkan hasil reses ataupun proses aspirasi lain dari masyarakat dengan cara membangun dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD tahun 2021 sebagai bagian dari dokumen strategis dan arah kebijakan dalam menyusun program dan kegiatan tahun berjalan.

Gagasan mengenai sejumlah pikiran DPRD dalam mendorong kebijakan pembangunan di D.I Yogyakarta tahun 2021 telah kami rangkum dalam berbagai tulisan dalam buku Pokok-Pokok Pikiran DPRD tahun 2021. Tujuan utama penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2021 adalah mendorong pemerintah daerah D.I Yogyakarta untuk bisa membangun kebijakan pembangunan daerah lebih baik lagi, khususya dalam menangaini isu-isu pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan kesenjangan infrastruktur wilayah yang menjadi tema pembangunan daerah. DPRD D.I Yogyakarta berharap Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2021 mampu mewarnai banyak perubahan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam membangun tema-tema pembangunan dalam RKPD D.I Yogyakarta 2021.

Pokok-pokok pikiran disusun dengan format mengemukakan berbagai persoalan arah kebijakan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah D.I. Yogyakarta seperti terdapat dalam Bab II. Kemudian diusulkan berbagai program prioritas yang merupakanjawaban atas permasalahan tersebut. Dengan model matrik program diharapkan dapat mudah dibaca untuk disesuaikan dengan perencanaan oleh pemerintah daerah dalam bab III.

Pokok-pokok pikiran disusun dengan tujuan sebagai bahan telaah Pemerintah DIY dalam menyusun rencana kerja pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan  
penyelenggaraan pemerintahan. Persoalan utama seperti masalah kemiskinan, ketimpangan wilayah, ketimpangan pendapatan, masalah pengangguran serta persoalan pembangunan lainnya yang memerlukan penyelesaian. DPRD melalui dokumen pokok-pokok pikiran ingin memastikan bahwa berbagai masalah tersebut dapat diatasi dengan kemampuan daerah.Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD ikut memberikan masukan, aspirasi dan usulan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagian programusulan masih bersifat makro. Untuk usulan lebih detail atas program dan kegiatan akan disampaikan kemudian.

Pokok-pokok pikiran ini juga merupakan bentuk komunikasi formal antara legislatif dan eksekutif. Hal ini penting untuk membangun harmoni pemerintahan tanpa mengurangi tugas pokok fungsi legislatif di bidang pengawasan, anggaran serta legislasi daerah. Melalui Pokok-pokok pikiran, DPRD telah menyampaikan aspirasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan, dijadikan sebagai bahan telaah dalam mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian diharapkan RKPD Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan masukan semua pihak. Dengan demikian diharapkan pula akan menghasilkan perencanaan pembangunanyang tepat sasaran, efektif, efisien serta akuntabel. Kemampuan keuangan daerah yang terus meningkat, dan didukung dengan dokumen perencanaan yang aspiratif serta dijalankan oleh penyelenggara pemerintahan yangakuntabel dan responsif diharapkan akan menghasilkan kualitas program dan kegiatan yang efektif dan efisien dan hasil akhir peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY. Sebagai daerah yang memiliki keistimewaan DIY memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif yang dapat menunjang capaian keberhasilan pemerintahan. Kewenangan otonomi daerah ditambah dengan kewenangan keistimewaan diharapkan dapat mempercepat laju pembangunan di DIY secara keseluruhan.

Akhirnya DPRD DIY berharap pokok-pokok pikiran ini dapat ditelaah dengan baik danmampu diterjemahkan menjadi bagian tak terpisah dari perencanaan pembangunan D.I Yogyakarta tahun 2021. Untuk uraian yang lebih detail dari program dan kegiatan akan dilengkapi dengan usulan-usulan DPRD yang bentuk dan mekanismenya akan ditentukan kemudian.

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

**ttd  
H. YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA, SE**